

GEOGRAFI POLITIK

Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Sukma Perdana Prasetya, S. Pd., MT.

GEOGRAFI POLITIK

Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan



PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2014

Geografi Politik
Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan
Copyright © Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., MT., 2015

Diterbitkan oleh Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2015
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292
Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
website: www.penerbitombak.com
facebook: Penerbit Ombak Dua

PO. *.01.'15**

Penulis: Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., MT.
Penyunting: Achmad Nuryadin, S.Pd.
Tata letak: Adik Mustofa Tamam
Sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Geografi politik
Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014
x + 218 hlm.; 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-***-***-*

Persembahan

Buat Mamaku

(Sulistyowati)

Dari inspirasi dan motivasi tiada henti

Buat Istriku

(Armawati Hidayati)

Dari segala harapan hidup yang dijalani,

Kesukacitaan kasih dan sayang,

Dan kecintaan di atas segalanya

Buat Putra-Putriku

(Al Fafa Ramadhani, Al Fatih Maulana, Al Fasya Fahira, Al

Fahri Hanifudin, Alfahra Hanifa)

Dari rasa sayang dan bangga tiada terperi

DAFTAR ISI

PRAKATA – ix

BAB I RUANG LINGKUP GEOGRAFI POLITIK –1

- A. Sejarah Geografi Politik – 1
- B. Konsepsi dan Ruang Lingkup Geografi Politik – 5
- C. Konsepsi Geopolitik – 8
- D. Determinisme dan Posibilisme dalam Lingkup Geografi Politik – 10
- E. Konsepsi Ruang dalam Geografi Politik – 15

BAB II PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KEMAJUAN NEGARA – 21

- A. Peranan Sumber Daya Manusia Terhadap Kemajuan Negara – 21
- B. Aspek Sumber Daya Manusia dalam Perkembangan Negara – 24
- B. Pengaruh SDM yang Rendah Bagi Negara – 35

BAB III PERANAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEMAJUAN NEGARA – 37

- A. Peran Penting Sumber Daya Alam – 37
- B. Hubungan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia – 39
- C. Potensi Sumber Daya Alam Negara Indonesia – 43
- D. Pemanfaatan Sumber Daya Alam – 45
- E. Pengaruh Sumber Daya Alam di Bidang Politik dan Kekuatan Negara – 47
- F. Pengelolaan Sumber Daya Energi – 49

BAB IV INDUSTRIALISASI SEBAGAI KEKUATAN POLITIK NEGARA

– 55

- A. Peran Strategis Industri – 55
- B. Pengaruh Industri Terhadap Kemajuan Suatu Negara – 59
- C. Dampak Positif dan Negatif Industri – 68

BAB V PENGARUH LETAK, LUAS DAN BENTUK TERHADAP PEMERINTAHAN NEGARA – 71

- A. Pengaruh Letak – 71
- B. Pengaruh Luas – 76
- C. Pengaruh Letak, Luas dan Bentuk Indonesia – 79

BAB VI DETERMINISME IKLIM – 86

- A. Pengaruh Iklim terhadap Negara – 86
- B. Jenis Iklim dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan – 89
- C. Iklim yang Cocok Bagi Perkembangan Ekonomi dan Politik – 94
- D. Homogenitas Lawan Kompleksitas Iklim – 97
- E. Iklim dan Peperangan – 98
- F. Mewasapadai Pemanasan Iklim Global – 99

BAB VII WILAYAH INTI DAN WILAYAH EKONOMI – 105

- A. Teori Heartland – 105
- B. Implementasi Daerah Inti (*Core Area*) di Berbagai Negara – 108
- C. Daerah Ekonomi – 110
- D. Beberapa Contoh Negara Kategori Daerah Inti dan Daerah Ekonomi – 111

BAB VIII BATAS NEGARA – 122

- A. Makna Penting Batas Bagi Negara – 122
- B. Klasifikasi Perbatasan Internasional – 130
- C. Permasalahan Kawasan Perbatasan Indonesia – 140

BAB IX BENTUK KONFLIK DAN KLAIM DALAM KEPENTINGAN TERITORIAL – 143

- A. Pengertian Konflik – 143

- B. Penyebab Konflik – 146
- C. Jenis Konflik – 146
- D. Proses Suatu Konflik – 146
- E. Klaim Teritorial – 146
- F. Konflik Kepentingan Teritorial – 150
- G. Geostrategi Indonesia dalam Kepentingan Teritorial – 156

**BAB X PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK
NEGARA – 163**

- A. Definisi Globalisasi – 163
- B. Proses Perubahan Global – 165
- C. Dampak Globalisasi Secara Umum – 169
- D. Dampak Globalisasi Terhadap Ekonomi Negara – 174
- E. Dampak Globalisasi Terhadap Politik Indonesia – 176
- F. Antisipasi Strategis – 179

GLOSARIUM – 182

DAFTAR PUSTAKA – 184

TENTANG PENULIS – 186

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberi hidayah dan kekuatan, sehingga penyusunan buku yang berjudul “Geografi Politik: Sebuah Penguatan Wawasan Kebangsaan” ini dapat terselesaikan.

Dalam konteks kemajuan negara, unsur kehidupan sosial, ekonomi, ekologis, dan politik bukan telaah yang terpisah-pisah. Informasi-informasi yang terpisah-pisah dari berbagai sumber oleh geografi dirangkai menjadi satu analisis yang holistik, yang secara khusus bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaknai suatu wilayah.

Secara spesifik, telaah geografi politik melokasikan panggung aktivitas manusia (politik), kemudian mempelajari sejauh mana kondisi lingkungan alam dan lingkungan sosial dapat memengaruhi kegiatan manusia untuk menggerakkan aktivitas politiknya dalam konteks kenegaraan. Buku ini memuat berbagai aspek kehidupan seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, industri, iklim, pengaruh letak, luas dan bentuk negara, wilayah inti dan ekonomi, wilayah perbatasan, konflik dan klaim teritorial, serta globalisasi. Aspek-aspek tersebut saling terkait karena mempunyai peranan penting dalam memengaruhi kehidupan politik suatu negara. Mengingat banyaknya negara-negara dunia yang dapat dipaparkan, kajian buku ini lebih menitikberatkan pada wawasan negara Indonesia.

Tentunya banyak sekali kekurangan pada penulisan isi buku ini. Untuk itu demi perbaikan, kritik dan saran konstruktif sangat dibutuhkan.

BAB I

RUANG LINGKUP GEOGRAFI

POLITIK

A. Sejarah Geografi Politik

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, telah lahir dan tumbuh suatu ilmu pengetahuan yang disebut *geografi*. Tujuan terpenting dari geografi adalah untuk memperoleh pengertian yang lebih baik dari dunia di mana manusia hidup, guna dapat ditimbulkan penilaian dan penghargaan yang memadai.

Sesungguhnya setiap cabang ilmu pengetahuan juga mempunyai tujuan dan maksud yang serupa dengan geografi. Keistimewaan geografi terletak pada kekhususannya mengonsentrasikan perhatian dan arah penelitiannya untuk memusatkan kepada penyelidikan dan penafsiran data-data yang terdapat pada suatu wilayah di atas Bumi.

Tugas pokok geografi adalah mengumpulkan keterangan-keterangan (data) dari berbagai sumber yang terpecah untuk dirangkai menjadi satu kelompok keterangan, yang secara khusus bertujuan memberikan pengertian tentang suatu wilayah tertentu. Mengikuti cara-cara geografi ini, muncullah istilah "*Area Study*" atau kajian penelitian wilayah.

Berkaitan dengan negara, pengertian wilayah selalu dikaitkan:

1. wilayah yang berisi beberapa negara, seperti batas-batasnya ditentukan oleh peta politik dunia,
2. wilayah-wilayah pokok dunia (*mayor world, regions*), di mana negara-negara tersebut terletak di atas.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama transformasi informasi komunikasi dan teknologi militer, telah mendorong munculnya kesadaran akan adanya keterkaitan antara geografi dan dinamika politik dunia. Kesadaran tersebut ditangkap oleh Friedrich Ratzel dan dirumuskan dalam bentuk *Antropho-geografi* yang pada intinya mengulas sintesis antara antropologi, geografi dan politik. Tujuannya adalah mempelajari manusia, masyarakat, negara dan dunia sebagai organisme hidup. Demikian juga Ratzel secara berulang-ulang dalam karyanya menekankan bahwa pada akhirnya *antropho-geografi* harus memusatkan pandangan dan kajiannya pada sisi organismenya. Inilah sesungguhnya benih awal perkembangan pemikiran mengenai geopolitik. Pengaruh pemikiran organisme dari Ratzel terlihat pada pengembangan *geografi politik*, di mana terjadi hubungan timbal balik antara semua komponen yang menyusun negara.

Geografi politik berasal dari geografi manusia dan terkait sebagian besar dengan kepentingan militer sebagai konsekuensi politis hubungan antara geografi fisik dan geografi sosial dalam suatu wilayah negara. Geografi politik mempunyai asosiasi dekat dengan geografi regional, dengan fokusnya atas karakteristik daerah yang unik, dan determinisme lingkungan dengan penekanannya atas pengaruh lingkungan fisik pada aktivitas manusia.

Pemikiran geografi politik sampai dengan akhir abad ke-19 didominasi oleh teori Ratzel, Ritter dan Mahan yang menganggap negara sebagai organisme serta pengaruh alam terhadap tata

perilaku manusia atau *geographical determinist*. Pada awal abad ke-20 muncul pemikiran dari para ahli Prancis seperti Albert Demangeon, Louis Febure, Andre Siegfried dan Jacques Ancel, yang beranggapan bahwa negara sebagai satu organisme hidup memiliki *moral* dan *spritual* sehingga tidak dapat dipandang sebagai satu ruang (*space*) yang hampa. Adanya nasionalisme, paham kebangsaan, cinta tanah air membuktikan negara bukan sekadar ruang kosong. Pemikiran demikian ini disebut *geographical humanist*.

Geograf Britania Halford Mackinder juga mempunyai pemikiran yang dipengaruhi oleh determinisme lingkungan dan dalam mengembangkan konsepnya '*geopolitical pivot*' (poros) atau *heartland* (lebih dulu dikembangkan 1904). Ia berargumentasi bahwa kunci kekuasaan dipengaruhi oleh kekuatan armada dalam menguasai *heartland* 'Euro-Asia' yang akan mengendalikan dunia itu. Teori ini melibatkan konsep yang secara diametris mempertentangkan gagasan Alfred Thayer Mahan tentang arti kekuatan armada di dalam konflik dunia. Teori Heartland menghipotesiskan kemungkinan suatu kerajaan sangat besar diciptakan tidak perlu menggunakan penguatan maritim atau pantai untuk menyediakan kekuatan militernya.

Teori Heartland melukiskan suatu dunia dibagi menjadi suatu Heartland (Eropa Timur/Rusia barat); Pulau Dunia (Eurasia dan Afrika); sekeliling Pulau (Pulau kecil Britania, Jepang, Indonesia, Australia dan Austria) dan Dunia Baru (American). Mackinder mengklaim bahwa siapa pun yang menguasai Heartland akan mempunyai kendali dunia. Ia dulu memperingatkan secara politis mengenai pengaruh peristiwa Perjanjian Versailles, di mana negara penyangga telah diciptakan antara USSR (Uni Soviet) dan Negara Jerman, untuk mencegah negara mana pun yang berusaha mengendalikan Heartland.



Gambar 1.1. Friederich Ratzel
Sumber: wikipedia.org

Pada waktu yang sama, pekerjaan Geograf Jerman Friedrich Ratzel dalam bukunya *Politische Geographie* (1897), mengembangkan konsep *Lebensraum* (ruang hidup) yang dengan tegas berhubungan pertumbuhan budaya suatu bangsa dengan perluasan wilayah, dan kemudian digunakan untuk menyediakan pengesahan akademis dalam perluasan kaum imperialis.

Ratzel sedang menciptakan suatu teori negara mendasar di sekitar konsep *Social Darwinism*. Ia berargumentasi bahwa negara adalah 'organisma' yang memerlukan ruang cukup untuk hidup. Sebagaimana organisme yang membutuhkan tumbuh dan berkembang, untuk kepentingan negara, model ini memerlukan adanya perluasan wilayah melalui aneksasi, pendudukan maupun kolonisasi wilayah lain.

Geograf Rudolf Kjellen berkesimpulan bahwa geomorfologi haruslah dimanfaatkan dari segi politik, maka lahirlah *the politics of geography* yang kemudian diberi nama oleh Kjellen sebagai *Geopolitik*. Secara umum Kjellen memberi definisi geopolitik sebagai satu *Science of the state*. Kjellen beranggapan bahwa geopolitik hanya salah satu bagian saja. Kjellen menekankan bahwa sebagai salah satu organisme hidup, negara yang diciptakan oleh Kjellen merupakan satu unit kekuatan dan kekuasaan yang selalu mengikuti hukum pertumbuhan.

Kjellen memperkirakan bahwa hukum pertumbuhan akhirnya akan membawa pada satu keadaan di mana muncul beberapa negara besar saja yang mampu memengaruhi lainnya. Jika hal ini

dikaitkan dengan jalur-jalur pelayaran niaga yang penting waktu itu, maka pertumbuhan akan mengarahkan sepanjang jalur pelayaran tadi. Bila diamati peta-peta dunia kala itu, maka dapat dilihat bahwa koloni-koloni Inggris selalu berada pada tepian jalur pelayaran dunia.

Pertumbuhan negara melahirkan rivalitas dan permusuhan antara negara-negara besar saat itu. Hal ini tidak hanya menarik perhatian Kjellen akan tetapi juga Mackinder dari Inggris. Mackinder melihat bahwa konflik saat itu bukanlah sekadar konflik negara-negara maritim untuk menguasai dunia. Atau dapat juga dikatakan sebagai konflik antara kekuatan Euro-Asia (*heartland*) melawan kekuatan kepulauan dan pinggiran (*peripheral*). Ketiga penulis (Mackinder, Ratzel dan Kjellen) ini menciptakan gagasan untuk suatu ilmu pengetahuan geografis dan politis.

B. Konsepsi dan Ruang Lingkup Geografi Politik

Mendefinisikan geografi politik dan ruang lingkungnya merupakan tugas yang sulit, sebab sasaran dan tujuannya berubah seiring dengan sifat geografi politik yang berubah sebagai suatu disiplin. Tetapi geografi politik yang muncul selalu saja lebih dari sekadar aspek politik dari kajian-kajian geografis kontemporer. Ada suatu jalinan umum dalam semua geografi politik yang didasarkan atas perhatian terhadap negara-negara sebagai entitas teritorial. Hasilnya adalah analisis- analisis kekuasaan dengan ruang yang terfokus pada negara.

Penafsiran dan analisis geografi politik dapat dimulai dari pengkajian yang berpangkal pada aktivitas politik manusia. Politik berasal dari bahasa Yunani '*polis*' berarti kota yang berstatus negara. Segala aktivitas *polis* untuk kelestariannya disebut *Politica*. Politik pada hakikatnya "*The art and science of government*".

Pada karya *'Il Principe* yang diterbitkan tahun 1513, Machiavelli dalam Haryomataram (1972), mengemukakan "*Politic Is Power*". Politik adalah upaya memperoleh kekuasaan, penggunaan atau menghambat penggunaannya.

Politik dilakukan dalam rangka menjamin kehidupan negara, yang kekuasaannya (*political power*) berpusat pada pemerintahan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, perjuangan politik pada akhirnya ditujukan untuk menguasai pemerintahannya.

Jika politik diartikan sebagai pendistribusian kekuasaan (*power*), kewenangan (*rights*) dan tanggung jawab (*responsibilities*) dalam kerangka mencapai tujuan politik (nasional), maka geografi politik berupaya mencari hubungan antara konstelasi geografi dengan pendistribusian tersebut. Hal ini disebabkan pendistribusian itu harus didiseminasikan pada hamparan geografi yang memiliki ciri-ciri ataupun watak yang tidak homogen di seluruh wilayah negara. Inilah ciri-ciri yang ditengarai penyebab mengapa efek dan efektivitas pendistribusian terhadap masyarakat sifatnya tidak homogen, yang disebabkan oleh dampak dan intensitas pendistribusian yang bervariasi di seluruh wilayah negara.

Karena adanya perbedaan cara pandang terhadap penebaran serta dampaknya terhadap masyarakat, maka terdapat perbedaan dalam cara mendefinisikan geografi politik. Ada yang melihat dari sudut pandang geograf, sehingga geografi politik dianggap sebagai dampak geografi atas proses politik. Ada yang melihat dari kaca mata ahli politik, sehingga mendefinisikan geografi politik sebagai kajian tentang interaksi dinamis proses politik dengan morfologi negara, misalnya saja dalam *landreform*. Pengaruh morfologi negara atas dinamika politik misalnya saja terlihat dalam pembagian pemerintahan daerah maupun dalam penentuan daerah pemilihan pada setiap pemilu.

Terdapat kesamaan terhadap dua sudut pandang tadi, yaitu mempelajari *distribusi spasial* serta interaksi yang terjadi sepanjang *jalur spasial*. Sudah barang tentu pengertian jalur spasial telah mencakup aspek morfologi negara alias konfigurasi geografi negara. Selanjutnya, apabila proses politik dianggap sebagai proses interaksi, maka dapat dibayangkan bahwa secara morfologis proses politik menimbulkan apa yang sebagai proses interaksi, maka dapatlah dibayangkan bahwa secara morfologis proses politik menimbulkan sebagai satu *medan politik* (medan interaksi politik). Sehingga akhirnya dapat didefinisikan. Geografi politik merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi spasial berbagai kekuatan atau kepentingan dalam medan politik nasional suatu negara yang berdaulat.

Dalam pandangan negara, politik itu sendiri diartikan sebagai seni tentang kenegaraan yang dijabarkan dalam praktik di lapangan sehingga dapat dijelaskan bagaimana hubungan antarmanusia (penduduk) yang tinggal di suatu tempat (wilayah) yang meskipun memiliki perbedaan pendapat atau kepentingan tetap mengakui adanya kepentingan bersama untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.

Dari kedua definisi tersebut dapat digabungkan, bahwa definisi geografi politik adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia (politik), kemudian mempelajari sejauh mana kondisi lingkungan alam dapat memengaruhi kegiatan manusia dalam menggerakkan aktivitas politiknya.

Geografi politik meliputi semua aspek batasan-batasan, negeri, status, dan pengembangan bangsa, organisasi interasional, diplomasi, divisi internal, pemungutan suara, dan demikian jauh lebih luas. Geografi politik adalah ilmu yang bidang kajiannya aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan yang

meliputi hubungan regional dan internasional, pemerintahan atau kenegaraan di permukaan Bumi. Dalam geografi politik, lingkungan geografi dijadikan sebagai dasar perkembangan dan hubungan kenegaraan. Bidang kajian geografi politik relatif luas, seperti aspek keruangan, aspek politik, aspek hubungan regional, dan internasional.

Secara khusus ruang lingkup kajian geografi politik berkaitan dengan:

- Bagaimana dan mengapa negara-negara tersebut disusun dalam kelompok wilayah, baik formal (misalnya Uni Eropa) dan informal (misalnya Dunia Ketiga).
- Hubungan antara negara dan bekas koloni, dan propogandanya di sepanjang waktu, misalnya melalui neokolonialisme, neoliberalisme.
- Hubungan antara pemerintah dan penduduknya.
- Hubungan antara negara termasuk kerja sama dan perdagangan internasional dan perjanjian.
- Pengaruh faktor-faktor geografis baik aspek fisik (sumber daya alam, letak, luas, bentuk, batas, iklim) dan aspek sosial (sumber daya manusia, industri, ekonomi, globalisasi, teknologi) terhadap kebijakan politik suatu negara.
- Bagaimana implikasi konflik politik antarnegara.
- Pengaruh kekuasaan politik pada ruang geografis
- Analisis spasial pemilihan umum.

C. Konsepsi Geopolitik

Istilah geopolitik pertama kali digunakan oleh Rudolf Kjéllen, seorang ahli politik dari Swedia pada tahun 1905. sebagai cabang dari geografi politik, geopolitik fokus pada perkembangan dan kebutuhan akan ruang bagi suatu negara. Geopolitik mengombinasikan teorinya Friedrich Ratzel's tentang

perkembangan alami sebuah negara dengan *Heartland Theory* (teori kawasan inti) dari Sir Halford J. Mackinder's untuk membenarkan praktik-praktik yang bersifat ekspansionis dari beberapa negara.

Geopolitik merupakan pengembangan dari geografi politik, di mana negara dipandang sebagai satu organisasi hidup yang berevolusi secara *spatial* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat bangsanya atau tuntutan kebutuhan akan *lebensraum* (ruang hidup) yang secara eksplisit dikaitkan dengan perkembangan budaya bangsa teritorial dengan perluasan, dan yang kemudian digunakan memberikan legalisasi akademik untuk ekspansi imperialis dari negara Jerman di tahun 1930-an.

Ditangan para pemikir Jerman saat itu, khususnya Haushofer, geopolitik berkembang dengan pesat sebagai satu cabang ilmu pengetahuan di mana kekuasaan (politik) dan ruang (*room*) merupakan anasir sentralnya. Sehingga kemudian Haushofer menamakan geopolitik sebagai satu *science of the state* yang mencakup bidang-bidang politik, geografi (ruang), ekonomi, sosiologi, antropologi, sejarah dan hukum dan pertama kali diuraikan dalam bukunya yang terkenal '*Macht und Erde*' (kekuasaan dan dunia).



Kedekatan hubungan antara Haushofer dengan Hitler sejak awal diperkirakan merupakan penyebab dari menyusupnya info gagasan dalam *Macht und Erde* kedalam buku '*Meinkampf*'. Tidak mengherankan apabila pada akhir perang dunia ke-2 geopolitik tidak lagi dikagumi, karena

Gambar 1.2. Karl Haushofer

dituduh sebagai biang keladi dari ekspansi Jerman.

Pengaruh Haushofer juga terasa di Jepang karena dia pernah ditugaskan di sana antara tahun 1909–1911 untuk mempelajari sistem militer Jepang serta mempererat hubungan militer antara kedua negara. Setelah sampai di Jerman, Haushofer menyusun konsep *lebensraum* untuk Jepang yang diterbitkan dalam bukunya yang berjudul *Dai Nippon (Greater Japan)*. Gagasan itu kemudian juga diperkirakan menjadi landasan dari doktrin *Fukoku Kyohei (Rich Country Strong Army)* yang melandasi dilakukannya pembangunan besar-besaran angkatan perang kekaisaran Jepang menjelang Perang Dunia II.

Kalau dilihat dari sudut pandang tataran pemikiran, maka sesungguhnya *lebensraum* maupun *Fukoku Kyohei* merupakan satu prasyarat dalam mencapai cita-cita nasional. Jadi geopolitik adalah pada hakikatnya prasyarat; dan karena harus dipenuhi secara nasional, maka dapat juga disebut sebagai *doktrin dasar negara*.

Sebagai suatu doktrin dasar, geopolitik mengandung empat unsur utama yaitu:

- a. Konsepsi ruang, yang merupakan pengejawantahan dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup.
- b. Konsepsi frontier, yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan.
- c. Politik kekuatan, yang menerangkan tentang kehidupan negara.
- d. Tentang keamanan negara dan bangsa, yang kemudian melahirkan geostrategi.

D. Determinisme Dan *Posibilisme* Dalam Lingkup Geografi Politik

1. Determinisme Fisik

Determinisme fisik atau lingkungan, juga dikenal sebagai

determinisme iklim atau *determinisme geografi*, adalah pandangan bahwa lingkungan fisik menentukan aktivitas manusia, bukannya kondisi sosial dan budaya yang menentukan aktivitas manusia. Orang-orang yang meyakini pandangan ini mengatakan bahwa manusia secara ketat ditentukan oleh stimulus-respon (lingkungan-perilaku) dan tidak menyimpang.

Argumen dasar dari lingkungan determinis adalah aspek fisik geografi, khususnya iklim yang memengaruhi psikologi pikiran kumpulan individu, yang pada gilirannya menentukan dalam membentuk perilaku dan budaya masyarakat. Misalnya, iklim tropis yang dikatakan menyebabkan cepat lelah dan berkeringat, sehingga muncul kemalasan sikap dan santai. Aktivitas manusia menyebabkan lebih banyak ditentukan dan diarahkan bekerja sesuai etika. Karena pengaruh lingkungan, tubuh manusia menjadi lambat untuk beroperasi. Penting menelusuri migrasi kelompok manusia untuk melihat kondisi lingkungan mereka yang telah berkembang.

Lingkungan determinisme mulai dikembangkan Geograf Yunani Strabo yang menulis dalam buku *Geographica* bahwa iklim memengaruhi disposisi psikologis yang berbeda ras. Dalam buku itu pula Strabo membuat peta Eropa.



Gambar 1.3. Strabo ahli Geograf Yunani di abad 16



Gambar 1.4. Peta Eropa karya Strabo
Sumber: wikipedia.org

Beberapa gagasan kuno di Cina satu bentuk determinisme lingkungan seperti ditemukan di buku *Guan Zhong*, yang tertulis di abad 2 SM. Dalam bab “Air dan Bumi” (*Shuidi*), dikemukakan pernyataan seperti “Sekarang negara apidari Qi yang kuat, cepat dan berpengaruh, karena orang-orang itu yang serakah, kasar, dan suka perang”, dan “ negara air dari Chu adalah lemah lembut, penurut, dan murni, karena orang-orang itu mempunyai sifat baik hati, teguh, dan yakin pada kemandirian”.²

Penganut awal determinisme lingkungan di Arab adalah penulis al-Jahiz, yang menjelaskan bagaimana lingkungan dapat menentukan karakteristik fisik penduduk dari masyarakat tertentu. Determinisme digunakannya awal teori evolusi untuk menjelaskan asal dari berbagai warna kulit manusia, khususnya kulit hitam, yang ia percaya sebagai hasil dari lingkungan. Teori ini dikutip dari sebuah wilayah batu hitam basal di utara Najd sebagai bukti.

Ahli matematika dan Sosiolog Arab, Ibn Khaldun, juga seorang

penganut determinisme lingkungan. Dalam bukunya *Muqaddimah* yang diterbitkan tahun 1377, ia menjelaskan bahwa kulit hitam itu disebabkan oleh iklim panas dari sub-Sahara Afrika dan bukan karena keturunan. Dia justru percaya, di mana anak-anak Ham yang dikutuk oleh makhluk hitam, sebagai mitos.

Determinisme lingkungan berkembang pesat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika ia diangkat sebagai pusat teori oleh disiplin dari geografi (dan sedikit banyak, antropologi). Profesor Ellen Churchill dari Universitas Clark memperkenalkan teori ke Amerika Serikat setelah belajar dengan geografi manusia Friedrich Ratzel di Jerman. Yang menonjol dari determinisme telah dipengaruhi oleh tingginya profil Evolusi Biologi, yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Darwin.

Variasi determinisme lingkungan menjadi populer di kalangan Marxis. Model Marxis menjadi dasar ideologis dan budaya yang ditentukan menjadi dasar ekonomi. Mereka menambahkan bahwa ide dasar ekonomi ditentukan oleh kondisi lingkungan. Sebagai contoh, ahli geograf Rusia Georgi Plekhanov berpendapat bahwa alasan kaumnya masih dalam zaman feodal daripada menuju perekonomian kapitalisme dan menjadi matang untuk revolusi dalam komunisme, adalah dataran yang luas dari Rusia dilingkupi kelas sosial menjadi konflik yang disebarkan dengan mudah. Pemerintahan yang kuat dan sistem ekonomi yang komando (terpusat) sangat diperlukan untuk mengendalikan daratan yang luas dan kelas sosial yang beragam tersebut. Determinisme lingkungan Marxis ini adalah reinkarnasi waktu yang sama dari teori klasik determinisme lingkungan. Geografi di sini menggabungkan kajian-kajiannya dengan perkembangan dalam ilmu-ilmu sosial.

Kekurangan determinisme lingkungan terletak pada soal teori sosial yang memadai, dan ide-idenya hanya bisa bertahan di luar

geografi ketika para ahli ilmu politik mengacu kepada pengaruh-pengaruh geografi lingkungan sebagai faktor-faktor geografis atau ketika gagasan-gagasan geografi simplistis digunakan untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan perang dingin yang agresif.

2. Posibilisme

Manusia adalah makhluk yang berakal. Dengan kemampuan akalnya manusia mampu merespons apa yang diberikan oleh alam. Posibilisme dalam geografi budaya adalah teori yang menggagas bahwa lingkungan tidak mutlak menentukan kendala atau batasan tertentu, namun teknologi melalui budaya menentukan tindakan manusia. Dalam ekologi budaya, Marshall Sahlins menggunakan konsep ini dalam rangka mengembangkan alternatif pendekatan ke lingkungan dominasi determinisme lingkungan pada waktu itu dalam studi ekologi.

Posibilis medalam geografi ini dianggap sebagai sebuah pendekatan berbeda untuk pengetahuan geografi dan secara langsung bertentangan dengan determinisme geografis. Sebagai contoh, aktivitas manusia di sekitar lingkungan pantai, menurut paham determinisme, dipastikan sebagai nelayan. Namun bagi paham posibilisme disebutkan bahwa bentukan pantai dapat berupa bentukan pantai yang landai, agak curam, dan sangat curam (*cliff*), berawa, dan yang memiliki *continental shelf* yang panjang. Respons mata pencaharian manusia terhadap bentukan lingkungan pantai akan beragam, misalnya menjadi nelayan, petambak udang atau garam, petambak rumput laut, bahkan bersawah pada wilayah pesisir atau muara sungai.

Beberapa pakar geograf Paul Fidal de La blace (1845–1918) menyatakan bahwa pengetahuan dan teknologi baru yang dikembangkan manusia mampu mengendalikan lingkungan

serta meningkatkan kemaslahatan hidupnya di masa mendatang. Penggunaan energi nabati (*biofuell*) menggantikan energi fosil, penggunaan *air conditioner* untuk menyasati lingkungan temperatur yang panas, merupakan penemuan-penemuan untuk membebaskan manusia dari kendala lingkungan.

Kemampuan manusia dalam menanggapi alam tidak terlepas dari penggunaan teknologi yang digunakannya. Dengan kemampuan penciptaan teknologi oleh manusia, menjadikan hidup manusia semakin mudah dan ringan. Keberhasilan manusia dalam menerapkan teknologi, menjadikan teknologi menjadi keyakinan sebagai tumpuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Dalam pandangan posibilisme, Bumi bukan sepenuhnya mendikte perilaku dan aktivitas manusia. Bumi hanya menyediakan kesempatan-kesempatan bagi manusia yang memilikinya dan bagaimana mengusahakannya. Manusia secara aktif menjadi faktor dominan yang mampu memanipulasi lingkungannya. Pandangan ini bila ditafsirkan secara negatif dapat mengarahkan manusia dalam keserakahan, mengingot penaklukan terhadap alam terkadang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan, sehingga menimbulkan malapetaka bagi kelangsungan hidup manusia. Di sini mulai berkembang pandangan yang lebih arif untuk memperbarui perhatian terhadap penelitian faktor-faktor lingkungan alam secara komprehensif.

E. Konsepsi Ruang dalam Geografi Politik

Ruang merupakan inti dari geografi politik, sebab menurut Haushofer dan pengikutnya, ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Dengan demikian sesungguhnya geopolitik merupakan cabang ilmu pengetahuannya yang mengaitkan *ruang* dengan *kekuatan fisik* dan *manusia*, yang pada kenyataannya

kekuatan politik selalu menginginkan penguasaan ruang dalam arti ruang pengaruh, atau sebaliknya, penguasaan ruang secara *de facto* dan *de jure* merupakan legitimasi dari kekuasaan politik. Penguasaan ruang atau pengaruh itu pada intinya merupakan satu fenomena spasial dari ruang itu sendiri. Jika ruang pengaruh diperluas, maka akan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, dan kerugian akan menjadi lebih besar lagi apabila hal itu dicapai melalui perang.

Sumbangan Marxis menafsirkan politik negara dalam hal aliansi-aliansi kelas berbasis pada ruang. Dari perspektif yang lebih kultural, bangsa-bangsa dan nasionalisme telah dikaji dalam hal keterkaitan khusus kepada tempat. Tambahan pula, sistem dunia geografi politik telah dibangun yang negara-negara dan bangsa-bangsa dilihat sebagai bagian dari perkembangan sosial dan ruang sistem dunia modern. Semua pendekatan ini mempunyai perhatian yang sama untuk mengatasi persoalan-persoalan teritorialisasi yang berubah dari masyarakat dunia kontemporer.

Setiap bangsa yang bernegara, menurut Ratzel, harus memiliki *konsep ruang*, apabila tidak, bangsa bersangkutan akan terdesak menjadi bangsa marginal dalam perpolitikan global. Kesimpulan semacam ini memang terasa valid pada era sebelum Perang Dunia II, di mana hampir tiap kawasan dunia, terutama di Eropa, persaingan untuk mendapatkan *Power Position* utama tidak jarang menimbulkan konflik terbuka. Sesudah Perang Dunia II, terutama sesudah perang dingin berakhir hampir tiap kawasan cenderung membentuk *regional grouping*. Maraknya regionalisme telah mengakhiri tidak hanya perlombaan *power position* saja, akan tetapi juga surutnya supremasi politik dan militer sebagai faktor utama penentu kekuatan nasional satu bangsa, yang kedudukannya digeser oleh faktor ekonomi.

Pada era Perang Dingin, dapat disaksikan bagaimana kedua kutub adikuasa saling berusaha memperluas *sphere of influence* maupun ruang hegemoninya masing-masing. Pada era itu, negara-negara Dunia Ketiga saling diperebutkan agar ditarik ke dalam *sphere of influence* atau ke dalam hegemoni, baik sebagai sekutu ataupun sekadar sahabat (*friendly countries*), yang penting sekurang-kurangnya tidaklah mesra dengan kubu lawan. Dapat juga dilihat bersama, saat itu tidak peduli satu negara diperintah secara kejam atau tidak, asalkan setia kepada pemimpin kubunya. Tidak mengherankan apabila kepala pemerintahan semacam Mobutu dirangkul, yang kemudian hari saat Perang Dingin selesai dicampakkan begitu saja atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Maka berturut-turut beberapa kepala pemerintahan di negara-negara Dunia Ketiga berguguran silih berganti setelah ruang yang mereka kuasai tidak lagi memiliki nilai strategi lagi.

Konsepsi strategi Indonesia yang mengatakan bahwa pendudukan terhadap satu pulau dapat dianggap sebagai pendudukan seluruh negara merupakan satu bukti lagi bahwa terdapat satu hubungan erat antara ruang dengan kekuatan dan kepentingan. Kekuatan di sini diartikan sebagai kekuatan penangkalan yang harus siaga dalam menghadapi kemungkinan, sekecil apapun, terjadinya pendudukan atas satu bagian kecil dari negara ini.

Keteguhan dan kesungguhan setiap negara atau bangsa mempertaruhkan setiap jengkal ruang yang berada di dalam wilayah kedaulatannya merupakan satu bukti adanya keterkaitan antara ruang dengan sifat negara sebagai organisme hidup. Dalam hal ini, berkurangnya ruang negara oleh sebab apa pun juga memberi dampak psikologis pada penduduk akan berkurangnya bernapas. Tidak mengherankan apabila negara-negara kecil seperti Singapura atau Israel tidak dapat menoleransi berkurangnya

ruang negara, dan akan selalu bereaksi sangat keras terhadap ancaman dari luar yang berpotensi untuk mampu mengurangi ruang negara mereka. Untuk itu, negara-negara semacam itu selalu mempersiapkan kekuatan militer yang tangguh dan mampu melancarkan *pre-emptive strike* (bila perlu diluncurkan dari luar negaranya).

Bertambahnya ruang negara atau berkurangnya ruang negara oleh berbagai jenis sebab, selalu dikaitkan dengan kehormatan dan kedaulatan negara dan bangsa. Karena itu, tidaklah mengherankan bahwa tiap negara mempertahankan kehormatan dan kedaulatannya dengan gigih dan konsisten. Bahkan negara sebesar RRC harus berjuang mati-matian mempertahankan haknya atas pulau-pulau karang kecil, yang walaupun tenggelam pada saat air pasang, di kawasan Laut Cina Selatan. Sehingga bila disimak benar-benar konflik territorial di Laut Cina Selatan sesungguhnya merupakan satu taruhan kehormatan dari negara-negara yang bertikai, dan ini memang amat sulit dicari titik temunya.

Keputusan Presiden Habibie yang begitu saja—kemungkinan besar hanya dilandasi oleh emosi atau saran staf yang kurang matang—memberikan dua opsi kepada rakyat Timor Leste. Ketika rakyat Timor Leste memilih kemerdekaan, dengan mudahnya pemerintahan menerimanya sebagai satu kewajiban. Di sini terlihat ketiadaan pertimbangan akan datang kenyataan bahwa ruang negara, sekecil apapun, terkait dengan kehormatan bangsa dan negara. Inilah satu contoh yang mengherankan sekaligus menyedihkan.

Konsepsi ruang sangat bermakna apabila dikaitkan dengan penduduk atau suku bangsa yang mendiaminya. Pada zaman dahulu, ruang hidup (*living space* atau *lebensraum*) secara ideal harus dapat memenuhi atau mendukung kehidupan bangsa;

karena itu bila dirasakan tidak lagi bisa mendukung kehidupan, maka ada kecenderungan untuk menambahnya dan inilah awal dari peperangan. Namun dalam zaman modern ini, ruang hidup tidak harus berfungsi demikian, contohnya Singapura. Hampir seluruh kebutuhan hidup rakyat Singapura dibeli dari luar, yang kemudian dibayar dari produk jasa dan industri. Dengan demikian nilai strategis ruang menjadi bermakna apabila dikaitkan dengan produktivitas penduduk yang pada gilirannya terkait secara langsung dengan faktor karakter, pengetahuan, ekonomi, industri dan sebagainya.

Apabila ahli geopolitik Jerman, seperti misalnya Erich Obst, menekankan pentingnya luas ruang bagi kehidupan suatu bangsa (dan perkembangan di kemudian hari) maka Ray S. Clime lebih berorientasi pada masa kritis dari ruang yang bersangkutan. Masa kritis di sini merupakan penjumlahan dari masa kritis penduduk, yaitu jumlah riil penduduk yang produktivitasnya dapat diandalkan, ditambahkan dengan masa kritis geografi ruang, yaitu luas riil dari ruang yang secara alami bisa mendukung kehidupan rakyat dari segi produktivitasnya. Ruang negara boleh luas, seperti Australia, akan tetapi karena sebagian besar berupa gurun pasir dan gurun tandus, maka dari sudut pandang Cline masa kritisnya rendah. Atau apabila disingkat akan didapat:

$$Mk (\text{ruang}) = MK (d) + Mk (g).$$

Luas ruang negara menjadi amat bermakna apabila dilihat dari segi strategis, sebab di situ akan berlaku strategi menukar waktu dengan ruang, di mana makna harfiahnya adalah tersedianya/disediakkannya bagian ruang tertentu untuk diduduki sementara oleh musuh, sementara itu kita mempersiapkan serangan balasan yang mematikan. Ini hanya bisa dilakukan apabila ruang negara cukup luas. Karena itu, apabila ruang negara sempit maka hanya

terbuka satu opsi yaitu: *Pre-emptive Strike* atau serang sebelum musuh siap. Mengapa demikian, karena tidak adanya cukup ruang untuk mempersiapkan dukungan logistik (ruang atau daerah belakang), untuk digunakan persiapan tempur (ruang atau daerah komunikasi), dan digunakan untuk manuver serta memukul musuh (ruang atau daerah tempur).

Juga apabila dilihat dari segi strategi, luas ruang negara menentukan tingkatan rasa aman dari penduduknya (*security feeling*), artinya bagaimana mereka sebagai suatu bangsa bereaksi dan menyikapi terhadap ancaman dari luar. Tidak mengherankan apabila luas ruang dapat memengaruhi atau bahkan menentukan karakter suatu bangsa. Bahkan menurut Morgenthau karakter bangsa merupakan salah satu faktor yang menentukan kekuatan dan ketahanan bangsa.

BAB II

PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KEMAJUAN NEGARA

A. Peranan Sumber Daya Manusia Terhadap Kemajuan Negara

Perubahan sumber daya manusia (SDM) dapat mengubah kehidupan politik, begitu pun sebaliknya. Hubungan antara politik dan perubahan SDM (penduduk) sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari kecenderungan-kecenderungan politik dan banyak faktor lain yang bersifat independen. Konsekuensi politis dari perubahan SDM mempunyai kedudukan penting dalam studi geografi politik terutama akibat-akibat yang menyangkut kewajiban pemerintah serta persebaran kekuatan politik. Faktor-faktor penentu politis dari perubahan tersebut terutama dipermasalahkan kuantitas, kualitas dan persebaran SDM di suatu negara.

Kuantitas yang besar semestinya menentukan kuatnya kekuasaan politiknya. Tetapi apabila perubahan tingkat kuantitas penduduk ini tidak terkendali secara baik, maka jumlah penduduk yang besar justru akan memperumit pengelolaan negara tersebut. Seharusnya dengan jumlah penduduk yang banyak akan mampu membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Karena dengan

jumlah penduduk yang banyak akan muncul pemikiran-pemikiran yang bersifat kreatif dan inovatif dalam segala bidang. Namun pada kenyataannya jumlah penduduk yang besar belum diikuti dengan kualitas yang tinggi, sehingga belum mampu menjadi negara maju dan mandiri. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk, misalnya dengan meningkatkan kualitas pendidikan.

Jumlah penduduk yang banyak harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan andalan utama pembangunan suatu negara. Meski suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, mineral dan objek wisata, namun tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, negara tersebut akan tetap terbelakang. Jadi, peran manusia sebagai penggerak dan pelaksana semua kegiatan dalam suatu negara sangatlah penting.

Perbedaan antara negara berkembang (miskin) dan negara maju (kaya) tidak tergantung pada umur negara itu. Contohnya negara India dan Mesir, yang umurnya lebih dari 2000 tahun, tetapi mereka tetap terbelakang (miskin). Di sisi lain Singapura, Kanada, Australia & New Zealand, negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun, saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia, dan penduduknya tidak lagi miskin.

Ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara juga tidak menjamin negara itu menjadi kaya atau miskin. Jepang mempunyai area yang sangat terbatas. Daratannya, 80% berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Tetapi, saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor dua di dunia. Jepang laksana suatu negara “industri terapung” yang besar sekali, mengimpor bahan baku dari semua

negara di dunia dan mengekspor barang jadinya. Swiss tidak mempunyai perkebunan cokelat tetapi sebagai negara pembuat cokelat terbaik di dunia. Negara Swiss sangat kecil, hanya 11% daratannya yang bisa ditanami. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik. (Nestle adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia). Swiss juga tidak mempunyai cukup reputasi dalam keamanan, integritas, dan ketertiban tetapi saat ini bank-bank di Swiss menjadi bank yang sangat disukai di dunia.

Para eksekutif dari negara maju yang berkomunikasi dengan temannya dari negara terbelakang akan sependapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kecerdasan. Ras atau warna kulit juga bukan faktor penting. Para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju atau kaya di Eropa

Mengapa negara-negara tersebut bisa menjadi kaya atau miskin? Perbedaannya adalah pada sikap atau perilaku masyarakatnya, yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraannya. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut, perlu intervensi politik dari pemerintah negara untuk membuat regulasi kebijakan yang berpihak pada kemajuan bidang pendidikan.

Masalah sumber daya manusia di suatu negara dapat ditemukan pada setiap dimensi demografis, meliputi jumlah penduduk (kuantitas), laju pertumbuhan yang cukup tinggi, kualitas penduduk, penyebaran serta struktur umur penduduk.

B. Aspek Sumber Daya Manusia dalam Perkembangan Negara

Aspek sumber daya manusia atau penduduk yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara antara lain:

1. Kuantitas Penduduk

Pada umumnya, kuantitas penduduk suatu negara dipengaruhi oleh faktor dominasi kelahiran dan kematian. Angka kelahiran tidak sesensitif angka kematian berporsi konstan dalam total penduduk. Negara-negara yang tumbuh cepat mempunyai lebih banyak anak di bawah usia produktif, namun mempunyai lebih sedikit warga berusia tua. Kelahiran dipengaruhi banyaknya individu dalam usia reproduksi. Kelahiran di Amerika Serikat telah meningkat 3,1 juta di awal 1970-an menjadi 3,6 juta belakangan ini, hal itu disebabkan perubahan dalam distribusi usia sebagaimana halnya yang tercermin dari kelompok-kelompok besar dari jangkauan reproduksi pada tahun 1950-an.

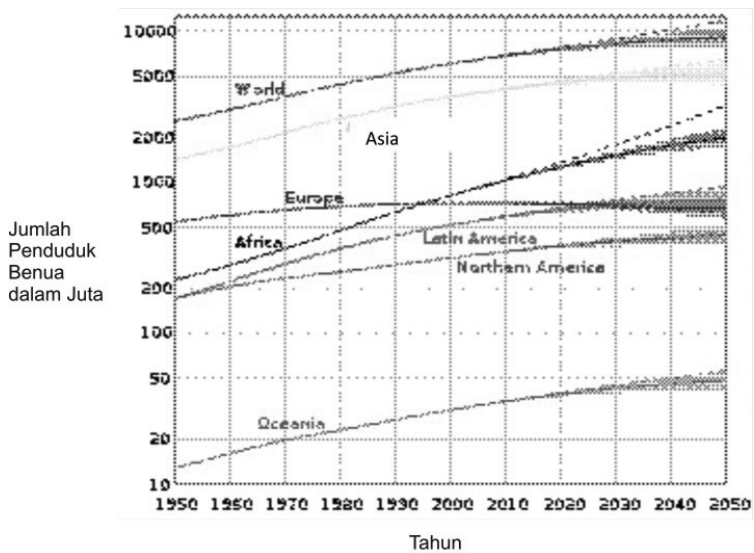
Alfred J. Loka di tahun 1907-1948 mengemukakan model dan metode geografis dalam menjawab beberapa gejala kependudukan. Salah satu yang paling penting di antaranya adalah "Seberapa cepat suatu masyarakat berkembang jika ditinjau dari tingkat kematian dan kelahiran berdasarkan kelompok umur tertentu?" Setiap penduduk yang pertumbuhannya konstan dalam jangka yang cukup panjang memiliki distribusi usia yang stabil. Lotka juga menunjukkan cara perhitungan dan pengukuran peningkatannya begitu distribusi itu mencapai tingkat intrinsiknya yang stabil (Kuper, 2000).

Setelah sempat terabaikan beberapa lama, karya Lotka mulai diterapkan dan disempurnakan selama tahun 1960-an. Pendekatannya ternyata membantu pengukuran angka kelahiran

dan angka kematian di negara-negara yang diketahui distribusi umurnya namun tidak mempunyai data-data lengkap.

Secara global, tingkat pertumbuhan populasi manusia telah mengalami penurunan sejak tahun 1962 dan 1963 berada pada kisaran 2,20% per tahun. Pada tahun 2007, tingkat pertumbuhan adalah 1,19% per tahun. Meskipun pertumbuhan penduduk terus menurun, namun seratus tahun terakhir populasi manusia tetap terekam meningkat pesat karena kemajuan medis dan peningkatan besar dalam produktivitas pertanian yang didukung oleh adanya program Revolusi Hijau.

Pertumbuhan tahunan jumlah manusia jatuh dari puncak 87,5 juta per tahun pada tahun 1989, yang terus merendahkan ke 76,4 juta per tahun pada tahun 2002. Setelah mengalami kestabilan, perlahan-lahan penambahan penduduk mulai bangkit pada angka 79,4 juta per tahun pada 2007, dan 80,2 juta per tahun pada 2009.



Gambar. 2.1 Grafik Pertambahan Jumlah Penduduk Dunia

Pertumbuhan penduduk tetap tinggi di Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan terutama di Sub-Sahara Afrika. Di beberapa negara mengalami pertumbuhan penduduk negatif, terutama di Eropa Tengah dan Eropa Timur (terutama karena rendahnya tingkat kesuburan) dan Afrika Selatan (karena tingginya jumlah HIV yang berhubungan dengan kematian). Dekade berikutnya, Jepang dan beberapa negara di Eropa Barat juga diharapkan mengalami pertumbuhan penduduk negatif karena bertanggung jawab terhadap reproduksi melalui program keluarga berencana.



Gambar 2.2 Peta Pertumbuhan Penduduk Dunia
Sumber: Wikipedia.org

Penduduk yang melebihi daya dari suatu daerah atau lingkungan disebut kelebihan hunian. Ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk atau penurunan kapasitas. Tekanan dalam populasi manusia dapat menimbulkan masalah seperti polusi dan kemacetan lalu lintas, meskipun ini dapat diatasi oleh perubahan teknologi dan ekonomi. Sebaliknya, wilayah seperti ini dapat dianggap "jarang" jika penduduk tidak cukup besar untuk memelihara sebuah sistem ekonomi.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keadaan suatu negara, misalnya dalam hal pengambilan kebijakan pemerintah. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk menciptakan permasalahan-permasalahan sosial maupun ekonomi yang tidak bisa diabaikan, namun hal ini bukan faktor utama penyebab terjadinya berbagai permasalahan negara. Jumlah penduduk yang banyak disertai penanganan yang tepat akan memberikan potensi tenaga kerja yang besar. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan antara lain kurangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan jumlah pengangguran yang tinggi. Selain itu, dengan jumlah penduduk yang banyak akan menyebabkan kebutuhan terhadap sandang, pangan dan papan meningkat, sehingga terjadi perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman. Di samping itu, peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan kebutuhan hidup akan menyebabkan timbulnya *slum area*, kelaparan, kemiskinan, gizi buruk dan dampak negatif lainnya.

Berdasarkan grafik dan peta pertumbuhan penduduk dunia, tampak pada negara berkembang secara umum mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Hal tersebut didukung oleh tingginya angka fertilitas sedangkan angka mortalitasnya jauh lebih rendah. Pada hakikatnya negara-negara Eropa, keadaan kesehatan diperbaiki secara perlahan, angka kelahiran sering kali lebih rendah dan migrasi ke Amerika Utara dan Amerika Latin sering kali terjadi. Pada abad XVIII hingga XXI, kebanyakan negara-negara Eropa mempunyai penduduk tua lebih banyak dari pada kebanyakan di negara berkembang. Perbedaan struktur umur di Asia, Afrika dan Amerika Latin dengan yang ada di negara maju begitu mencolok. Sebagai contoh, 47% dari penduduk Filipina berada di bawah umur 15 tahun, sedangkan penduduk Inggris

yang berada di bawah umur 15 tahun hanya 23%. Setengah dari jumlah penduduk Zaire berumur di bawah 20 tahun, dan setengah dari penduduk Brazil berada pada umur di bawah 19 tahun.

Di Indonesia dalam pembangunan SDM, masalah dan tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih tingginya kenaikan jumlah penduduk secara absolut. Meskipun telah terjadi penurunan fertilitas yang cukup bermakna, namun secara absolut penambahan penduduk Indonesia meningkat sekitar 3 sampai 4 juta jiwa per tahun. Hal ini disebabkan bertambahnya pasangan usia subur yang dihasilkan dari ledakan kelahiran atau "*demographic momentum*" yang terjadi pada tahun 1970-an. Apabila penanganan masalah kependudukan tersebut tidak ditangani dengan baik, maka dapat berakibat pada semakin beratnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

2. Kualitas Penduduk

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas penduduk yang dimiliki. Salah satu kualitas tersebut di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjukkan perbedaan status negara-negara di dunia.

Pembangunan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai subjek (*human capital*), objek (*human resources*), dan penikmat pembangunan, yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak pembuahan sampai dengan akhir hidupnya. Manusia, untuk selanjutnya disebut sebagai penduduk, yang terdiri dari jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), kelompok umur (anak, remaja, pemuda, usia produktif, usia reproduktif, dan usia lanjut), serta kelompok miskin dan rentan. Dimensi pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk.

Kualitas penduduk tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk, yaitu tingkat kesehatan dan gizi, pendidikan, produktivitas dan akhlak mulia, menuju kepada pencapaian kesejahteraan sosial yang baik. Kuantitas penduduk dikaitkan dengan jumlah dan laju pertumbuhannya. Sedangkan mobilitas penduduk merupakan refleksi dari perpindahan dan persebaran penduduk yang merespons pembangunan ekonomi wilayah. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak saja penting sebagai sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi, tetapi juga sumber terbentuknya iklim inovasi dan menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumber daya manusia. Tingkat kemajuan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai oleh kontribusinya terhadap khasanah perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat universal, dan pengembangan pada aspek yang bersifat terapan.

Sejalan dengan itu, hampir setiap negara berlomba-lomba untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusianya, yaitu dengan mengeluarkan produk-produk dalam negeri yang bisa menunjukkan bahwa negara tersebut mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Akan tetapi, secanggih apa pun teknologi yang digunakan, jika manusianya tidak berkualitas maka pembangunan tidak akan berkembang dengan baik karena kualitas manusia sebagai salah satu modal pembangunan suatu negara.

Selain kualitas penduduk sangat diperlukan untuk pembangunan, kualitas penduduk juga sangat diperlukan untuk menandai bahwa negara tersebut dapat bersaing dengan negara-negara yang lain. Jika kualitas penduduk suatu negara rendah, maka negara tersebut akan tertinggal dengan negara yang sudah maju. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi harapan dalam membangun

bangsa ke arah kemajuan yang signifikan. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat tantangan kehidupan di masa depan begitu kompleks, sehingga upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas harus menjadi kenyataan yang tidak hanya dalam wacana belaka. Maka dalam menghadapi perubahan sosial sebagai dampak globalisasi, agenda utama pendidikan tiada lain adalah pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, baik ditinjau dari nilai ekonomis maupun nilai insani. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka upaya untuk mengintegrasikan kualitas pelajar yang berwawasan intelektual dalam rangka kompetisi secara sehat dengan bangsa lain, dapat menjadi langkah yang realistis untuk pembangunan lebih lanjut.

Jumlah penduduk Indonesia yang melebihi 245 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Dengan potensi sumber daya manusia yang begitu besar, kita tidak perlu cemas akan kekurangan tenaga untuk melakukan pembangunan bangsa serta mengelola SDA yang ada. Pengelolaan SDA dalam rangka melaksanakan pembangunan menuju masyarakat sejahtera memerlukan sumber daya manusia (tenaga) dalam jumlah yang tidak sedikit. Di balik berlimpahnya sumber daya manusia tersebut, kita tidak dapat berpuas diri begitu saja, karena sebagian besar sumber daya manusia yang ada masih dalam kategori berkualitas rendah.

Kualitas SDM Indonesia yang antara lain diukur dengan nilai HDI sebagaimana, masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-112 dari 175 negara. Begitu pula jika dipilah menurut jenis kelamin, dengan menggunakan nilai Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index*, GDI) Indonesia

hanya menempati urutan ke-91 dari 144 negara. Hal ini berarti ketidaksetaraan gender di berbagai bidang pembangunan masih merupakan masalah yang dihadapi di masa mendatang. Tingkat kemajuan iptek nasional juga masih sangat rendah. Pada tahun 2001 Indeks Pencapaian Teknologi (IPT) Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 72 negara. Untuk mengatasi permasalahan di atas, peran penting peningkatan bidang pendidikan merupakan solusi mendesak yang harus direalisasikan.

Di bidang pendidikan, masalah utama yang dihadapi adalah masih rendahnya partisipasi pendidikan terutama untuk jenjang pendidikan menengah pertama sampai dengan pendidikan tinggi dengan kesenjangan yang masih cukup tinggi antarkelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah di Indonesia. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi. Hal tersebut diperburuk belum terlaksananya sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan secara baik.

Kualitas pendidikan juga masih rendah sehingga belum mampu memenuhi tumbuh kembang peserta didik dan belum mampu menjawab berbagai kebutuhan pembangunan, seperti dalam penyediaan tenaga kerja yang berkualitas. Kualitas proses belajar mengajar masih belum baik yang antara lain disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidikan baik jumlah maupun kualitasnya dan belum memadainya ketersediaan fasilitas belajar.

Selain itu, manajemen pendidikan masih dinilai belum efektif dan efisien yang antara lain ditunjukkan oleh: (1) wilayah geografis

yang luas yang terdiri dari puluhan ribu pulau sehingga sulit memajemen kebijakan pendidikan secara optimal, (2) belum tersedianya informasi pendidikan yang memungkinkan masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih satuan pendidikan yang bermutu, (3) Indonesia belum mampu meningkatkan daya saing institusi pendidikan dalam menghadapi era global pendidikan, (4) belum baiknya sistem pengawasan pendidikan termasuk dalam menjamin kualitas pendidikan, serta (5) belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk partisipasinya dalam dewan pendidikan dan komite sekolah.

3. Persebaran Penduduk

Pada masyarakat modern, persebaran penduduk tidak mutlak dipengaruhi oleh migrasi internasional, tetapi secara geografis cenderung mengarah kekotaan yang bersifat intern pada suatu negara. Di Amerika Serikat, perpindahan penduduk daerah ke kota-kota merupakan faktor dominan dalam mengubah proporsi jumlah penduduk daripada pertambahan penduduk secara alamiah.

Dalam dua dasawarsa terakhir, Amerika Serikat mempunyai disparitas persebaran yang besar antara penduduk kota dan desa. Kepadatan penduduk di kota terus mengalami peningkatan, sehingga separuh dari 3.000 daerah pertanian kehilangan penduduknya yang terus menerus membanjiri kota-kota yang padat. Kecenderungan serupa juga banyak terjadi di negara berkembang. Satu atau dua kotanya menjadi kota utama (*primate city*) yang mengendalikan hampir seluruh aktivitas ekonomi negara. Pergolakan politik antara perbedaan tingkat pembangunan kota dan desa menimbulkan dampak kecemburuan sosial massal yang dapat memicu konflik. Belum lagi mengenai kesempatan kerja di kota yang jauh lebih heterogen dengan sarana dan sarana lengkap

dibanding dengan kesempatan kerja di desa yang hanya berkutat pada sektor pertanian.

Bagi negara Indonesia, aspek kependudukan yang paling erat hubungannya dengan masalah integrasi nasional adalah aspek penyebaran penduduk dalam wilayah sebuah negara. Jumlah penduduk Indonesia yang besar tidak diimbangi dengan penyebaran penduduk yang merata. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini pada gilirannya akan memberikan dampak terhadap pola maupun arah dari perubahan sosial, ekonomi maupun politik.

Dampak dari penyebaran penduduk terhadap bidang sosial misalnya, terpusatnya penduduk di kota menyebabkan semakin meningkatnya angka pengangguran, kondisi demikian menciptakan ketegangan sosial yang ditandai dengan semakin banyaknya tindak kriminalitas di daerah perkotaan. Dampak dalam bidang ekonomi yaitu sebagian besar sumber-sumber ekonomi nasional lebih banyak ke daerah perkotaan daripada ke pedesaan, karena potensi tenaga kerja lebih banyak berada di daerah perkotaan sehingga investor cenderung mengembangkan usahanya di daerah perkotaan. Hal ini menyebabkan lambatnya perkembangan ekonomi di daerah pedesaan.

Pengaruh penyebaran penduduk yang tidak merata dalam suatu wilayah terhadap bidang politik adalah penegakan kontrol pemerintah terhadap daerah sangat terbatas, karena komunikasi dan transportasi (fasilitas) yang ada di daerah masih sangat kurang. Minimnya fasilitas di daerah disebabkan pembangunan dan kontrol pemerintah lebih banyak terdapat di wilayah yang padat penduduknya (Pulau Jawa).

Timbulnya berbagai permasalahan di daerah perkotaan

seperti meningkatnya tindak kriminalitas, menjamurnya permukiman kumuh, tidak memadainya fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah (air bersih, listrik, transportasi dan lain lain) selalu dianggap terjadi karena meningkatnya mobilitas penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan. Ada dua motif pokok migrasi, yang pertama migrasi bermotif ekonomi dan yang kedua migrasi bermotif politik. Migrasi ekonomi berciri khas masyarakat modern dan masyarakat yang berkembang menuju modern. Pada umumnya migrasi ini mencakup perpindahan secara sukarela dan bersifat perseorangan dari penduduk usia produktif untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Sedangkan migrasi politik bersifat kelompok dan para migran politik memilih untuk pindah atau dipaksa untuk pindah karena identitasnya.

Namun demikian, melihat mobilitas penduduk hanya dari sudut pandang negatif dan menyimpulkan bahwa mobilitas penduduk dari desa ke kota sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pembangunan, merupakan anggapan yang kurang tepat. Mobilitas penduduk desa-kota memainkan peranan yang penting dalam pembangunan. Banyaknya migran yang mencari pekerjaan di kota tidak hanya meningkatkan suplai tenaga kerja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru akibat perluasan industri dan aktivitas ekonomi lainnya. Untuk daerah pedesaan, banyaknya penduduk yang meninggalkan desanya bisa berpengaruh terhadap berkurangnya rasio tenaga kerja dan luas tanah yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi berbagai perubahan teknik-teknik produksi di pedesaan (dari cara tradisional ke modern). Sehingga akan merangsang membesarnya permintaan akan hasil-hasil dari daerah pedesaan.

Dampak politik dari migrasi penduduk yang bersifat spontan maupun yang diprogramkan oleh pemerintah khususnya di daerah seperti Aceh, Maluku dan Irian Jaya perlu mendapatkan perhatian serius. Kesenjangan sosial maupun ekonomi penduduk asli dengan penduduk pendatang merupakan sekat yang bisa melahirkan masalah-masalah antarsuku atau golongan yang bersifat politik. Dalam struktur pemerintahan yang bersifat politik masih sangat tersentralisasi seperti sekarang, sehingga menimbulkan konflik antara pemerintahan pusat dan daerah.

B. Pengaruh SDM yang Rendah Bagi Negara

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang banyak terdapat dan terjadi di negara-negara tertinggal maupun negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih dikarenakan oleh sulitnya pemenuhan hak-hak dasar kehidupan manusia antara lain makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pendapatan per kapita masyarakat. Kesenjangan pembangunan antara kota-kota besar di pulau Jawa dan kota-kota di daerah di luar pulau Jawa, dan juga antara kota dengan pedesaan dan daerah terpencil lainnya yang tentunya belum terjamah pembangunan, dan juga potensi sumber daya alam yang berbeda.

2. Pengangguran

Pengangguran di Indonesia juga merupakan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Kebanyakan anak Indonesia rata-rata menamatkan pendidikan sekolah dasar. Namun, pada dewasa ini pemerintah menggalakkan program wajib belajar 12 tahun yang pada kenyataannya belum memberikan sumbang asih yang positif.

Di bidang tenaga kerja, masalah utama yang terkait dengan kualitas angkatan kerja adalah masih didominasinya angkatan kerja oleh lulusan SD ke bawah. Pada saat yang sama, meningkatnya jumlah angkatan kerja lulusan SLTA dan perguruan tinggi tidak diimbangi oleh meningkatnya ketersediaan kesempatan kerja yang sesuai. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah penganggur terdidik.

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang. Terkait fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana, seyogianya perguruan tinggi ikut bertanggung jawab. Fenomena pengangguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi, karena ketidakmampuannya dalam menciptakan iklim pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa. Selanjutnya, diperlukan peningkatan kualitas dan relevansi semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, untuk dapat memberikan kecakapan bagi peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diperlukan termasuk kecakapan sosial, kecakapan keagamaan, dan kecakapan vokasional, yang disesuaikan dengan tumbuh kembang dan kebutuhan peserta didik.

Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumber daya alam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi.

BAB III

PERANAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEMAJUAN NEGARA

A. Peran Penting Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (SDA) merupakan keadaan lingkungan alam (*natural enviroment*) baik berupa benda mati maupun benda hidup yang mempunyai nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup.

Manusia dapat hidup dan menjalani kehidupan di dunia ini sangat bergantung keberadaan sumber daya alam. Terlebih lagi sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Keberadaan sumber daya ini sudah dapat disejajarkan dengan kebutuhan primer manusia yang lain, contohnya seperti sumber daya air, sumber daya energi, sumber daya hutan, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika dalam masyarakat terjadi kelangkaan sumber daya alam ini, maka akan menyebabkan manusia mengalami kesulitan hidup. Hal itu akan dapat memaksa manusia untuk berpindah tempat atau melalang buana ke tempat lain demi memperoleh sumber daya ini.

SDA menjadi salah satu modal dasar pembangunan bagi negara. Sebagai modal dasar, sumber daya alam harus dimanfaatkan sepenuhnya tetapi dengan cara yang tidak merusak. Oleh karena itu, cara-cara yang dipergunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan di masa datang. Dalam teori psikologis, disebutkan bahwa kelimpahan sumber daya alam akan muncul sebagai sumber kekuasaan, dari sisi alat perkembangan sosial dan politik. Akan tetapi kekayaan ini menyebabkan energi manusia cenderung melemah.

Menurut Montesquie “Kesuburan tanah dan kelimpahan kekayaan mendorong perbudakan, sedangkan kekurangan sumber alam mengembangkan keinginan manusia untuk menjadi independen terhadap orang-orang asing. Suatu negeri yang subur takut dirampas atau dijajah, takut terhadap angkatan bersenjata asing. Di pihak lain, negeri-negeri miskin, kebebasan adalah satu-satunya harta yang wajib dipertahankan. Selain itu, tanah yang tandus membuat manusia rajin, kerja keras, perkasa dan cocok untuk berperang. Sebaliknya negeri-negeri yang subur memberikan jiwa yang lamban dan jiwa yang ingin memelihara hidup sendiri”

Sebaliknya, teori-teori modern menempatkan korelasi yang dekat antara masyarakat demokrasi dan kelimpahan material. Kemiskinan dilihat sebagai faktor pembesar antagonisme politik, membuat pemerintahan bebas semakin sulit. Di sisi lain, kemakmuran umum dilihat sebagai kecenderungan untuk mengurangi konflik-konflik yang cenderung menjadi sebab dari kebebasan. Namun, kompetisi internasional turut campur tangan dengan persaingan di dalam. Kemakmuran dari beberapa hal bisa menyebabkan antagonisme daripada menguranginya. Perlombaan untuk mendapatkan bahan mentah merupakan faktor yang besar.

Dengan perkembangan internasional dan industrialisasi, masalah bahan mentah menjadi penting. Kompetisi dan perseteruan juga timbul di kalangan bangsa-bangsa industri yang besar seperti antara Amerika dengan negara-negara pemilik bahan mentah. Dengan demikian, eksistensi bahan mentah dalam wilayah suatu negara menjadi faktor penting dalam politiknya.

Perlombaan untuk mendapatkan bahan mentah ini menjelaskan banyak peran, aliansi-aliansi dan intrik internasional. Kadang-kadang politik dalam negeri suatu negara juga bisa mencerminkan kebijaksanaan luar negerinya. Selain itu, untuk memperoleh bahan mentah juga memengaruhi struktur politik negara-negara atau berlaku sebagai titik pusat bagi persaingan nasional.

Dalam abad ke-18 misalnya, setelah terjadi Revolusi Industri di Inggris, negara ini berubah menjadi "industri raksasa" yang mengolah bahan mentah dari penjuru dunia menjadi barang material yang dibutuhkan manusia. Amerika Serikat mengonsumsi lebih dari 50 persen bahan mentah dunia dan akses kepada bahan mentah adalah fundamental untuk mendukung kegiatan industrinya. Kompetisi dan perseteruan juga timbul di kalangan bangsa-bangsa industri yang besar seperti antara Amerika, Jepang, Eropa yang membutuhkan bahan mentah dan pasar yang besar. Dengan demikian, eksistensi bahan mentah dalam wilayah suatu negara merupakan faktor penting di dalam politiknya, dan secara tidak langsung di dalam politik negara-negara lain, terutama negara-negara industri sendiri.

B. Hubungan Sumber daya Alam dan Sumber daya Manusia

Hubungan antara SDA dengan ukuran dan pertumbuhan sumber daya manusia (penduduk) telah menjadi perdebatan pokok

yang intensif. Kebanyakan perdebatan berkisar pada kelangkaan SDA dan apakah kelangkaan SDA itu menipis atau digunakan secara boros, akibat pesatnya perubahan penduduk. Terdapat empat pengertian yang berkaitan erat dengan analisis masalah ini.

Pertama, untuk SDA yang diperdagangkan dalam pasar yang berfungsi dengan baik, harga SDA ini merupakan penilaian tunggal yang baik atas kelangkaannya. Kelangkaan tidak boleh diukur begitu saja dengan jumlah SDA yang masih ada atau harus ditemukan, tapi lebih pada pertimbangan permintaan atau nilai guna bagi pengguna akhir. SDA yang sedikit persediannya dan tidak ada permintaan berarti tidak langka. SDA yang besar persediannya dan permintaannya besar bisa menjadi langka.

Kedua, dengan ukuran harga, dan didasarkan pada bukti historis dan harga riil yang relatif konstan atau turun bersama waktu. Tidak berarti SDA yang paling tidak bisa diperbarui menjadi paling langka, atau semakin menjadi langka. Ekspansi suplai dan/atau berkurangnya permintaan lebih dari cukup untuk mempertahankan keseimbangan jangka penggunaan SDA. Perubahan-perubahan dalam permintaan dan suplai SDA sangat dipengaruhi oleh penemuan-penemuan baru dan perubahan-perubahan dalam teknologi yang menyebabkan berkurangnya SDA yang relatif langka.

Ketiga, secara historis penyebab utama dari besarnya permintaan akan SDA bukan pesatnya pertumbuhan penduduk, tetapi lebih karena naiknya pendapatan. Negara-negara makmur, di mana pertumbuhan populasinya lambat, mengonsumsi SDA dalam jumlah yang sangat besar. Di masa mendatang, ketika negara-negara dunia ketiga menjadi lebih makmur dan karena besarnya pertumbuhan penduduk yang pesat dalam dekade mendatang, tekanan ke depan pada harga SDA menjadi jelas lebih kuat. Kelangkaan SDA ini akan semakin sulit dihindari.

Keempat, penggunaan berlebihan SDA akibat tekanan penduduk atau pendapatan sangat mungkin terjadi di mana harga pasar tidak cukup mencerminkan kelangkaan yang sebenarnya di masa kini maupun di masa mendatang, dan pemerintah tidak mampu atau tidak mau menyediakan regulasi yang tepat untuk menyeimbangkannya. Hutan, perikanan, air bersih dan bahkan tanah adat merupakan daerah-daerah di mana pasar dan harga tidak bisa mengalokasikan SDA dengan baik. Ini karena hak properti dalam keadaan tertentu sedikit ditegakkan, dipantau dan diterapkan. Bagaimanapun, seseorang tidak bisa menjual sesuatu yang tidak dipunyai untuk menentukan harga. Jadi, harga tidak tersedia untuk menandai kelangkaan dalam kasus seperti itu. Lebih dari itu, permintaan atau nilai yang sebenarnya dari SDA tertentu memang tidak menentu. Contoh penting adalah nilai yang ditetapkan orang atau masyarakat pada tanaman atau spesies binatang dan keanekaragaman biologi. Meski tekanan penduduk bukan penyebab utama, tapi penggunaan berlebihan SDA di mana pasar dan kebijakan pemerintah tidak memadai, tekanan penduduk benar-benar merupakan penyebab yang memperburuk, dan kadang-kadang penyebab yang penting.

Sangat sulit diketahui secara operasional tentang kuantitas penduduk yang optimal dalam hubungannya dengan pemanfaatan SDA, meskipun ada banyak diskusi mengenai tingkat populasi yang berkelanjutan. Perkiraan-perkiraan tentang daya tampung Bumi untuk berbagai SDA penting (terutama tanah dan air untuk produksi makanan) terentang antara 5 miliar sampai 30 miliar penduduk. Perkiraan mengenai kapasitas sistem biologi dan ekologis untuk meregenerasi dalam jangka waktu panjang, sama tidak jelasnya. Menurut prediksi yang ada sekarang, populasi penduduk dunia akan mencapai 9 sampai 12 miliar pada akhir

abad 21. Apakah ukuran penduduk ini berkelanjutan? Apakah cadangan SDA terpelihara secara memadai sepanjang masa? Tidak dapat diketahui dengan derajat kepastian apapun.

SDA terutama energi, tanah, hutan, pertanian dan perikanan telah menarik perhatian para ekonom semenjak Adam Smith, tapi baru-baru ini dikembangkan teori-teori khusus mengenai perbedaan SDA ini, yakni:

1. Dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan alam dan pengaruh lingkungan alam terhadap kegiatan manusia, misalnya pencemaran air dan udara, tempat pembuangan sampah dan pengawetan biodiversitas. Perbedaan ini kemudian menjadi kabur karena keseimbangan setiap ton material yang berasal dari lingkungan alam bisa didaur melalui kegiatan ekonomi yang akhirnya kembali sebagai satu ton material ke lingkungan alam itu. Misalnya, batu bara yang berada di bawah tanah masih merupakan bagian dari sistem ekonomi, tapi tidak setelah dibakar. Kemudian batu bara kembali ke lingkungan alam sebagai emis-is emisi atmosferis karbondioksida, dan sebagai abu serta kotoran. Bisa dikatakan, lingkungan alam mengandung sedikit limbah pembuangan, dan karena itu disebut sumber daya alam. Populasi penduduk, tumbuhan dan binatang adalah bagian dari lingkungan alam.
2. Perbedaan antara SDA yang bisa diperbarui dan yang bisa habis dipakai. SDA yang bisa diperbarui, seperti hutan, ikan dan udara atau air bersih, dicirikan dengan cadangan SDA yang mampu memperbarui sendiri. Tingkat pembaruan itu tergantung pada besarnya cadangan, karakteristik lingkungan dan intervensi. Sedangkan SDA habis dipakai adalah SDA yang tidak bisa diperbarui atau habis sama sekali seperti bijih besi, minyak bumi, logam mulia atau lahan-lahan liar yang belum diolah tangan-tangan manusia, dicirikan dengan adanya sumber

daya yang tidak dapat diperbarui sendiri. Baik SDA yang dapat dan tidak dapat diperbarui, cadangannya membatasi tingkat maksimal penggunaannya. Salah satu masalah terpenting adalah kapan seharusnya SDA itu dimanfaatkan, sebab pemanfaatan ini berarti mengurangi ketersediaan cadangan untuk masa selanjutnya. Pemanfaatan ini menimbulkan biaya kesempatan (*oppurtunity cost*), yang mencerminkan nilai ekonomi dari pengurangan ketersediaan cadangan di masa depan. Masalah itu tampak jelas terutama pada SDA yang habis dipakai, yang hanya bisa dipungut sekali saja.

3. Pembedaan SDA yang dikelola sebagai milik bersama, bisa diambil oleh semua orang, atau sebagai milik pribadi yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Para pengguna SDA milik bersama biasanya mengabaikan biaya kesempatan, sehingga cenderung menggunakannya secara berlebihan. Sebaliknya, hak milik perusahaan cenderung membuat para pengguna potensial memperhitungkan biaya-biaya kesempatan dan karena itu berusaha menggunakan SDA itu dengan sebaik-baiknya.

Pengelolaan SDA secara inheren bersifat interdisipliner. Kajian tentang SDA memerlukan informasi dari geografi, fisika, teknik, kimia, biologi, politik, hukum dan ekonomi. Teori-teori mutakhir mencerminkan realitas interdisipliner ini, misalnya model-model dinamika penduduk (yang diambil dari biologi dan ekologi) yang saling memengaruhi dengan model-model ekonomi untuk menganalisis SDA yang bisa diperbarui.

C. Potensi Sumber Daya Alam Negara Indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beruntung di antara bangsa-bangsa lain di dunia ini. Hal ini terlihat dari karunia Sang Maha Pencipta dalam bentuk potensi sumber daya yang berlimpah. Kekayaan sumber daya tersebut meliputi sumber daya

alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Sumber daya alam di Indonesia adalah segala potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.

Proses terbentuknya sumber daya alam di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Secara astronomis, Indonesia terletak di daerah tropis dengan curah hujan tinggi menyebabkan aneka ragam jenis tumbuhan dapat tumbuh subur. Oleh karena itu, Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan.
2. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan jalur pergerakan lempeng tektonik dan pegunungan muda menyebabkan terbentuknya berbagai macam sumber daya mineral yang potensial untuk dimanfaatkan.
3. Wilayah lautan di Indonesia dengan kedalaman sebagian besar zona neritik (kurang dari 200 m), di mana sinar matahari mampu menyentuh dasar laut, membuat wilayah lautnya banyak mengandung berbagai macam sumber daya nabati, hewani, dan mineral antara lain ikan laut, rumput laut, mutiara serta tambang minyak bumi.

Persebaran sumber daya alam hayati terdiri dari sumber daya alam hewani dan nabati yang tersebar di darat dan laut selain hutan yang luas, Indonesia memiliki perkebunan dan pertanian tersebar hampir di seluruh Indonesia. Jumlah dan kualitas sumber daya alam sangat banyak dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia selain itu kualitasnya pun sangat bagus. Hasilnya dapat diekspor di berbagai negara sehingga dapat memenuhi devisa negara.

Jenis sumber daya alam yang diekspor seperti minyak bumi, gas alam dan bahan tambang lainnya serta hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata selain itu hasil industri juga dapat diekspor ke luar negeri.

D. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Tenaga ahli memanfaatkan SDA dengan teknologi yang canggih. Tenaga ahli yang bermutu akan menghasilkan bibit yang bermutu dan menghasilkan tanaman yang berkualitas dan menghasilkan industri yang berkualitas. Teknologi yang digunakan beserta alat-alatnya yang berkembang dengan pesat dapat mempercepat dan mempermudah produktivitas alat-alat yang digunakan. Tenaga ahli Indonesia masih kurang canggih seperti di negara-negara maju, tetapi tenaga ahli Indonesia masih bisa menghasilkan sumber daya alam yang memuaskan.

Keterbatasan kemampuan negara baik dari segi permodalan, teknologi maupun sumber daya manusia menyebabkan pengelolaan sumber daya alam membutuhkan bantuan pihak asing. Pada umumnya pengelolaan sumber daya mineral dan geologi dilaksanakan oleh perusahaan asing dengan sistem kontrak bagi hasil.

Dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang berada di tangan pemerintah selama ini, mengakibatkan daerah tidak mempunyai kesempatan untuk ikut secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Daerah hanya memperoleh bagian hasil dari pengelolaan sumber daya alam.

Kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Dengan kewenangan sebagai implementasi kebijakan Otonomi Daerah tersebut, daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya mineral dan geologi. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya mineral dan geologi diatur dengan pasal 10 UU 22/1999 yang menyatakan bahwa daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengelola sumber daya mineral dan geologi, maka daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya mineral dan geologi untuk kesejahteraan masyarakat. Kekayaan sumber daya mineral dan geologi akan dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat di daerah dalam rangka menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Indonesia kaya akan sumber daya alam, namun masih banyak rakyat yang hidup kekurangan karena minimnya keahlian untuk mengelola sumber daya alam tersebut, sehingga banyak sumber daya alam yang dikelola oleh pihak asing dan pendapatannya masuk ke kantong mereka. Misalnya, hasil pemanfaatan potensi sumber daya alam Kalimantan cukup berperan dalam perolehan devisa dan telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Kontribusi perekonomian regional Kalimantan terhadap PDB Nasional cukup signifikan, yakni sebanyak 8,13 persen atau kurang lebih Rp321,9 triliun. Namun sangat disayangkan, hasil eksploitasi dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah tersebut, belum banyak pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan. Oleh karena itu, peranan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat

diperlukan guna membangun negara Indonesia.

E. Pengaruh Sumber Daya Alam di Bidang Politik dan Kekuatan Negara

SDA dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat dan integritas bangsa. Hal ini berkaitan erat dengan pandangan luas-sempitnya negara, bentuk negara serta lokasi dari SDA vital yang banyak dicari. Hal ini berpengaruh terhadap strategi dan pertahanan (defensiasi). Komunitas suatu masyarakat kurang lebih terikat pada wilayah geografi dengan sosiokultur yang tumbuh secara alami tumbuh dalam jiwa mereka dengan rasa kepemilikan terhadap SDA yang ada di wilayahnya, sehingga secara progresif manusia cenderung untuk menguasai alam daripada dikuasai oleh alam.

Indonesia kaya akan tambang minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya yang menjadi andalan untuk menjadi komoditas ekspor dan penghasil devisa negara. Kelimpahan SDA akan muncul sebagai sumber kekuasaan dengan perkembangan sosial dan politik sebagai senjata andalannya.

Berdasarkan teori fisis determinisme, Indonesia dengan kondisi tanahnya yang subur dan kelimpahan SDA-nya menyebabkan mereka cenderung memiliki etos kerja yang rendah, sehingga SDM-nya kalah jauh dengan negara-negara yang terletak pada lintang tinggi. Dengan kondisi perubahan cuaca yang cukup ekstrem, menyebabkan mereka rajin, kerja keras, perkasa dan cocok untuk berperang. Dilihat dari perbandingan kualitas SDM-nya Indonesia telah kalah *start*.

Dengan perkembangan internasional dan industrialisasi, masalah bahan mentah menjadi penting, karena untuk mendapatkannya telah terjadi banyak konflik, aliansi-aliansi dan intrik internasional. Kadang politik dalam negeri pada suatu negara

juga mencerminkan kebijaksanaan luar negerinya yang didorong oleh keinginan untuk memiliki, bahkan menguasai bahan mentah.

Kekuatan negara atau *power* adalah suatu hak dinamis seperti halnya tubuh manusia, kadang sehat dan kadang sakit. *Power* sebuah negara adalah mekanisme yang sangat rumit dan saling tergantung antarberbagai unsur. *Political Power* mengandung pengertian suatu kekuatan, kemampuan dan ketangguhan dalam membina, mengembangkan dan mempertahankan kehidupan politik dari suatu negara.

Kekuatan politik ada dua jenis, yaitu kemampuan untuk membuat dan memaksakan keputusan di dalam batasan-batasan negara, dan kedua adalah kekuatan itu terdiri dari kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan menerapkannya dalam kehidupan negara.

Dilihat dari jenisnya, *power* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *power* individu dan *power* kelompok. Kedua *power* ini mempunyai faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu kepemilikan sumber daya, kemampuan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk tujuan-tujuan politik dalam sumber daya, kelompok memiliki peluang untuk tumbuh *power* yang lebih besar. Individu-individu yang di dalam kelompok tersebut secara akumulatif akan menggunakan kekuatannya untuk kekuatan kelompok.

Jika *power* kelompok adalah kumpulan *power* tiap individu, dan *power* negara adalah kumpulan dari *power* negara, maka membina kekuatan individu dan kekuatan kelompok pada dasarnya membina kekuatan negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin besar *power* individu di suatu negara, maka semakin besar pula *power* negara tersebut.

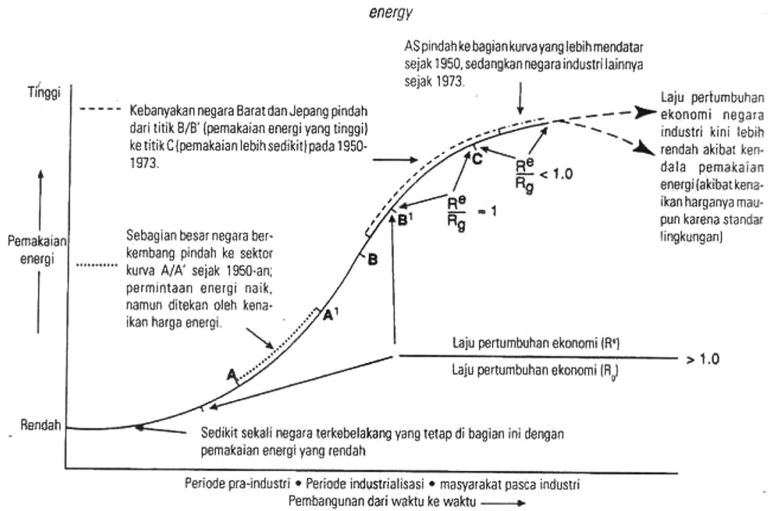
Untuk kehidupan politik di Indonesia, muncul istilah

ketahanan nasional yang mempunyai pengertian hampir sama dengan *power*, yaitu kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi segala macam tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari dalam dan luar. Ancaman yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Dari berbagai pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik garis merah bahwa sangat penting suatu negara memiliki kekuatan atau *power* dalam melangsungkan pemerintahannya, karena tanpa kekuatan yang cukup sangat riskan sekali akan keberlangsungan negeri tersebut. *Power* atau kekuatan negara mempunyai sembilan unsur, yaitu: geografi, sumber pendapatan alami untuk makanan dan bahan mentah, kemampuan industri, kekuatan militer, populasi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan. Dengan demikian, eksistensi bahan mentah dalam wilayah suatu bangsa, menjadi salah satu faktor penting di dalam politiknya, dan tidak langsung di dalam politik bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa industri.

F. Pengelolaan Sumber Daya Energi

Dalam tinjauan ekonomi, komoditas sumber daya energi termasuk sumber daya alam yang banyak dibutuhkan manusia, yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan dapat dikategorikan sebagai komoditas yang bersifat inelastis. Komoditas yang bersifat inelastis maknanya adalah, seberapa pun harga yang berlaku terhadap komoditas sumber daya energi ini, maka masyarakat akan tetap membelinya dalam jumlah yang relatif sama. Oleh karena itu, seberapa pun kenaikan harga yang akan terjadi pada

komoditas ini, jumlah permintaan terhadap komoditas ini akan relatif tetap.



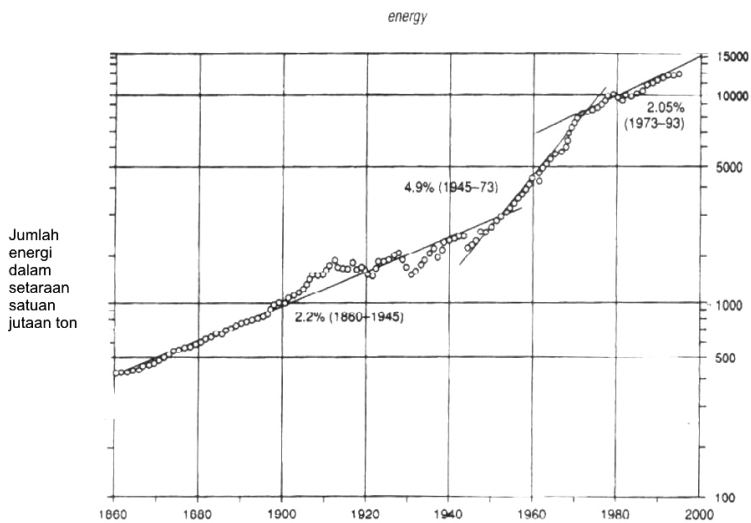
Gambar 3.1. Hubungan antara pemakaian energi dan pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu: tingkat kenaikan (penurunan) energi sebagai fungsi pembangunan ekonomi (sumber: EGI dalam Kuper, 2000: 292)

Jika telah dipahami bahwa sumber daya energi adalah termasuk dalam kategori komoditas yang bersifat inelastis, maka konsekuensinya adalah: jika komoditas ini mengalami kenaikan harga, maka pendapatan total (*total revenue*) yang akan didapatkan oleh para penjual komoditas ini (produsen) akan semakin tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi harga komoditas ini, maka akan semakin besar pendapatan total yang akan diperoleh para penjualnya.

Kelanggengan suatu masyarakat tergantung pada ketersediaan energi dalam kuantitas yang memadai dan dengan biaya yang terjangkau. Hubungan antara tingkat kemajuan ekonomi dan penggunaan energi dapat dilihat pada gambar 3.1.

Dari hubungan tersebut terlihat bahwa transformasi

perekonomian dunia sejak tahun 1840-an, dari agraris ke industri lalu pascaindustri, dibarengi dengan lonjakan pemakaian energi hingga 25 kali lipat (dibandingkan skalanya pada tahun 1886). Pada gambar 3.2. memperlihatkan laju kenaikan pemakaian energi terus menerus konsisten selama periode itu (sekitar 2 persen per tahun), kecuali periode 1950-1973 yang lajunya mencapai 5 persen.



Gambar 3.2. Kecenderungan pemakaian energi dunia 1860-1993, sumber EGI dalam Kuper, 2000: 293)

Meskipun sikap terhadap situasi energi dunia tergantung pada gagasan tentang ketersediaan dan peran energi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemakaian energi tetap tinggi (lihat gambar 3.2.) polanya pulih kembali sejak tahun 1973.

Antara tahun 19750-1973, pemakaian energi semua negara mencapai puncaknya (lihat lonjakan kurva yang semula mendatar pada gambar 3.1.). Ada beberapa alasan terjadinya lonjakan dalam penggunaan energi ini.

Pertama, pada periode ini pertumbuhan ekonomi mencapai puncak. Negara-negara tengah meniti tahapan akhir industrialisasinya (produk andalannya banyak menghabiskan energi seperti kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga berlistrik, dan petrokimia). Di perkotaan, jumlah kendaraan berlipat ganda, demikian pula gedung-gedung dengan alat penyejuk udara, sehingga pemakaian energi sangatlah besar.

Kedua, Uni Soviet dan Eropa Timur tengah giat-giatnya memacu industrialisasi yang tentunya memerlukan energi berskala raksasa. Kenaikan standar hidup penduduknya juga membuat konsumsi energi mereka bertambah. Hal lain yang harus diperhitungkan adalah kurang efisiennya manajemen energi di Blok Timur ini, sehingga energi yang dihabiskan lebih banyak daripada yang seharusnya. Bahkan, Uni Eropa sangat bergantung pada Rusia dalam hal sumber energi. Sebanyak 30% minyak dan 50% gas dipasok dari Rusia. Kemudian, 80% dari pasokan minyak Rusia melalui Ukraina, dengan presentasi pemakaian yang lebih tinggi dari Rusia yang hanya 40%. Tahun 2007, tepatnya pada bulan Mei pada saat Presiden Putin berkunjung ke Indonesia. Sebagian negara terbagi dalam OMV menandatangani sebuah persetujuan jangka panjang, yang semakin memperkuat Rusia akan Uni Eropa dalam infrastruktur energi yang pada tahun 2010 berencana akan mengimpor sekitar 10 juta barel minyak per hari yang nilainya setara dengan 5 juta barel gas. Pada tahun 2020 diestimasikan akan ditingkatkan hingga 12 juta barel per hari atau setara dengan 7 juta barel gas.

Ketiga, negara-negara dunia ketiga memulai industrialisasinya setelah lama tertidur (lihat kurvanya pada gambar 3.1). Ini dibarengi dengan lonjakan urbanisasi, sehingga jumlah penduduk pemakai energi berlipat ganda. Bila semula mayoritas penduduk

Dunia Ketiga adalah para petani dan penghuni pedesaan yang hemat energi, maka pada periode ini kebanyakan dari mereka bermigrasi menjadi kaum urban yang boros energi.

Dalam era industri seperti sekarang ini, kebutuhan terhadap SDA sangat besar, terutama sumber daya energi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan SDA ini akan memiliki pengaruh secara langsung terhadap biaya produksi secara agregat. Oleh karena itu, naik turunnya harga dari komoditas sumber daya energi ini akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap naik turunnya biaya produksi. Dapat disimpulkan bahwa apabila harga komoditas sumber daya energi mengalami kenaikan, maka secara ekonomi makro akan mengakibatkan terjadinya inflasi, yaitu harga-harga secara umum mengalami kenaikan, sekaligus di sisi lain akan menyebabkan pendapatan rakyat di negara mengalami penurunan, atau rakyat akan menjadi semakin miskin.

Pembahasan sumber daya energi tidak bisa hanya berhenti pada wilayah bagaimana cara memanfaatkannya secara efektif dan efisien semata. Mengingat posisi strategis dari sumber daya energi bagi keberlangsungan hidup umat manusia secara keseluruhan, maka pembahasan seharusnya lebih kita fokuskan kepada persoalan yang paling fundamental, yaitu menyangkut keberadaan dari sumber daya energi itu sendiri.

Penguasaan sumber daya energi apabila jatuh ke tangan manusia-manusia rakus yang mempunyai modal besar (terutama perusahaan-perusahaan asing), maka parade kenaikan harga komoditas sumber daya energi akan senantiasa menjadi tayangan yang akan selalu menghiasi berita-berita. Sedangkan dampak dari kenaikan harga komoditas ini pun sudah dapat kita pahami bersama, rakyat jelatalah yang akan menjadi korbannya. Jika hal ini dibiarkan berlangsung terus-menerus, maka Indonesia sebagai

produsen sumber daya energi dunia yang sangat besar, rakyatnya benar-benar akan mengalami nasib laksana “ayam mati di atas tumpukan beras”.

Permasalahan klasik yang menjadi alasan pemerintah mengundang investor asing dalam mengeskloitasi sumber daya energi adalah kurang modal nasional. Anggaran pemerintah tidak cukup untuk kegiatan eksploitasi sumber daya energi, karena banyak tersedot untuk pembiayaan lain, seperti: pendidikan, kesehatan, pertahanan, gaji PNS, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Karena kurangnya modal itu, konsekuensi logisnya, pengelolaan sumber daya energi ini dijual murah kepada perusahaan asing. Lebih dari 90% ladang sumber daya energi Indonesia menjadi serbuan pengelola asing.

BAB IV

INDUSTRIALISASI SEBAGAI KEKUATAN POLITIK NEGARA

A. Peran Strategis Industri

Industri secara umum adalah kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba. Misalnya "industri musik", "industri mobil", atau "industri ternak" dan lain sebagainya. Istilah industri juga digunakan bagi suatu bagian produksi ekonomi yang terfokus pada proses manufakturisasi tertentu yang harus memiliki permodalan yang besar sebelum bisa meraih keuntungan yang disebut industri besar. Sebagai contoh pada tahun 2004, bisnis jasa keuangan adalah industri terbesar di dunia dalam kategori pendapatan, namun pada akhir 2008 industri keuangan mengalami keterpurukan dan menjadi krisis global yang dimulai dari Negara Amerika Serikat.

Dalam perencanaan ekonomi dan wilayah urban, kawasan industri adalah penggunaan lahan dan aktivitas ekonomi secara intensif yang berhubungan dengan manufakturisasi dan produksi. Sektor industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian negara dan telah menempatkan industri manufaktur (nonmigas) sebagai penyokong sektor riil. Hal ini dapat dipahami mengingat berbagai kekayaan sumber daya alam memiliki keunggulan komparatif berupa produk primer, perlu

diolah menjadi produk industri untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Sesuai dengan tahapan perkembangan negara, sudah saatnya negara melakukan pergeseran andalan sektor ekonomi dari industri primer ke industri sekunder, khususnya industri manufaktur nonmigas. Membangun sektor industri pada era globalisasi tentu membutuhkan strategi yang tepat dan konsisten, sehingga dapat mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing baik di pasar domestik maupun di pasar global, yang pada gilirannya mampu mendorong tumbuhnya perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan akhirnya mengurangi kemiskinan.

Untuk memenuhi kebutuhan seiring meningkatnya permintaan akibat meningkatnya jumlah penduduk dan aspirasi untuk mengelola sendiri berbagai kekayaan alam yang ada, diperlukan program industrialisasi yang terarah, di samping kondisi sosial politik yang kondusif untuk menumbuhkan iklim investasi yang sehat. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan insentif yang menarik masyarakat dan dunia usaha untuk ikut meningkatkan kegiatan ekonomi melalui industrialisasi itu.

Dunia terus berubah, setiap negara juga perlu menyesuaikan diri. Demikian prinsip dasarnya, baik pada skala perseorangan, perusahaan maupun negara. Perekonomian Cina sejak 10 tahun terakhir tumbuh pesat dengan meyakinkan, tidak bisa dilepaskan oleh perubahan visi sejak kepemimpinan Deng Xiao Ping, Jiang Zemin, dan Hu Jin Tao. Lahir banyak sekali industri baru di negara itu yang didorong oleh perubahan keadaan. Setiap negara memang perlu mempersiapkan diri dan melengkapi diri. Mahatma Gandhi mengatakan "Kita harus mengubah diri kita sendiri sebelum kita berharap dapat melihat dunia yang berubah". Semakin banyak yang bisa dipahami tentang cara dunia berubah ke depan, semakin

besar pula kesempatan yang dimiliki untuk memastikan kejayaan masa depan negara.

Bagi negara Indonesia sendiri, industri mempunyai peran strategis, mengingat sejak tahap rehabilitasi ekonomi pada tahun 1967 sampai dengan akhir tahap pemulihan krisis ekonomi pada tahun 2004, rata-rata pertumbuhan industri melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi tahun 1967–1972, pertumbuhan rata-rata sektor industri tercatat 9,1 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6,8 persen. Pada masa bom minyak dunia tahun 1973–1981, industri tumbuh rata-rata 13% jauh di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,6 persen. Hal yang sama terjadi dalam periode penurunan harga minyak dunia tahun 1982–1996, pertumbuhan rata-rata industri masih tetap tinggi sebesar 10,3 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1 persen. Perubahan yang besar terjadi adalah krisis ekonomi dunia pada tahun 1997–2004, di mana industri tumbuh rata-rata 3 persen walau pertumbuhan rata-rata ekonomi juga hanya 1,9 persen. Selama 30 tahun sektor industri pengolahan membukukan rata-rata pertumbuhan 10,9 persen, sedangkan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata dengan 6,7 persen. Struktur ekonomi Indonesia agaknya sejalan dengan kecenderungan proses transformasi struktural yang terjadi di berbagai negara, di mana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian, sementara kontribusi sektor industri dan lainnya cenderung meningkat. Pada tahun 1967, sektor industri pengolahan hanya memberi sumbangan sebesar 7,5 persen terhadap keseluruhan perekonomian, di mana saat itu penyumbang nilai tambah tertinggi adalah sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 53,9 persen (Kina, 2008).

Dalam konteks pembangunan ekonomi di era globalisasi yang sangat dinamis ini, peranan pemerintah suatu negara menjadi

semakin terbatas. Hal ini terjadi bukan semata-mata disebabkan gencarnya proses liberalisasi dan kapitalisme, tetapi juga oleh kenyataan bahwa aspek kehidupan masyarakat modern menjadi semakin kompleks. Negara semakin kurang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Untuk mengelola dan memajukan ekonomi suatu masyarakat dalam lingkup negara, diperlukan hadirnya anggota masyarakat yang mampu melihat peluang yang bernilai ekonomis dan mengelolanya menjadi suatu kegiatan yang memberi keuntungan pada semua pihak. Tak berlebihan mengatakan bahwa masa depan kesejahteraan rakyat amat ditentukan oleh kiprah para pelaku industri suatu negara. Semua negara yang maju, makmur dan sejahtera memiliki banyak pengusahanya yang tangguh.

Perekonomian yang menganut sistem perekonomian terbuka, sangat dipengaruhi oleh perdagangan luar negeri yang mana dapat dilihat dari adanya kegiatan ekspor dan impor, ekspor merupakan penghasil devisa yang utama, apabila ekspor suatu negeri tinggi maka devisa banyak mengalir ke dalam negeri yang bersangkutan dengan demikian devisa yang tersedia dapat membayar impor yang dibutuhkan oleh suatu negara yang bersangkutan. Begitu juga halnya dengan negara Indonesia yang menganut sistem perekonomian terbuka, tidak terlepas dari perdagangan luar negeri dan juga pengaruh perekonomian dunia terhadap perekonomian Indonesia sangat besar seperti kalau laju pertumbuhan perekonomian dunia turun maka laju perekonomian Indonesia juga ikut turun, karena Indonesia mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap dunia luar.

Permasalahan yang akan dihadapi adalah variabel moneter memengaruhi cadangan devisa di Indonesia, di mana perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tingkat pendapatan menggambarkan perkembangan ekonomi suatu negara yang akan berpengaruh terhadap perekonomian cadangan devisa, perkembangan cadangan devisa dipengaruhi oleh kegiatan ekspor-impor, apabila ekspor tinggi akan tersedia cadangan devisa yang tinggi untuk membiayai impor dari luar negeri. Ketidakstabilan dalam perdagangan luar negeri akan memengaruhi cadangan devisa. Jadi masalah yang dihadapi adalah seberapa jauh pendapatan memengaruhi perkembangan cadangan devisa.
2. Tingkat bunga akan memengaruhi perekonomian nasional yang pada akhirnya akan memengaruhi cadangan devisa dan neraca pembayaran. Tingkat bunga akan memengaruhi permintaan dan penawaran barang dan jasa yang diperdagangkan antara negara, hal ini dapat dilihat dari aliran modal jangka pendek dan jangka panjang. Tingkat bunga yang lebih tinggi akan mendorong masuknya investasi, asing ke Indonesia, maka hal ini akan meningkatkan cadangan devisa. Jadi masalah yang dihadapi adalah seberapa jauh pengaruh tingkat bunga terhadap cadangan devisa sesuai dengan pendekatan teori yang digunakan.

B. Pengaruh Industri Terhadap Kemajuan Suatu Negara

1. Aspek Kekuatan Politik

Kekuatan politik merupakan salah satu faktor dalam geografi politik karena adanya kenyataan bahwa dinamika organisme negara di dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya maupun di dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa selalu dilandasi oleh kekuatan politik dan/atau ekonomi, dan/atau militer, atau keduanya, bahkan ketiga-tiganya secara paralel. Jepang saat ini memainkan geopolitiknya dilandasi oleh kekuatan ekonomi dan

sedikit faktor politik. Negara-negara besar Eropa melandasinya dengan politik dan ekonomi; sedangkan Amerika Serikat dengan ketiga-tiganya.

Untuk mewujudkan kepentingan nasional diperlukan kekuatan, yang pada gilirannya kekuatan memerlukan ruang gerak baik itu berupa ruang geografis maupun ruang politis. Misalnya, kepentingan itu berupa peningkatan kegiatan perekonomian, maka kepada para pelaku pasar harus diberikan ruang gerak yang cukup agar lebih kompetitif dan produktif terutama dalam peningkatan industrialisasi. Ruang gerak yang cukup, artinya demokratisasi, agar kegiatan industri bisa berkembang bebas di seluruh ruang negara. Keperluan adanya demokratisasi ekonomi (tidak sekadar liberalisasi saja) memerlukan dukungan demokratisasi politik agar tidak terjadi stagnasi. Dahulu, ketika Uni Soviet mengadakan demokratisasi politik secara luas yang tidak disertai dengan hal yang sama dibidang ekonomi industri, maka negara tersebut berantakan. Hal yang sama juga terjadi pada Rusia sekarang. Lain halnya dengan RRC, yang demokratisasi ekonomi industrinya jauh meninggalkan demokratisasi politik, sehingga ternyata mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki, antara lain peristiwa Tienanmen. Pelajaran yang dapat ditarik adalah bahwa perluasan ruang gerak harus dilaksanakan secara serentak pada semua bidang, agar mereka bisa saling menunjang. Melalui kemajuan industri china yang begitu pesat dengan memberi kemudahan dan kesempatan rakyat dan investor untuk mengembangkan berbagai macam industri, tak mengherankan jika Cina mempunyai kekuatan yang diperhitungkan dalam percaturan politik dunia di masa depan.

Untuk mendukung sektor industri, saat ini telah muncul dua gejala makro dipandang dari segi strategi, yaitu bahwa

dimensi industri dari kekuatan telah semakin mengemuka, dan adanya pergeseran gravitasi kepentingan ke arah maritim. Keduanya memiliki implikasi yang amat penting terhadap geografi politik, terutama bagi negara-negara maritim seperti Indonesia. Semakin mengemukanya dimensi ekonomi dari kekuatan menyebabkan antara lain: (a) faktor ekonomi telah dijadikan senjata untuk memaksakan kehendak, (b) munculnya Lembaga Keuangan Internasional sebagai kekuatan politik global; dan (c) berkembangnya regionalisme ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan posisi *power*.

Di lain pihak, dengan adanya perdagangan yang mendunia, di mana setiap pasar domestik terkait satu sama lain; maka soal akses menjadi penting, baik akses terhadap pasar maupun akses terhadap sumber-sumber input bagi industri. Sebagai konsekuensinya, jalur-jalur pelayaran internasional (*sea lines of communication/SLOC*) menjadi amat vital. Karena itulah kepentingan industri harus ditopang oleh penguasaan maritim, siapa menguasai SLOC akan dapat menentukan pasar atau sebaliknya gangguan keamanan terhadap SLOC akan memengaruhi keadaan pasar.

Tidak mengherankan apabila *freedom of navigation* dan terjaminnya keamanan sepanjang SLOC menyebabkan komoditi perdagangan mengalir secara lancar merupakan pusat gravitasi kepentingan saat ini. Dapatlah dimengerti bahwa dipandang dari sisi ini, Indonesia sangat rawan karena SLOC vital antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik semuanya melewati perairan Indonesia. Tiap perkembangan politik dan keamanan di Indonesia serta merta menjadi perhatian negara-negara besar hanya karena SLOC itu. Bahkan setiap pergantian pemerintah atau pemilihan presiden-presiden mengundang berbagai bentuk intervensi.

2. Aspek Sosial

Indonesia berstatus negara yang sedang berkembang, sehingga sebagian besar kegiatan industrinya berbasis pengolahan. Sesuai dengan teori kependudukan bahwa untuk negara yang sedang berkembang, penambahan jumlah penduduk yang cepat akan berdampak negatif pada kondisi lingkungan. Salah satu dampak negatif yang terjadi pada lingkungan ini adalah menurunnya kualitas air sungai di DKI Jakarta. Terbukti dengan tidak adanya lagi air yang termasuk dalam golongan A, sehingga butuh proses yang lama dan mahal untuk memperoleh air bersih yang siap digunakan untuk keperluan rumah tangga. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa kontribusi kegiatan industri pengolahan dalam penurunan kualitas air sungai di Provinsi DKI Jakarta sebesar 547. 310,05 ribu m³ air limbah per tahun, limbah cair domestik sekitar 70. 172,43 ribu m³ air limbah per tahun, dan limbah cair agro industri sekitar 1. 846,22 ribu m³ air limbah per tahun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi industri pengolahan terhadap penurunan kualitas air sangat besar.

Untuk peningkatan taraf hidup bangsa Indonesia, perlu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memajukan pembangunan. Salah satu unsur penting dalam pembangunan tersebut adalah pembangunan di bidang industri. Namun dalam kegiatan industri akan diikuti dengan dampak negatif limbah industri terhadap lingkungan hidup manusia. Limbah industri yang toksik akan memperburuk kondisi lingkungan dan akan meningkatkan penyakit pada manusia dan kerusakan pada komponen lingkungan lainnya.

Persaingan dalam dunia industri tentu perkara wajar. Sama naturalnya bila kemudian persaingan itu diboncengi oleh pertumbuhan industri bentuk lain. Kewajaran persaingan yang demikian harus disikapi secara dewasa melalui kreativitas

manajemen dalam bentuk antisipasi perkembangan, pembaruan rencana strategis, dan bahkan membanting kemudi usaha. Melalui sejumlah perspektif, perkembangan telekomunikasi seluler setidaknya terpetakan dari pengakuan atas kontribusi yang dihasilkannya, masyarakat dan pemerintah akan sepakat bahwa jasa layanan seluler telah menciptakan kemajuan resiprokal bagi kehidupan manusia. Pertama, infrastruktur dan layanan canggih kelas dunia terhadirkan dalam berbagai bentuk komunikasi dan transaksi informasi. Dalam hal ini, kebebasan dan pilihan untuk melakukan *interpersonal communication* menjadi termanjakan dan relasi komunikasi antarkorporat terfasilitasi, sekaligus membuka gerbang peluang untuk memajukan usaha dan menumbuhkembangkan sektor industri lainnya.



Gambar 4. 1 . Peranan Industri Dalam Menyerap Tenaga Kerja Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Negara
Sumber: Majalah *Kina* (*Karya Indonesia*), 2008

Kawasan industri adalah suatu zona/wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kegiatan industri. Di dalam zona perindustrian tersebut, terdapat industri yang sifatnya individual (yang berdiri sendiri) dan industri-industri yang sifatnya mengelompok dalam kawasan industri (*Industrial Estate*). Pemerintah sendiri telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong terciptanya kawasan industri di berbagai daerah untuk menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di kawasan perindustrian yang sudah ada. Salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan strategi pengembangan FTZ (*Free Trade Zone*) atau SEZ (*Special Economic Zone*). Kebijakan ini diberlakukan di suatu kawasan industri berupa pemberian fasilitas dan insentif fiskal yang amat menarik dan bersifat khusus, sehingga investor dapat tertarik untuk membuka pabriknya pada kawasan industri tersebut. Selain itu, usaha pemerintah yang lain untuk pengembangan kawasan industri adalah dengan pembangunan kelengkapan infrastruktur yang menunjang usaha-usaha produksi di kawasan industri ini. Setiap perkembangan yang terjadi mempunyai dampak atau pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya, maka dalam hal ini perkembangan kawasan mempunyai dampak terhadap perkembangan kota di sekitarnya.

3. Aspek Fisik

Penyebab utama terjadinya *climate change* dan *global warming*, berawal dari *Revolusi Industri*. Sebagaimana diketahui bersama, Revolusi Industri adalah perubahan teknologi, sosioekonomi, dan budaya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang terjadi dengan penggantian ekonomi yang berdasarkan pekerja menjadi yang didominasi oleh industri dan diproduksi mesin. Revolusi ini dimulai di Inggris dengan pengenalan mesin uap (dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar) dan

ditenagai oleh mesin (terutama dalam produksi tekstil).

Perkembangan peralatan mesin logam pada dua dekade pertama dari abad ke-19 membuat produk mesin produksi untuk digunakan di industri lainnya. Awal mula Revolusi Industri tidak jelas tetapi T. S. Ashton menulisnya kira-kira 1760–1830. Tidak ada titik pemisah dengan Revolusi Industri II pada sekitar tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut perkembangan mesin bakar dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik. Efek budayanya menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Amerika Utara, kemudian memengaruhi seluruh dunia. Efek dari perubahan ini di masyarakat sangat besar dan sering kali dibandingkan dengan revolusi kebudayaan pada masa Neolitikum ketika pertanian mulai dilakukan dan membentuk peradaban, menggantikan kehidupan nomaden. Istilah "Revolusi Industri" diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19.

Akibat dari percepatan dan kecepatan revolusi industri dalam kurun 3 abad menyebabkan pemanasan global (*global warming*), yang sekarang ini justru menjadi sebuah ancaman besar bagi negara-negara yang memanfaatkan Revolusi Industri tersebut. Bagi negara-negara yang pandai memanfaatkan Revolusi Industri, pembagian tugas/peran serta koordinasi antara pemerintah/negara, perusahaan swasta, serta masyarakat sangat jelas dan terukur yakni dalam ukuran-ukuran yang sifatnya materiil. Oleh karena itu, sebagai sebuah bangsa bila kita hendak memainkan peran sebagai dalam kancah *climate change* dan *global warming* ini, tidak boleh hanya memainkan hal-hal yang sifatnya materiil tapi juga memainkan peran kita dibidang non materiil, seperti peran manusia dalam hal kerukunan antarumat seagama dan

umat beragama, peran/kekuatan budaya, peran kekuatan sosial, peran kearifan lokal. Untuk mengetahui seberapa besar ukuran *climate change* dan *global warming*, Perserikatan Bangsa Bangsa melalui *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) menggunakan sarana pengelolaan yang disebut *Clean Development Mechanism/CDM*, dengan menggunakan metode pengelolaan CDM diharapkan dapat dihitung dan dianalisis secara matematis berapa perkiraan besarnya kerusakan alam yang mengakibatkan terjadinya perubahan cuaca dan pemanasan dunia, sarta bagaimana memperbaiki kerusakan alam tersebut.

Pengalaman beberapa negara berkembang khususnya negara-negara Latin yang cenderung suka memakai teknologi dalam industri yang ditransfer dari negara-negara maju (*core industry*) untuk pembangunan ekonominya sering kali berakibat pada terjadinya distorsi tujuan. Keadaan ini terjadi karena aspek-aspek dasar dari manfaat teknologi bukannya dinikmati oleh negara importir, tetapi memakmurkan negara pengekspor atau pembuat teknologi. Negara pengadopsi hanya menjadi konsumen dan ladang pembuangan produk teknologi karena tingginya tingkat ketergantungan akan suplai berbagai jenis produk teknologi dan industri dari negara maju. Alasan umum yang digunakan oleh negara-negara berkembang dalam mengadopsi teknologi (iptek) dan industri, searah dengan pemikiran Alfin Toffler maupun John Naisbitt yang menyebutkan bahwa untuk masuk dalam era globalisasi dalam ekonomi dan era informasi harus melewati gelombang agraris dan industrialis. Hal ini didukung oleh itikad pelaku pembangunan di negara-negara untuk beranjak dari satu tahapan pembangunan ke tahapan pembangunan berikutnya.

Tetapi akibat tindakan penyesuaian yang harus dipenuhi dalam

memenuhi permintaan akan berbagai jenis sumber daya (*resources*), agar proses industri dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia, sering kali harus mengorbankan ekologi dan lingkungan hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan berbagai industri yang dibangun dalam rangka peningkatan pendapatan (devisa) negara dan pemenuhan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia. Di samping itu, iptek dan teknologi dikembangkan dalam bidang antariksa dan militer, menyebabkan terjadinya eksploitasi energi, sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan untuk memenuhi berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Gejala memanasnya bola Bumi akibat efek rumah kaca (*greenhouse effect*) akibat menipisnya lapisan ozon, menciutnya luas hutan tropis, dan meluasnya gurun, serta melumernya lapisan es di Kutub Utara dan Selatan Bumi dapat dijadikan sebagai indikasi dari terjadinya pencemaran lingkungan karena penggunaan energi dan berbagai bahan kimia secara tidak seimbang. Selain itu, terdapat juga indikasi yang memperlihatkan tidak terkendalinya polusi dan pencemaran lingkungan akibat banyak zat buangan dari limbah industri dan rumah tangga yang memperlihatkan ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup. Akibat-akibat dari ketidakpedulian terhadap lingkungan ini tentu saja sangat merugikan manusia, yang dapat mendatangkan bencana bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, masalah pencemaran lingkungan baik oleh karena industri maupun konsumsi manusia, memerlukan suatu pola sikap yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mengelola dan menyiasati permasalahan lingkungan.

Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alamnya, strategis letak geografisnya, tinggi falsafah hidup bangsanya. Namun karena terjebak dalam pengaruh yang maju Revolusi

Industri, dalam 64 tahun merdeka yang terjadi justru proses pemiskinan yang tersistematis, proses penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang tersistematis, yang jelas dan pasti faktanya selama 69 tahun bangsa ini merdeka, secara tidak sadar bergeser dari falsafah bangsanya sendiri yakni Pancasila.

Apabila dilihat dari penyebab kerugian-kerugian lainnya yang muncul dari pengembangan kawasan industri sebenarnya hanya merupakan masalah ketidakkonsekuensi pemerintah dalam menetapkan dan memberlakukan undang-undang yang sudah ada. Aturan-aturan berupa penempatan lokasi kawasan industri yang jauh dari pusat kota dan penerapan Aturan AMDAL khususnya bagi kawasan industri sebenarnya sudah dapat mencegah dan menghilangkan kerugian-kerugian yang dapat dihasilkan dari kawasan industri, tetapi pada pelaksanaannya hal tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan. Lemahnya pengawasan pemerintah sering menjadi faktor utama di dalam terjadinya pencemaran-pencemaran yang terjadi. Pola pengaturan dan pengawasan (*command and control*) dalam manajemen lingkungan di Indonesia memang lemah dalam tiga hal. Pertama dalam mendeteksi terjadinya pelanggaran, kedua dalam memberikan respons yang cepat dan pasti atas pelanggaran dimaksud, dan ketiga dalam memberikan sanksi yang memadai agar terjadi efek jera.

C. Dampak Positif dan Negatif Industri

1. Dampak Positif Industri

- a. Memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
- b. Kemudahan dalam hal penyediaan sarana infrastruktur produksi.

Dengan menggabungkan beberapa industri dalam satu kawasan, maka pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang

menunjang dan diperlukan untuk proses industri dapat dipenuhi lebih mudah karena dikumpulkan dalam satu kawasan. Berbeda halnya apabila tidak terdapat kawasan industri, di mana lokasi industri yang satu dengan yang lain terletak berjauhan, maka sarana yang diperlukan untuk proses produksi cenderung susah dilakukan dan lebih mahal karena penggunaannya yang cenderung untuk keperluan sendiri. Namun dengan adanya kawasan industri yang merupakan aglomerasi/ pengumpulan dari beberapa industri, maka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana industri dapat lebih mudah, karena dikelompokkan pada satu kawasan, dan lebih murah karena dapat digunakan secara bersama-sama.

- c. Membuka lapangan pekerjaan baru.
Dengan bertumbuhnya Kawasan Perindustrian, maka akan membuka lapangan pekerjaan baru di pabrik yang dapat menyerap ribuan buruh/tenaga kerja. Dengan ditambahnya lapangan kerja tersebut, maka pendapatan masyarakat dapat menjadi meningkat yang disertai juga dengan peningkatan SDM-nya. Masyarakat akan memperoleh pekerjaan dan memperoleh pelatihan dan peningkatan
- d. Peningkatan pendapatan daerah melalui pajak daerah.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka juga akan meningkatkan pendapatan pajak daerahnya. Dengan bertambahnya pajak daerah, maka pemerintah dapat lebih mengembangkan pembangunan di sekitar kawasan.
- e. Kemudahan pengelolaan lingkungan
Pengelolaan limbah secara terintegrasi dengan mudah bisa dilakukan. Dengan dikelompokkannya industri dalam satu kawasan, maka AMDAL-nya berupa AMDAL kawasan, sehingga lebih mempermudah dalam pengecekan dan pengontrolan lingkungannya. Pengelolaan limbah secara terintegrasi (*integrated waste management*) dapat dengan

mudah dilakukan, sehingga pengontrolannya juga dapat lebih mudah. Dari aspek kependudukan, pengembangan kawasan industri juga memiliki nilai penting. Letak kawasan industri yang biasanya berada di pingiran kota atau terletak di luar kota dapat mengurangi arus urbanisasi. Masyarakat dari desa tidak lagi hanya menargetkan kota sebagai tempat mencari pekerjaan, tetapi cukup ke kawasan industri yang menyediakan lapangan kerja cukup banyak. Para warga kota yang bekerja di kawasan industri juga cenderung akan memilih tinggal di daerah kawasan industri apabila kawasan industri telah menyediakan fasilitas hunian yang memadai. Sehingga peluang arus transmigrasi dari kota ke daerah pinggiran kota menjadi semakin besar yang tentu saja dapat mengurangi kepadatan penduduk kota sebagai nilai positifnya.

2. Dampak Negatif Industri

- a. Pencemaran dan kerusakan lingkungan
Akibat polusi dan limbah yang dihasilkan dari pabrik-pabrik di kawasan industri, polusi dan kerusakan lingkungan terjadi. Polusi dari pabrik-pabrik di kawasan industri ini biasanya berupa polusi udara, air, kebisingan, ataupun tanah; yang umumnya yang menerima dampak negatif, dari polusi ini adalah warga yang tinggal di kawasan industri dan di sekitar kawasan industri.
- b. Berkurangnya peran manusia dalam proses produksi
Pengurangan peran ini ternyata berpengaruh besar pada banyak aspek dalam kehidupan manusia. Berpindahnya kerja dari penggunaan tenaga tangan kepada tenaga mesin telah menimbulkan meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan yang akibatnya memunculkan terminologi baru dalam kajian ilmiah sosiologi dengan menyebutnya sebagai masalah sosial.

BAB V

PENGARUH LETAK, LUAS DAN BENTUK TERHADAP PEMERINTAHAN NEGARA

A. Pengaruh Letak

Teritorium secara geografi politik perlu diperhatikan tiga atributnya (ciri-ciri fisiknya) yang meliputi letak, luas dan bentuk suatu negara.

1. Letak Astronomis

Letak astronomis di permukaan Bumi biasa dinyatakan dengan sekian derajat lintang dan sekian derajat bujur. Letak astronomis berkaitan erat dengan:

- a. **Corak iklim** negara yang bersangkutan. Letak astronomis negara akan memengaruhi intensitas penyinaran (isolasi) di negara tersebut, sehingga secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap iklim suatu negara. Berdasarkan klasifikasi ketinggian dari rotasi terhadap matahari, letak astronomis dibagi menjadi 3, lintang rendah, lintang sedang dan lintang tinggi. Akibat pengklasifikasian terhadap matahari itu, maka akan terjadi perbedaan jumlah musim di suatu negara berdasarkan letak lintangnya juga berbeda. Negara di lintang rendah beriklim tropis dengan dua musim, negara di lintang

sedang beriklim subtropis, dengan tiga hingga empat musim, dan negara di lintang tinggi beriklim kutub dengan satu musim.

- b. Memengaruhi kehidupan perekonomian penduduk atau negara.** Letak astronomis memengaruhi kehidupan perekonomian penduduk atau negara. Hal ini berhubungan dengan hasil pertanian apa yang dihasilkan pada letak astronomis tersebut, yang kemudian akan berlanjut komoditas pertanian apa yang akan diekspor dan komoditas pertanian apa yang akan diimpor. Misalnya, Indonesia yang beriklim tropis memiliki hutan yang lebat seperti hutan jati yang dapat diekspor, sedangkan Indonesia yang tidak dapat memproduksi gandum dan wol yang baik memilih mengimpor dari Australia yang beriklim subtropis.
- c. Hubungan dengan negara lain.** Letak astronomis sangat menentukan lokasi suatu negara. Pengaruh letak ini akan membawa dampak hubungan dengan negara lain yang dikatakan dengan kerja sama. Hubungan kerja sama ini terjalin karena adanya kebutuhan tiap negara yang berbeda-beda. Misalnya, dalam bidang ekonomi Indonesia penghasil rempah-rempah ataupun minyak bumi lalu diekspor ke negara lain yang tidak menghasilkan atau kekurangan sumber daya alam tersebut, dan begitu juga sebaliknya Indonesia mengimpor bahan-bahan pembuatan pesawat ataupun sumber daya alam lain yang tidak terdapat di Indonesia. Tidak hanya dalam bidang ekonomi saja kerja sama tersebut dilakukan, melainkan dalam berbagai bidang. Contoh dalam bidang lainnya adalah politik. Negara yang terletak dalam suatu kesatuan astronomis dengan mempunyai corak iklim yang hampir sama cenderung melakukan kerja sama dalam bidang politik sebagai contoh adalah Asia yang

berada di lintang tropis mendirikan organisasi Asia Tenggara yang dikenal dengan ASEAN. Negara-negara yang berada dalam lingkup astronomis yang sama tentunya akan sangat menguntungkan bila melakukan kerja sama karena banyak kesamaan. Dalam hal ini peran atau fungsi letak astronomis mirip dengan peran atau fungsi letak geografis suatu negara. Kesimpulannya, letak astronomis akan membawa pengaruh yang besar terhadap hubungan dengan negara lain.

- d. **Peradaban awal negara.** Peradaban awal dunia dimulai dari sungai Nil, yaitu Mesir yang terletak pada zona mediterania sehingga daerah bergurun-gurun yang menyebabkan mereka hidup dan bekerja lebih keras. Banyak peninggalan peradaban Mesir yang terkenal dan masih ada hingga saat ini. Sedangkan Indonesia yang beriklim tropis tidak memiliki peradaban awal negara yang kuat karena peninggalan peradaban banyak yang hilang kecuali candi akibat dari iklim Indonesia yang tropis dengan curah hujan sepanjang tahun.

2. Letak Dihubungkan dengan Bentuk Daratan-Lautan

a. Lokasi Maritim

Pengaruh lautan terhadap budaya serta struktur politik suatu bangsa dapat bermacam-macam, tergantung dari seluk beluk dan bentuk pantai lautan yang bersangkutan.

Lokasi maritim dibagi menjadi 4 ,yaitu:

- Negara berbatasan dengan satu laut, contohnya Brazil
- Negara berbatasan dengan 2 laut, contohnya Meksiko
- Negara berbatasan dengan 3 laut, contohnya Prancis
- Negara berbatasan dengan 4 laut (banyak laut), contohnya: Australia, Rusia, dan Indonesia

b. Lokasi Kontinental

Derajat kontinentalitas dari negara berlokasi kontinental, tergantung oleh faktor:

- Jumlah negara tetangganya langsung
- Ciri- ciri tapal batasnya
- Menarik tidaknya negeri yang bersangkutan

3. Letak Dihubungkan dengan Negara-negara Lain Meliputi:

- Letak ketetanggaan (*vicinal location*)
- Letak nisbi (*relative location*)
- Letak berdekatan (*adjacent location*)

Negara berdasarkan kuat cenderung menganggap para negara tetangga yang serba kecil sebagai anak, adik atau budaknya negara yang dulunya dianggap kecil, contohnya: Polandia.

4. Letak dalam Makna *Accesibility*

Accesibility atau asesibilitas artinya keterjangkauan (mudah-sukarnya dicapai). Sebaliknya ada negara yang lokasinya di pinggiran seperti negara Singapura dan Malaysia misalnya makna lokasi sentral dan periferis jelas menentukan perkembangan negara yang bersangkutan. Itu sebabnya berhubungan dengan penduduk, transportasi, ekonominya dan sebagainya.

Letak sentral tak perlu berarti terjepit yang serba melemahkan, sebaliknya letak periferal belum tentu serba menguntungkan. Contohnya di Eropa Barat, letak Jerman itu akan sentral, tetapi justru akhirnya menakutkan karena dari abad ke abad justru menguatkan dirinya dengan berbagai cara. Kini letak sentralnya yang membahayakan tetangga-tetangganya itu sudah dapat dikendalikan.

5. Letak Strategis

Strategis mula-mula berarti menguntungkan bagi peperangan, tetapi kini selain makna politis dan militer juga dapat ekonomis. Contohnya letak selat Gibraltar, teluk Dadonella dan Basporus, Pulau Malta dan terusan Suez. Semuanya strategis dalam hubungannya dengan laut tengah yang sering kali merupakan ajang permainan politik negara-negara setempat dan para adikuasa. Contoh lain kawasan yang letaknya strategis adalah kawasan Laut Cina Selatan. Kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional (jalur lintas laut perdagangan internasional), sehingga menjadikan kawasan itu mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama. Letak strategis Laut Cina Selatan disengketakan oleh enam negara, pada kepulauan Sparty, yang merupakan gugus kepulauan yang mencakup bagian laut Cina Selatan, diklaim oleh Cina, Taiwan, Vietnam, Brunei, Filipina, dan Malaysia, sementara Kepulauan Paracel dan juga Pratas, praktis secara efektif masing-masing sudah berada di bawah kendali Cina dan Taiwan.

6. Perubahan Nilai Letak

Meskipun lokasi sesuatu tempat di permukaan Bumi itu adalah tetap, akan tetapi nilai politisnya serta implikasi lokatifnya dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman.

Para geograf yang mempelajari masalah-masalah negara harus selalu memperhitungkan hal-hal yang dapat mengubah nilai lokasi.

- Akibat kemajuan teknologi transportasi sehingga jarak spasial dapat dikecilkan secara mengagumkan, segala yang berjauhan dapat didekatkan dengan akibat yang positif maupun negatif.
- Pola persebaran pusat-pusat militer. Politik secara global (internasional) dapat bergeser atau berganti.

- Pandangan yang berubah pada para pengambil keputusan politik, dalam kurun waktu sejarah tertentu. Misalnya sejak tahun 1970 USA meninggalkan Taiwan untuk beteman dengan bekas lawannya yaitu RRC.

B. Pengaruh Luas

1. Peranan Faktor Luas

a. Keuntungan wilayah besar

Ada beberapa keuntungan apabila sebuah wilayah berukuran besar, yaitu lebih suka merdeka daripada wilayah yang kecil, lebih sukar ditaklukkan negara lain, negara yang luas lebih memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, dapat mengadakan perdagangan bebas dengan lebih banyak bangsa, dan memiliki perwakilan di mana-mana, sehingga perdamaian lebih terjamin.

b. Kerugian wilayah besar

Adapun kerugian dari wilayah besar adalah kontrol pemerintah pusat ke daerah sulit, lebih rentan terjadinya konflik internal akibat heterogenitas penduduk, dan pengendalian wilayah memerlukan armada militer yang kuat.

c. Keuntungan negara kecil

Negara kecil memiliki banyak keuntungan, di antaranya lebih mudah memajemen negara yang di dalamnya terdapat berbagai ras, bahasa, dan agama. Contoh dari negara kecil tersebut adalah Belgia. Negeranya tetap terkelola dengan baik meski penduduknya menggunakan bahasa Belanda dan Prancis. Keuntungan yang lain adalah kerukunan dan kesatuan rakyat terjamin, misalnya Belgia, Swiss, dan Denmark.

d. Kerugian Negara Kecil

Adapun kerugian dari negara kecil antara lain: pada masa perang mudah terpengaruh, sehingga mudah ditaklukkan, tidak banyak mengadakan perdagangan bebas dengan negara lain, negara kecil diancam oleh bahaya perpecahan dari dalam, contoh: Austria- Hongaria.

2. Pengalaman Negara dengan Wilayah Luas

a. Rusia

Di negara ini dapat terjadi perpecahan intern yang diterangkan terdapatnya keanekaragaman bidang kehidupan. Terdapat 176 jenis bahasa yang digunakan berdasarkan daerah-daerahnya, penduduknya bertipe industrial-maju dan peternak, penduduk Rusia bertempat tinggal di gurun, kawasan rundra dan dataran rendah yang berhawa sejuk serta tinggal di pegunungan yang topografinya kasar; serta terdapat dua republik soviet yang otonom.

Salah satu kesulitan Rusia yaitu jauhnya jarak antara bagian Barat (Eropa) bagian timur (samudra Pasifik) yang hanya dihubungkan dua jalur kereta api.

b. Kanada

Negara ini ditempati oleh berbagai macam penduduk. Dapat diibaratkan seperti kalung merjan dengan berbagai warna ras. Bagian timur wilayah pesisir berbahasa Inggris, sedangkan di bagian lain berbahasa Prancis. Mereka hidup pada sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan.

c. Cina

Cina dengan luas wilayah yang raksasa memiliki permasalahan dalam negeri yang rumit. Cina bagian utara sepanjang sejarahnya

berwatak konservatif, sebaliknya Cina bagian selatan berwatak progresif. Cina bagian Timur pernah ditaklukan Jepang pada tahun 1930–1945. Setelah perang selesai dan Chiang Kai Shek tak berhasil menyatukannya kembali, datang kemenangan bagi kaum komunis, Mao Tse Tung berkuasa dan memilih Beijing menjadi ibu kota kembali.

d. Amerika Serikat

Amerika Serikat selain luas wilayahnya juga mengandung banyak kebhinekaannya. Negara-negara bagian yang menghadap Samudra Pasifik berhati-hati sekali menerima imigran dari Asia, sebaliknya negara-negara bagian timur Amerika Serikat yang menghadap Eropa menerima imigran dari Eropa. Di USA bagian selatan pernah mendatangkan budak dari Afrika. Mereka dimanfaatkan tanpa diberi upah, sampai akhirnya muncul kaum utara yang anti *slavery* dan kaum selatan yang *proslavery*, sehingga pecah perang saudara di antara kaum tersebut.

e. Pengalaman di Eropa

Luas merupakan unsur fundamental dalam geografi politik suatu negara. Makin luas suatu negara, besar kemungkinan memiliki penduduk banyak dan sumber daya alam yang kaya. Dua hal itu ikut menentukan potensi politis dan ekonomi negara yang bersangkutan. Di samping terdapat relasi positif antara luas negara dan sumber daya alam, terdapat pula relasi positif antara luas daerah dan ongkos yang sekecilnya dalam urusan pemerintahan. Selain itu luas negara juga memengaruhi keamanan dan pertahanan.

Skala G

Skala G adalah ukuran *area of magnitick* (pentingnya wilayah melalui suatu skala). Skala tersebut menyatakan rasio logaritmis dari wilayah suatu negara terhadap wilayah di permukaan.

Rumus :

$$Gx = \frac{\log Ga}{Rx}$$

Keterangan:

Ga : Luas daratan di permukaan bumi

Rx : Luas wilayah negara yang bersangkutan

Skala G hanya akan bermanfaat bagi kita sekarang apabila mampu menyajikan suatu rasio antara luas daratan di permukaan Bumi dan luas wilayah negara yang bersangkutan.

C. Pengaruh Letak, Luas dan Bentuk Indonesia

1. Letak Indonesia yang Berada di antara Dua Benua

Dilihat dari letaknya, maka wilayah negara Indonesia mempunyai posisi strategis dan sekaligus juga rawan, dan memendam banyak kepentingan negara lain karena berada di antara benua Asia dan Australia.

- a. Pengaruh yang positif letak Indonesia: 1) Membuat Indonesia bisa menjalin hubungan baik dengan negara-negara di kedua benua itu, 2) Posisi tersebut berada di antara dua samudra membuat Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi tempat transit jalur perdagangan dunia.
- b. Pengaruh negatif letak Indonesia adalah sebagai jalur lalu lintas kriminalitas internasional. Seperti lalu lintas perdagangan narkoba dan perdagangan anak.
- c. Lokasi geografis Indonesia, menyebabkan negara ini menjadi suatu daerah *Bufferzone*, atau daerah penyangga. Hal ini bisa dilihat pada aspek-aspek di bawah ini:
 - 1) Politik: Indonesia berada di antara dua sistem politik yang berbeda, yaitu demokrasi Australia dan demokrasi

- Asia Selatan;
- 2) Ekonomi: Indonesia berada di antara sistem ekonomi liberal Australia dan sistem ekonomi sentral Asia;
 - 3) Ideologi: Indonesia berada di antara ideologi kapitalisme di Selatan dan komunis di sebelah utara;
 - 4) Sistem Pertahanan: Indonesia berada di antara sistem pertahanan maritim di selatan, dan sistem pertahanan kontinental di utara.
- d. Selain menjadi daerah *Bufferzone*, Indonesia juga memperoleh beberapa keuntungan disebabkan kondisinya yang silang tersebut, antara lain:
- 1) Dapat lebih memainkan peranan politisnya dalam percaturan politik Internasional.
 - 2) Lebih aman dan terlindung dari serangan-serangan negara kontinental.

2. Kawasan Indonesia Terbentuk Atas Kepulauan

Indonesia terdiri dari 17.499 pulau, sebanyak 5698 pulau sudah diberi nama, sementara sebanyak 11.801 pulau belum bernama. Dari jumlah sebanyak itu terdapat 92 pulau terluar yang dinilai sangat strategis, karena menjadi garis terdepan Nusantara, juga berbatasan langsung dengan negara tetangga atau laut Internasional.

Negara Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar sepanjang 3, 5 juta mil di antara lautan yang luas harus mempunyai konsep geopolitik yang menekankan adanya pertahanan maritim dan kontinental yang terintegrasi. Konsep geopolitik itu adalah *Wawasan Nusantara*. Berbeda dengan pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wilayah, konsep geopolitik Indonesia, atau *Wawasan Nusantara* justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Sebagai negara kepulauan yang luas, bangsa Indonesia beranggapan bahwa

laut yang dimilikinya merupakan sarana “penghubung” pulau, bukan “pemisah”. Sehingga, walaupun terpisah-pisah, bangsa Indonesia tetap menganggap negaranya sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari “tanah” dan “air”, sehingga lazim disebut sebagai “tanah air”. Sebagai Negara kepulauan dengan julukan Negara Benua Maritim, Indonesia mempunyai perbatasan dengan sepuluh negara tetangga; tiga diantaranya di samping mempunyai perbatasan darat juga mempunyai perbatasan wilayah laut.

Pengaruh yang positif terdiri dari banyak pulau:

- a. Membuat Indonesia kaya akan budaya, karena terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa.
- b. Banyak wisata alam seperti danau, gunung api, dan pantai. Hal itu dapat memajukan pariwisata Indonesia.

Pengaruh yang negatif dari banyak pulau:

- a. Kontrol pemerintah pusat dengan daerah sulit terjadi,
- b. Masih banyak pula wilayah terpencil yang belum terjamah sarana pendidikan dan kesehatan. Salah satu faktor yang menentukan kualitas SDM adalah tersedianya infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Tetapi karena tidak tersedia maka tingkat pendidikan umumnya masih rendah, demikian pula halnya dengan kesehatan masyarakat
- c. Akibat wilayah Indonesia yang luas dan terdiri atas banyak pulau, aksi kejahatan di daerah pun tak tercium oleh hukum yang berlaku di Indonesia.
- d. Masih marak pula hukum adat di daerah yang tak beadab, seperti kebiasaan perang antarsuku di Papua.
- e. Sedikitnya masih terdapat 12 pulau yang perlu mendapat perhatian dan menjadi titik dasar penarikan garis perbatasan teritorial serta terletak di wilayah perbatasan yang hingga kini belum diselesaikan dengan negara tetangga. Kedua belas

pulau tersebut antara lain, Pulau Rondo (NAD) berbatasan dengan India, Pulau Berhala (Sumatra Utara) berbatasan dengan Malaysia, Pulau Sebatik (Kalimantan Timur) berbatasan dengan Malaysia, Pulau Nipa (Riau) berbatasan dengan Singapura, Pulau Sekatung (Riau) berbatasan dengan Vietnam. Pulau Miangas dan Pulau Marore (Sulut) berbatasan dengan Filipina, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Bras (Papua) berbatasan dengan Palau, Pulau Asutubun dan Pulau Wetar (Maluku Tenggara) berbatasan dengan Timor Leste dan Pulau Batek (NTT) berbatasan dengan Timor Leste.

- f. Arus informasi dari negara tetangga lebih dominan. Karena letaknya yang terisolasi, Pulau-Pulau Kecil Terluar sulit dijangkau oleh teknologi komunikasi dan informasi sehingga cenderung memanfaatkan informasi dari negara tetangga. Sebagian besar mereka hanya dapat mengakses TV negara tetangga dan sebaliknya tidak bisa menangkap jaringan TV nasional, walaupun dapat tapi kualitasnya kurang baik.
- g. Penduduk merasa lebih dekat dengan negara tetangga. Secara geografis, Pulau-Pulau Kecil Terluar berjarak lebih dekat dengan negara tetangga. Penduduk banyak yang mencari nafkah di negara tetangga, karena lebih mudah mendapatkan pekerjaan, misalnya penduduk P. Miangas, (berbatasan dengan Filipina). P. Sebatik (berbatasan dengan Malaysia). Begitu juga dengan sarana dan prasarananya, sehingga kegiatan ekonominya lebih dipengaruhi oleh kegiatan yang terjadi di wilayah tetangga.
- h. Kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah. Kondisi masyarakat umumnya masih tergolong sangat sederhana atau di bawah garis kemiskinan. Karena kondisi wilayahnya menyebabkan mereka belum dapat memanfaatkan peluang. Pada umumnya mereka lebih mengandalkan negara tetangga.

- i. Akses menuju Pulau-Pulau Kecil Terluar sangat terbatas. Pada umumnya aksesibilitas menuju pulau-pulau kecil terluar tidak ada atau sangat minim, sehingga sulit mengharapkan sektor perekonomian bisa berkembang secara alami.
- j. Minimnya sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat mulai dari belum adanya fasilitas sama sekali, tidak ada sarana jalan, belum ada terminal, tidak punya pelabuhan laut dan sarana angkutan. Untuk yang sudah berpenghuni pun, umumnya prasarana air (terlebih lagi irigasi) untuk menunjang kegiatan pertanian belum ada atau jauh dari memadai, demikian pula dengan jangkauan pelayanan lainnya seperti sarana listrik dan telekomunikasi.
- k. Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar pada umumnya terpencil, jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan kawasan sangat sulit dijangkau, demikian pula dengan kondisi alamnya ada yang sama sekali tidak berpenghuni dan tidak mempunyai sumber air tawar.

3. Bentuk Laut yang Luas dan Garis Pantai yang Panjang

Pengaruh yang positif laut yang luas dan garis pantai yang panjang adalah membuat Indonesia menyimpan hasil laut seperti ikan, kerang, serta bahan tambang seperti minyak bumi. Hal itu dapat menambah pendapatan negara. Sedangkan pengaruh yang negatif laut yang luas dan garis pantai yang panjang adalah banyak wilayah perairan Indonesia yang menjadi bahan perebutan negara tetangga, misalnya kasus pulau Sipadan dan pulau Ligitan karena banyak pulau di Indonesia yang belum memiliki nama dan terdaftar di PBB.

4. Letak Berada di Kawasan Tropis

Pengaruh yang positif terletak di daerah tropis adalah membuat Indonesia kaya akan hasil hutan, berbagai jenis

tanaman, dan berbagai jenis hewan. Sedangkan pengaruh yang negatif letak Indonesia di daerah tropis adalah akibat pemanasan global, membuat wilayah Indonesia sangat menerima dampaknya. Seperti sering terjadi badai tropis. Pengurangan daratan Indonesia akibat pencairan es di kutub. Wilayah Indonesia yang banyak terdiri atas pulau dan laut yang luas membuat daratan Indonesia banyak sekali berkurang.

5. Kesuburan Tanah

Pengaruh positif dari tanah yang subur membuat Indonesia menghasilkan banyak hasil pertanian dengan aneka jenis tanaman. Sedangkan pengaruh yang negatif dari tanah Indonesia yang subur banyak lahan yang di sekitar daerah pegunungan vulkanik, aliran sungai, daerah endapan sungai, hutan banyak dimanfaatkan oleh penduduk yang mendiami wilayah tersebut secara tidak proporsional yang dapat mengakibatkan bencana akibat ulah manusia itu sendiri.

6. Wilayah Hutan yang Luas

Pengaruh positif wilayah hutan yang cukup luas adalah menjadikan hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia dan komoditi kayu olahan. Sedangkan pengaruh yang negatif dari wilayah hutan yang luas adalah letak hutan yang jauh dari pemantauan pemerintah. Akibat letak Indonesia yang berjauhan dan berpulau-pulau, membuat aksi kejahatan terhadap hutan, seperti pembakaran, pencurian kayu, pembukaan lahan yang tidak terstruktur marak terjadi dan sulit dikendalikan.

7. Perubahan Musim

Letak geografis Indonesia menyebabkan wilayah Indonesia memiliki iklim muson, yang berpengaruh terhadap perubahan musim di Indonesia. Perubahan musim di Indonesia terjadi dari

musim hujan dan musim kemarau yang berpengaruh sebagai berikut.

- a. Pengaruh positif musim hujan adalah wilayah Indonesia secara umum tidak akan kekurangan cadangan air karena tersuplai air hujan sepanjang tahun selama 6 bulan, walaupun dalam kenyataannya banyak penyimpangan mengenai pernyataan tersebut selain wilayah Indonesia yang dikelilingi wilayah perairan.
- b. Pengaruh yang negatif dari musim hujan adalah di kota-kota besar dan di daerah-daerah yang hutannya gundul musim hujan sering mendatangkan bencana banjir. Bencana ini menimbulkan dampak seperti banyak rumah penduduk terendam, bahkan tidak sedikit kehilangan harta dan nyawa penduduk yang terkena musibah tersebut.
- c. Sedangkan pengaruh musim kemarau yang panjang sering merugikan penduduk, khususnya bagi para petani, yaitu banyak lahan pertanian menjadi kering, ternak mati karena rumput menjadi kering. Bahkan sering terjadi kebakaran hutan terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatra

8. Persebaran Flora dan Fauna

Pengaruh persebaran flora dan fauna di Indonesia mendorong para peneliti dan pecinta alam datang ke Indonesia untuk meneliti flora dan fauna. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu tempat ada yang tumbuh secara alami dan ada juga yang dibudidayakan oleh manusia. Selain itu, keanekaragaman dan perbedaan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan alam, gerakan hewan dan rintangan alam. Fauna atau dunia hewan di Indonesia digolongkan menjadi tiga kelompok berdasarkan pengelompokan oleh Alfred Russel Wallace dan Max Wilhelm Carl Weber.

BAB VI

DETERMINISME IKLIM

A. Pengaruh Iklim terhadap Negara

Determinisme iklim memegang pandangan bahwa lingkungan fisik menentukan kondisi sosial-budayanya. Orang-orang yang meyakini pandangan ini mengatakan bahwa manusia secara ketat ditentukan oleh stimulus-respon (lingkungan iklim-perilaku) dan tidak menyimpang.

Kehidupan manusia bertalian erat dengan iklim. Iklim menentukan jenis pangan yang diusahakan melalui pertanian setempat, iklim juga memengaruhi gaya hidup manusia. Vitalitas manusia yang mendorong pencapaiannya secara kultural juga memiliki latar belakang iklim tertentu. Kekuasaan politik ternyata juga berkaitan dengan iklim wilayah yang menguntungkan.

Tentang iklim ini, kemudian diperjelas dengan pendapat E. Huntington yang terkenal dengan aliran determinisme geografis, dalam bukunya *Civilization and Climate* (1915) yang menyebutkan bahwa semua kebudayaan bangsa yang pernah muncul dalam sejarah atau yang dapat dianggap maju ekonominya, terletak di daerah-daerah yang mempunyai iklim sedang.

Elsworth Hungtinton memaknai iklim secara luas, memengaruhi kehidupan manusia melalui tiga cara: (a) membatasi gerakan manusia; (b) menjadi faktor utama dalam mengontrol

wujud dan jenis-jenis kebutuhan materiil manusia, yakni pangan, sandang dan papan; (c) secara langsung berpengaruh atas kesehatan dan energi manusia.

Terjadi suatu perbedaan yang mencolok ketika membandingkan negara-negara berkembang seperti Amerika Utara, Eropa, Jepang, Korea dan lain-lain, yang merupakan negara-negara yang bertempat tinggal di wilayah sedang (subtropis). Sedangkan negara-negara yang tergolong negara miskin seperti India, Amerika Latin, Afrika Tengah termasuk salah satunya adalah Indonesia bertempat tinggal di wilayah tropis. Bila dibandingkan antara kemajuan benua dengan kondisi iklim, tampak wilayah Eurasia subtropis lebih maju daripada benua lainnya.

Eurasia adalah daratan terbesar, gabungan dari benua Eropa dan Asia, terbentang dari Eropa Barat sampai ke Selat Bering. Sebagian besar terletak dalam iklim subtropis. Iklim yang relatif beragam ini adalah konsekuensi dari terbentangnya Eurasia dari barat ke timur, bukan dari utara ke selatan. Daratan yang luas tanpa hambatan alam berarti memberikan ruang yang luas bagi flora, fauna dan juga manusia untuk berkembang biak.

Daerah subtropis mempunyai empat musim sepanjang tahun. Hal ini berpengaruh pada siklus hidup tanaman di daerah ini. Tanaman melalui proses evolusi menyesuaikan diri dengan sekitarnya. Di musim dingin, tanaman tidak akan tumbuh, hanya menyisakan sedikit daya hidup untuk bertahan. Di musim semi, biji-biji mulai bertunas, daun-daun mulai tumbuh lagi. Curah hujan di musim panas memberikan cukup air untuk tanaman. Di musim gugur, tanaman bersiap untuk menghadapi musim dingin dengan menggugurkan daunnya. Semua ini terprogram secara genetik pada tanaman. Beberapa spesies tanaman yaitu tanaman rumput berbiji besar (*sereal*) dan kacang-kacangan beradaptasi sangat baik

dengan kondisi alam ini. Tanaman-tanaman ini adalah tanaman tahunan, yang siklus hidupnya hanya setahun. Karena hanya tumbuh setahun, usaha terbesar tanaman ialah membuat biji yang sebesar mungkin yang akan meneruskan kelangsungan gen pada tahun berikutnya. Tanaman-tanaman inilah yang nantinya akan menjadi makanan pokok dan memicu tumbuhnya sebuah peradaban.

Eurasia adalah daratan terbesar. Daratan yang luas berarti tempat tinggal yang luas bagi flora, fauna dan juga manusia tentunya. Tempat yang luas berarti besarnya populasi dan memberikan ruang bagi keanekaragaman. Populasi dan keanekaragaman spesies ini nantinya akan sangat berpengaruh bagi munculnya pertanian.

Eurasia yang terbentang dari barat ke timur membawa konsekuensi iklim yang beragam sepanjang daratan. Iklim yang seragam ini membuat penyebaran flora, fauna dan manusia menjadi lebih mudah. Makhluks hidup cenderung lebih suka tinggal di daerah yang tidak jauh berbeda dengan tempat tinggal sebelumnya.

Hal yang kontras bisa dilihat jika kita membandingkan Eurasia dengan Afrika dan Amerika. Meskipun kedua benua tersebut juga termasuk besar, namun peradabannya kalah jauh dari Eurasia. Afrika dan Amerika terbentang dari utara ke selatan yang membawa konsekuensi perbedaan iklim di sepanjang garis lintang. Penyebaran menjadi lebih lambat karena butuh waktu untuk menyesuaikan diri yang lebih lama. Selain itu terdapat hambatan alami yang secara langsung membatasi penyebaran. Hambatan itu adalah Gurun Sahara yang membatasi Afrika bagian utara dan selatan, serta gurun di Meksiko dan tanah genting Panama yang sempit, yang membatasi Amerika bagian utara dan selatan. Secara alamiah, Afrika dan Amerika terbagi menjadi dua wilayah yang relatif terisolasi satu sama lain.

Kondisi iklim dan cuaca dapat memengaruhi watak ataupun perilaku dan aktivitas serta ras manusia. Kondisi iklim dan cuaca pada suatu negara sangat berperan pada perkembangan politik di negara tersebut. Negara-negara yang terletak pada daerah lintang subtropis tergolong negara maju/kaya Amerika Utara, Eropa, Jepang, Korea dan lain-lain. Sedangkan negara yang menempati garis lintang tropis adalah jajaran negara miskin, dan salah satunya adalah Indonesia. Negara yang terletak pada iklim subtropis atau yang memiliki iklim beragam menganut sistem pemerintahan kapitalis dan memiliki daya kompetitif (daya saing) untuk bekerja. Sebaliknya, negara yang memiliki iklim seragam (dingin saja atau panas saja) menganut sistem komunal (suka berkumpul), memiliki sistem ekonomi komando dan cenderung sosialis.

B. Jenis Iklim dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan

Iklim merupakan kondisi yang kompleks dari atmosfer. Kondisi yang kompleks tersebut merupakan gabungan dari berbagai unsur-unsur iklim. Masing-masing unsur iklim tersebut di setiap daerah berbeda-beda intensitasnya yang mana intensitas di setiap daerah ini salah satunya dipengaruhi oleh letak astronomis, sehingga letak astronomis berpengaruh dalam menentukan corak iklim negara yang bersangkutan.

Ada 4 jenis iklim yang efeknya serba membatasi bagi tempat tinggal manusia serta perkembangan kekuasaan politiknya yaitu: iklim dingin, iklim basah tropika, iklim panas (sabana) dan iklim kering (stepa dan gurun).

1. Iklim Dingin: Tundra dan Taiga

Zona iklim yang terlampau dingin yaitu terdapat di wilayah sekitar kutub dan di pegunungan tinggi. Pada umumnya tanah di daerah tersebut dingin beku karena tertutup oleh salju dan

es. Hanya di bagian tepinya saja yang memberikan kemungkinan musim semi yang pendek bagi pertumbuhan jenis-jenis rumput dan lumut tipis. Wilayah padang lumut yang disebut *tundra* tidak dapat menampung penduduk banyak dan hanya dimanfaatkan untuk ternak rusa kutub.

Di samping wilayah *tundra* dikenal pula wilayah *taiga*, yang suhu udaranya tidak begitu ekstrem dinginnya. Musim dinginnya di tempat ini amat panjang sedangkan musim bagi kemungkinan tumbuhnya tanaman bahan pangan terlalu pendek. Penduduknya jarang. Hasil hutan dan tambang merupakan satu-satunya sumber ekonomi. Di situ dengan sendirinya tidak akan muncul pusat-pusat negara yang penting, meskipun memiliki kekayaan alam *taiga*.

2. Iklim Basah Tropika

Tropika adalah daerah di permukaan Bumi, yang secara geografis berada di sekitar ekuator, yaitu yang dibatasi oleh dua garis lintang 23. 5°LS dan 23. 5° LU: Garis Balik Utara (GBU, *Tropic of Cancer*) di utara dan Garis Balik Selatan (GBS, *Tropic of Capricorn*) di selatan. Tropis adalah bentuk ajektivanya. Area ini terletak di antara 23. 5° LU dan 23. 5° LS, dan mencakup seluruh bagian Bumi yang dalam setahun mengalami dua kali saat matahari tepat berada di atas kepala (di utara GBU dan di selatan GBS matahari tidak pernah mencapai ketinggian 90° atau tepat di atas kepala).

Tumbuhan dan hewan tropis adalah spesies yang hidup di daerah tropis tersebut. Istilah tropis juga kadang digunakan untuk menyebut tempat yang hangat dan lembap sepanjang tahun, walaupun tempat itu tidak terletak di antara dua garis balik. Tumbuhan daerah tropis biasanya berdaun lebar dan hijau abadi (tidak menggugurkan daun), atau jika memiliki perilaku peluruh mereka tidak dipengaruhi oleh suhu atau durasi radiasi matahari

melainkan oleh ketersediaan air di tanah. Wilayah tropis di seluruh dunia dikenal dalam biogeografi sebagai wilayah pantropis ("seluruh tropis"), untuk dipertentangkan dengan wilayah per benua, seperti Amerika tropis, atau Asia tropis.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak pada iklim tropis. Dengan curah hujan dan kelembapan relatif besar yang didukung tingginya kesuburan tanah, berpotensi besar untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara dengan kekuatan pada bidang agraris.

Walaupun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, Indonesia masih termasuk ke dalam deretan negara miskin. Iklim di Indonesia merupakan salah satu faktor yang memengaruhi watak bangsa Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia merupakan salah satu dari sekian yang bertempat tinggal di wilayah Tropis. Negara yang bertempat tinggal di wilayah Tropis juga bisa dikatakan negara yang bertempat tinggal di wilayah yang memiliki iklim seragam. Yang dimaksud iklim seragam di sini ialah iklimnya dingin saja atau panas saja. Kondisi iklim yang seperti itu sangat memengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang menanggapi daerah ini cenderung memiliki karakter yang berbeda dengan daerah yang berada di wilayah subtropis.

3. Iklim Panas: Sabana

Iklim panas merupakan unsur kedua yang fungsinya membatasi perkembangan politik. Zona iklim panas ini terdapat di sepanjang garis ekuator dan kawasan yang berbatasan dengan arah kutub.

Dataran-dataran rendah tropika di dunia udaranya selalu panas tetapi lembap. Sifatnya yang serba monoton (panas dan lembap tanpa selingan) itulah yang menjadikan wilayah tersebut

tidak baik untuk tempat tinggal manusia. Hujan yang turun sehari-hari dapat mencuci tanah (*soil leaching*) sehingga tidak subur bagi pertanian. Udara yang terik serta lembap juga melemahkan tubuh manusia untuk bekerja keras, selain itu vitalitasnya cepat menurun drastis. Hanya di daerah-daerah pantai dan lereng-lereng pegunungan saja penduduk dapat menyelenggarakan kehidupannya yang layak, karena pengaruh angin laut atau angin gunung yang suhunya sedikit sejuk.

Bagian kedua dari wilayah tropika adalah yang bermusim kering, ini lebih memberikan kemungkinan pada manusia. Musim kering fungsinya seperti mematahkan monoton tropika. Di situ akal manusia dapat diasah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kondisi optimal secara klimatis bagi manusia di wilayah tropika kedua ini, berupa musim kemarau (kering) yang agak pendek, seperti di India, Srilanka, Jawa dan Kuba. Penduduk di tempat ini amat padat (dibandingkan dengan kawasan lain di Bumi, justru paling padat). Hasil pertanian bahan pangan seperti padi dan jagung ditanam sebanyak-banyaknya. Semakin ke pinggir, yang musim keringnya lebih panjang dan curah hujannya cenderung langka, muncul bentang alam berupa *stepa* dan *sabana*.

Wilayah-wilayah yang iklimnya terlalu terik menurut pengalaman sejarah, dapat menghambat munculnya perkembangan politik yang modern.

4. Iklim Kering: Stepa

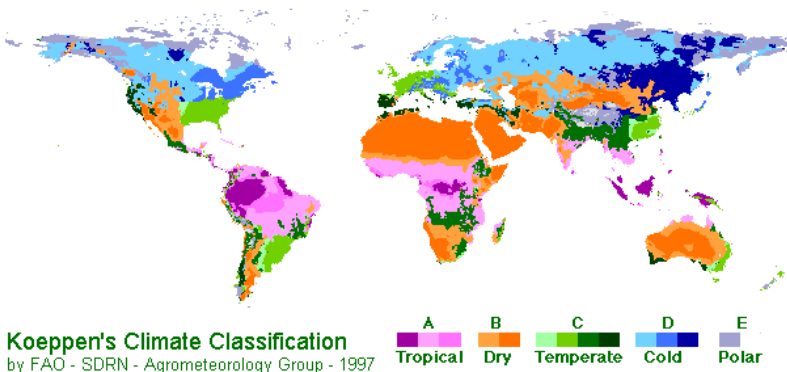
Unsur keempat yang fungsinya menghambat perkembangan politik adalah kekeringan. Wilayah-wilayah dipermukaan Bumi yang terdiri atas gurun-gurun dapat menyajikan penghidupan bagi manusia apabila dapat menyajikan air dalam jumlah yang cukup untuk mendukung usaha pertanian penduduk atau menyediakan

sumber daya tambang yang dapat diolah.

Pada kawasan yang memiliki irigasi yang luas, dapat lahir suatu kesatuan politik yang penting. Wilayah yang memiliki saluran irigasi paling menguntungkan bagi lahirnya peradaban manusia, jika dibandingkan dengan wilayah tropika yang monoton iklimnya.

Stepa merupakan bagian dari wilayah beriklim kering (*semi-arid*). Penduduknya adalah kaum Nomad yang bertahan hidup berabad-abad di daerah beririgasi di antara stepa itu. Menurut sejarah, perpindahan bangsa Nomad ke stepa-stepa itulah yang mendorong serbuan-serbuan masuk negara agraris.

Kondisi iklim kering (*semi-arid*) dalam sejarahnya, menghasilkan penduduk Nomaden yang serba positif mentalitasnya serta jasmaninya dan mampu menggerakkan munculnya kekuasaan penting setempat dan di wilayah sekitarnya yang jauh.



Gambar 6. 1. Klasifikasi Iklim Dunia Menurut Koppen
Sumber: wikipedia.org

C. Iklim yang Cocok Bagi Perkembangan Ekonomi dan Politik

Faktor yang paling dominan dari letak astronomis adalah faktor iklim. Dalam kehidupan perekonomian sebuah negara akan sangat ditentukan oleh faktor letak astronomis yang berkaitan dengan iklim. Suatu negara yang terletak pada lintang dan iklim yang berbeda akan mempunyai suatu sistem dan tipe perekonomian yang berbeda pula.

Wilayah yang iklimnya terlalu terik menurut pengalaman sejarah, menghambat perkembangan politik yang modern. Negara yang berada pada lintang kutub memiliki iklim dingin yang terlampau dingin, tanahnya dingin dan beku karena tertutup es sehingga tidak bisa dimanfaatkan, sehingga sumber daya mineral yang ada memiliki nilai ekonomis yang rendah. Oleh karena itu, dengan sendirinya tidak akan tumbuh pusat-pusat negara yang penting di wilayah ini. Negara yang terletak di lintang tengah dengan iklim sedang yang basah merupakan wilayah yang paling baik. Wilayah lintang tengah memiliki suhu yang sejuk, terjadi perubahan-perubahan musiman dan badai sinklon, hal ini dinilai mendorong perkembangan politik. Bisa dikatakan semua bangsa-bangsa yang penting dan berkuasa berada pada zona iklim sedang yang basah. Pada akhirnya iklim yang ditentukan oleh letak astronomis dapat dihubungkan dengan pertanian apa yang cocok dan seberapa besar keberhasilannya (kesuburan tanah), pengaruh iklim terhadap kekayaan alam dan fasilitas perhubungan.

Suatu negara dalam menjalankan perekonomiannya akan ditentukan oleh tipe perekonomian yang paling dominan. Dalam hal ini yang dominan sektor agraris atau industri dan jasa. Sebagai contoh adalah Negara-negara Eropa. Negara yang berada di belahan Bumi bagian utara dengan iklim sedang dan dengan kondisi

yang kurang cocok untuk diusahakan pertanian, maka sektor yang paling berkembang dan dominan adalah industri dan jasa. Sektor ini dikembangkan secara maksimal sehingga kemajuan yang dicapainya sangat pesat. Contoh lain adalah Indonesia yang terletak pada lintang tropis dan sangat cocok untuk diusahakan pertanian. Maka sektor yang paling dominan adalah sektor pertanian

Berhasil atau tidaknya perekonomian suatu negara ditentukan oleh perilaku dari masing-masing pelaku ekonominya. Perilaku tersebut biasanya dikenal dengan etos kerja yang dilihat dari kedisiplinan, kerajinan, keuletan, ketangkasan dan semangat dalam bekerja. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh kondisi iklim suatu negara berdasarkan letak astronomisnya. Sebagai contoh, negara yang terletak di daerah tropis yang panas seperti Indonesia tentu penduduknya akan malas, kurang bersemangat dikarenakan cuaca yang kurang bersahabat. Tidak seperti Jepang yang berada pada kondisi yang stabil yaitu pada lintang subtropika, sehingga para pelaku ekonominya mempunyai etos kerja yang tinggi. Hal ini yang menyebabkan Jepang menjadi negara yang berhasil dalam bidang teknologi. Begitu juga dengan negara lain seperti Eropa Barat dan Amerika.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kehidupan perekonomian penduduk akan sangat dipengaruhi oleh iklim dari suatu negara, dan iklim tersebut ditentukan oleh letak astronomis negara yang bersangkutan.

Para ahli mengatakan bahwa *favourable climatic zones* adalah Eropa Barat dan Amerika Serikat. Geograf Elsworth Huntington seorang deteminis iklim menulis bahwa di permukaan Bumi kita telah terjadi suatu *polar march of civilization*, yaitu pergeseran lokasi peradaban ke arah kutub (kutub utara). Mula-mula peradaban ada di wilayah iklim yang mampu melindungi manusia

terhadap ancaman dari lingkungan alam sambil bergeser ke arah utara, manusia memasuki iklim yang tidak lagi akrab dengannya.

Wilayah iklim yang cocok yaitu wilayah beriklim sedang yang basah (*wet intermediate climate*). Iklim ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Wilayah lintang pertengahan (*middle latitudes*)
Wilayah ini ditandai dengan iklim serba sejuk dan di situ terjadi perubahan-perubahan musim dan badai-badai sinklon. Kombinasi keduanya dinilai mendorong perkembangan politik. Dengan mempelajari peta akan tampak bahwa semua bangsa yang penting kekuasaannya menempati zona iklim sedang yang basah (*humid intermediate climatic zone*).
2. Wilayah lintang rendah (*low latitudes*)
Wilayah ini ditandai dengan adanya dataran-dataran tinggi. Jika diperiksa latar belakang alamnya, maka terdapat kawasan-kawasan yang luasnya serba terbatas dan topografi yang kasar dengan tingkat erosi yang tinggi. Hal itu pada umumnya dapat mendorong perkembangan politik bangsa-bangsa yang bertempat tinggal di sana.

Determinisme iklim merupakan aspek ekonomi geografi. Terkadang juga disebut *khatulistiwa paradoks*. Menurut teori ini, sekitar 70% dari ekonomi suatu negara dapat diprediksi dari jarak antara negara itu dari khatulistiwa. Dengan kata lain, tempat di sekitar khatulistiwa lebih cenderung akan menjadi negara berkembang. Paradoks yang sama juga berlaku baik utara dan selatan khatulistiwa. Australia, misalnya, memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada pembangunan ekonomi Indonesia. Paradoks yang juga berlaku di negara-negara bagian sebelah utara AS yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara selatan AS.

Singapura merupakan contoh anomali dari teori ini. Singapura yang terletak di 1,22 ° LU dan terletak di sekitar khatulistiwa, tetapi merupakan salah satu negara yang paling makmur. Kesejahteraan ini didasarkan pada posisinya sebagai pelabuhan, industri dan jasa yang maju. Anomali pengecualian lainnya pengecualian sebagian besar cenderung memiliki sumber daya alam, misalnya negara-negara Arab yang kaya akan minyak bumi.

D. Homogenitas Lawan Kompleksitas Iklim

Kondisi-kondisi iklim yang berbeda di suatu wilayah, pengaruhnya dapat tampak baik pada penduduknya maupun pada struktur pemerintahannya. Faktor iklim sangat menentukan perkembangan kebudayaan manusia. Iklim di muka Bumi ini beragam, akibatnya kebudayaan manusia juga beragam. Secara umum, dapat dikatakan bahwa homogenitas iklim menguntungkan bagi kesatuan politis suatu *nation*, tapi sebaliknya *heterogenitas* dapat menimbulkan disintegrasi politik di suatu negara.

Negara yang terletak dalam suatu kesatuan astronomis dengan mempunyai corak iklim yang hampir sama (homogen) cenderung melakukan kerja sama dalam bidang politik sebagai contoh adalah Asia yang berada di lintang tropis mendirikan organisasi Asia yang dikenal dengan ASEAN. Negara-negara yang berada dalam lingkup astronomis yang sama tentunya akan sangat menguntungkan bila melakukan kerja sama karena banyak kesamaan. Dalam hal ini, peran atau fungsi letak astronomis mirip dengan peran atau fungsi letak geografis suatu negara. Kesimpulannya, letak astronomis akan membawa pengaruh yang besar terhadap hubungan dengan negara lain.

E. Iklim dan Peperangan

Negara-negara yang berada pada garis lintang yang sama, hasil Bumi dan produk-produk yang dihasilkan juga cenderung sama/seragam, sehingga hubungan timbal balik/bilateral antarnegara tersebut kurang dapat terjalin baik karena tidak mampu saling menyediakan kebutuhan (dikarenakan produk-produknya sama). Justru yang mungkin terjadi adalah persaingan/kompetisi dalam pemasaran produk-produknya.

Sebaliknya, pada negara-negara yang berada di lintang yang berbeda, otomatis akan memiliki hasil Bumi dan produk yang berbeda, sehingga hubungan bilateral dapat lebih terjalin intensif karena negara tersebut dapat saling melengkapi kebutuhan negara yang lain. Namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi kolonialisme yang berujung pada peperangan karena suatu negara ingin menguasai hasil Bumi negara lain yang tidak dapat diproduksi negaranya sendiri (contohnya Indonesia penghasil rempah dan energi fosil dijajah Belanda)

Kawasan dengan iklim yang terbaik, tidak akan menghasilkan peradaban besar jika terus-menerus menderita serbuan dari bangsa-bangsa tetangga yang iklim kawasannya tak menguntungkan. Karena itu dibutuhkan *man power* demi bertahannya peradaban besar.

Ditinjau secara keseluruhan, dalam sejarah umat manusia, dapat disaksikan bagaimana peperangan merupakan bagian dari kehidupan negara-negara di mana pun. Bahwa iklim merupakan faktor yang penting dalam peperangan. Pada masa perang iklim sangat diperhitungkan baik dari *front depan* maupun *front belakang*.

Di wilayah *front*, iklim memengaruhi kemampuan negara untuk melakukan peperangan, hal ini berkaitan dengan

struktur perekonomian bangsa. Peperangan modern pasti memperhitungkan berbagai kebutuhan, seperti peningkatan produksi pangan, tekstil, serta kebutuhan lain.

Di medan perang (*front depan*), iklim merupakan faktor penting untuk diperhitungkan. Kondisi iklim yang terus berubah menjadi perhitungan pasukan perang untuk tetap melancarkan aksinya.

F. Mewasapadai Pemanasan Iklim Global

Jika merujuk isu, pemanasan iklim global hanyalah karena percabangan-percabangan analisis aspek geopolitik negara. Jauh lebih cepat dibanding iklim, skandal yang melingkupi perubahan iklim memberi kontribusi untuk mengubah skenario geopolitik dunia. Beberapa hal pokok dari kasus tersebut adalah:

1. Lingkungan dan masalah energi merupakan dua sisi koin yang sama. Sebagai konsekuensi hasil dari pertarungan itu akan ditentukan pada kenyataan yang terjadi di lapangan secara global.
2. Energi bernilai ekonomi.
3. Mengingat bahwa tidak ada solusi global untuk masalah ini, yang akan terjadi adalah penindasan atau konflik.

Dari tahun ke tahun, perubahan iklim dan lingkungan sudah menjadi hal yang sangat mencemaskan bagi negara-negara industri, sehingga diperlukan persetujuan bersama untuk mengurangi pemanasan global tersebut. Kecemasan yang dimaksud adalah perubahan iklim yang dipercepat dengan mencairnya es di kutub. Akhir-akhir ini sudah dipertimbangkan berbagai hal tentang ekonomi yang efektif seperti efisiensi energi dan sumber yang dapat diperbarui. Pemerintah Inggris menyatakan dampak pemanasan global akan melebihi krisis pada tahun 1929. Masih

ada harapan untuk mengurangi pemanasan global, yaitu membuat terobosan baru dibidang industri yang ramah lingkungan.

Para pakar lingkungan yakin dengan adanya industri yang ramah lingkungan dan kemajuan teknologi yang pesat, maka dampak pemanasan global dapat diperkecil. Adapun transisi energi akan tampak lebih sulit yaitu perubahan dari minyak menjadi teknologi hijau. Diperkirakan akan terjadi krisis minyak mentah di seluruh dunia 10 sampai 20 tahun yang akan datang, maka mulai sekarang penggunaan bahan bakar harus dikurangi terutama yang menghasilkan CO₂ (sekitar 50 persen antara 1990 –2010). Kyoto mengambil 20 tahun untuk menstabilkan CO₂ di udara dan diteruskan sampai 50 tahun yang akan datang. Hal ini telah disepakati oleh masyarakat dunia dan telah diterima oleh petinggi masing-masing negara. Sudah sangat jelas, bagaimanapun sampai tahun 2030 pancaran emisi gas rumah kaca membawa emisi hingga 50 persen. Lalu apa yang sudah diperbuat oleh negara di dunia? Untuk itu negara-negara industri harus bertanggung jawab atas CO₂ (di atas 80% dalam 1975 dan 59% tahun 2005) yang mereka keluarkan. Namun dalam kenyataan di lapangan sangat tidak sesuai.

Tahun 2020 negara-negara berkembang akan mengeluarkan emisi melebihi emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh negara-negara industri. Oleh karena itu, perlunya kerja sama antarnegara untuk mengendalikan emisi gas tersebut. *Kyoto protokol* adalah salah satu solusi untuk mengurangi gas rumah kaca tersebut. Merkel, Menteri Jerman, memberikan gagasan mengenai pengurangan emisi gas buang sebanyak 2 ton tiap tahun yang melibatkan negara-negara industri dan sejumlah negara berkembang yang mencapai puncaknya pada tahun 2025–2030.

Siapa yang akan terkena langsung dampak pemanasan

global? Laporan Uni Eropa yang terakhir menyebutkan bahwa pemanasan global akan memberikan dampak yang serius bagi negara berkembang. Peningkatan suhu dua derajat saja akan berakibat fatal. Evaluasi para ilmuwan menyebutkan perubahan iklim di selatan Eropa semakin memperburuk keadaan di sana.

Afrika adalah salah satu benua yang terkena dampak langsung dari pemansan global. diperkirakan tahun 2020, 75–250 juta orang dan dalam 20 tahun, yaitu tahun 2050 ketersediaan air di benua Asia terutama di waduk dan bendungan-bendungan akan banyak berkurang. Kondisi ini akan memengaruhi lebih dari satu miliar orang yang hidup di sana. Air laut akan naik yang akan membawa risiko pada penggenangan daratan. Semua hal tersebut adalah ramalan-ramalan dari Uni Eropa untuk tahun-tahun ke depan. Bila tidak segera ditangani, maka perkiraan ini hanya akan menjadi angin lalu saja.

Dalam sebuah diskusi oleh Yakobus Lovelock, seorang pakar iklim Amerika Serikat, mengungkapkan gas-gas rumah kaca akan menyebabkan kematian jutaan orang pada abad berikutnya. Seperti yang telah terjadi di Pentagon. Studi 2003 menandai di Amerika Serikat sudah terjadi gejala yang lebih cepat. Untuk itu efisiensi energi terutama rumah tangga harus segera dilakukan. Selain itu, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan penanaman pohon juga tidak kalah penting. Pandangan internasional menyebutkan bahwa efisiensi teknologi terhadap negara harus segera diterapkan dan untuk mencapai hasil ini, maka dibentukalah apa yang disebut sebagai *kyoto protokol* yang isinya berupa instrumen-instrumen penggunaan bahan bakar minyak yang ramah lingkungan. Penggunaan instrumen-instrumen ini secara maksimal akan menciptakan ekonomi pasar pada dua periode tahun dan telah mencapai 54 miliar dolar dalam 2006 dan 15 miliar dari investasi-

investasi. Yang terpenting adalah penghapusan HCFC23 dan Nitro Oksida yang sangat memengaruhi iklim. Diharapkan beberapa tahun yang akan datang semakin ditingkatkan efisiensi energi melalui teknologi yang lebih baik dan ada kemungkinan negara industri akan memiliki defisit CO₂ sebanyak 33 miliar.

Efektivitas mekanisme-mekanisme ini bisa meluas dalam beberapa dekade, memberikan suatu transfer teknologi yang kuat ke negara berkembang. Resolusi-resolusi ini mengulangi pernyataan dalam perjanjian yang lalu dengan meningkatkan bantuan kepada negara-negara tersebut. Kecemasan bahwa emisi tidak dapat dikendalikan di dalam belahan Bumi selatan seperti itu menciptakan suatu keinginan untuk membawa emisi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian, menciptakan kondisi seperti sedia kala untuk negara-negara kaya.

Lebih dari 140 negara meratifikasi Kyoto Protokol, termasuk 30 negara industri. Kebijakan energi diarahkan untuk mengurangi peranan dan proporsi energi tak terbarukan dengan meningkatkan peranan dan proporsi energi terbarukan (*renewable energy*). Ada tiga mekanisme yang diatur di Kyoto Protokol ini yaitu berupa *joint implementation*; *Clean Development Mechanism*; dan *Emission Trading*. *Joint Implementation* (implementasi bersama) adalah kerja sama antarnegara maju untuk mengurangi emisi efek rumah kaca. *Clean Development Mechanism* (Mekanisme Pembangunan Bersih) adalah solusi-solusi unggul antara negara maju dan negara berkembang, di mana negara maju berinvestasi di negara berkembang dalam proyek yang dapat mengurangi emisi efek rumah kaca dengan imbalan sertifikat pengurangan emisi bagi negara maju tersebut. *Emission Trading* (Perdagangan Emisi) adalah perdagangan emisi antarnegara maju.

Amerika Serikat adalah konsumen energi yang besar dan

sekaligus khawatir terhadap pengurangan emisi yang kuat, sehingga akan memengaruhi gaya hidup mereka. Kecemasan ini juga datang di daerah dekatnya, Kanada, sebagai eksportir energi dengan meningkatkan emisi. Berbeda dengan Amerika Serikat, mereka sudah mengesahkan *Kyoto Protocol*. Eropa, sebagai importir bahan bakar fosil, sudah mengurangi penggunaan energinya dan percaya bahwa pengembangan dari teknologi alternatif dapat membuka tempat bisnis dan sudah memindahkan kebijakan-kebijakannya dengan melibatkan kenyataan iklim yang sedang dihadapi.

Di Rusia, pengganti akan minat pengeksporan hidrokarbon tinggi itu dianggap cukup untuk melindungi konsekuensi atau dampak pemanasan planet Bumi. Sementara Cina mengimpor energi dalam jumlah besar untuk kepentingan industrinya dengan emisi yang lebih mahal. Mereka mulai khawatir terhadap konsekuensi perubahan iklim namun masih segan untuk terlibat dalam pemberian solusi yang tepat dan tetap bertahan dalam transfer pembersihan teknologi. Hal serupa juga sedang dilakukan oleh India.

Banyak negara berkembang lainnya lebih berisiko terhadap perubahan iklim dan dengan konsumsi dan emisi yang lebih rendah. Mereka berharap ada persetujuan yang dapat berperan dalam mengurangi risiko-risiko ini. Produsen-produsen minyak biasanya bermusuhan dalam perjanjian internasional tentang emisi karena risiko pembatasan keuntungan-keuntungan mereka. Australia, selaku eksportir batubara yang besar kepada Amerika Serikat, sebagai negara yang bergerak sebagai produsen-produsen minyak dan bara mereka tidak mengesahkan *Kyoto Protocol*.

Post-Kyoto telah mulai dan banyak percaya bahwa tahun 2009, semua negara-negara sudah mencapai persetujuan. *Kyoto protokol* telah dipraktikkan dan akan memiliki salah satu peran penting. Seperti *draft* pengembangan sumber daya terbarui,

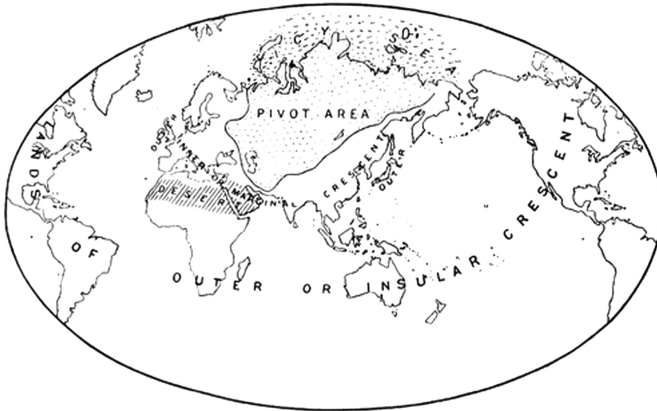
Suatu energi alternatif terbarukan yang murah dan lebih memberi solusi efektif dibanding pengurangan emisi. Ada juga topik dari energi-energi nuklir, yang sedang dihidupkan kembali. Sumbangan dari teknologi ini mempunyai insentif, yang bersifat perlu, tetapi menimbulkan rangkaian potensi permasalahan darurat seperti: pendaurulangan limbah nuklir, limbah nuklir tersebut harus ditangani dengan biaya besar oleh generasi-generasi masa depan pada 20 sampai 30 tahun berikutnya. Apa yang tersisa adalah perpindahan dari gas hidrokarbon menjadi energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan mendukung perbaikan iklim. Di dalam 10 tahun berikutnya, dunia akan mampu memahami lebih nyata isu-isu ini. Setelah peperangan-peperangan untuk minyak dan air, negara-negara di dunia harus mengatur dengan konflik-konflik di atas iklim.

BAB VII

WILAYAH INTI DAN WILAYAH EKONOMI

A. Teori Heartland

Pada tahun 1919 Halford John Mackinder (1861-1947) mengungkapkan konsep *heartland* dalam bukunya *The Geographical Pivot of History*. Konsep tersebut menyatakan "Siapa yang menguasai Eropa Timur akan memerintah *heartland* (wilayah inti), siapa yang menguasai *heartland* akan memerintah pulau dunia, siapa yang menguasai pulau dunia akan mengendalikan dunia".



Gambar 7.1. Peta *Heartland* (*pivot area*) menurut konsep Mackinder
Sumber: Wikipedia.org

Doktrin melibatkan konsep yang bertentangan dengan pemikiran dari Alfred Thayer Mahan tentang arti angkatan laut (ia mengistilahkan kekuatan armada) dalam konflik dunia. Teori Heartland menghipotesiskan kemungkinan untuk suatu kerajaan yang sangat besar dibawa ke dalam keberadaan di Heartland, yang tidak akan perlu menggunakan pengangkutan transportasi laut atau pantai untuk menyediakan industri militer yang lengkap tetapi sebagai gantinya menggunakan jalan kereta api, dan kerajaan tidak bisa dikalahkan oleh semua yang melawan di dunia ini.

Ide dasar Doktrin Mackinder melibatkan pertimbangan geografi di Bumi sebagai hal yang dibagi menjadi dua bagian, Pulau Dunia, berisikan Eurasia dan Afrika; dan Periphery, mencakup American, Pulau kecil Britania, dan Kepulauan Oceania. Tidak hanya Periphery yang terlihat jelas lebih kecil dibanding Pulau Dunia, hal itu memerlukan banyak angkutan laut yang berfungsi di tingkatan teknologi Pulau Dunia, yang berisi sumber alam cukup untuk suatu ekonomi yang dikembangkan. Juga, pusat industri Periphery perlu ditempatkan di *widely-separated*.

Pulau Dunia bisa mengirimkan angkatan lautnya untuk menghancurkan masing-masing dari musuh mereka sesuai gilirannya. Pulau Dunia bisa menempatkan industri sendiri dalam suatu daerah lebih lanjut dekat pulau atau dalam negeri dibanding Periphery yang harus berusaha keras untuk mencapai hal itu. Mackinder memasukkan Heartland sangat utama terdiri atas Ukraina, Rusia Barat, dan Eropa Tengah. Heartland berisi cadangan pasukan dari Ukraina dan banyak sumber alam lain. Dugaan geopolitik Mackinder berpengaruh sepanjang Perang Dunia dan Perang Dingin, sehingga negara Jerman dan Rusia membuat langkah untuk menguasai wilayah ke arah Heartland.

Hanya sekejap konsep Mackinder itu menjadi sangat sukses.

Konsepnya dipublikasikan beberapa kali. Konsep tersebut mengilhami seorang ahli geopolitik Yahudi-Jerman dari Universitas Munich bernama Karl Ernst Haushofer (1896–1946). Pada 1920 mengemukakan juga sebuah teori penguasaan dunia bernama *The Heartland Theory*. Jika teori Mackinder menyebutkan Heartland berada pada kawasan Eropa Timur. Haushofer menyebutkan Hertland mengacu pada kawasan Timur Tengah. Kawasan ini merupakan kawasan vital minyak bumi dan gas dunia.

Sejauh ini belum ada kesepakatan mengenai definisi Timur Tengah (*Middle East*), dan bahkan nama Timur Tengah belum disepakati secara universal. Penamaan Timur Tengah muncul secara resmi oleh orang Inggris untuk menyebutkan kawasan yang meliputi semua negara Asia yang terletak di sebelah selatan Uni Soviet (kini Rusia dan CIS), dan sebelah barat Pakistan, termasuk Mesir. Dalam perkembangan terakhir, negara-negara yang sering diikutkan dalam penamaan kawasan Timur Tengah antara lain: Suriah, Libanon, Palestina, Israel, Mesir, Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, Iran, Turki, dan Kuwait.

Selain memiliki keunikan geografis, Timur Tengah memiliki sifat lain yang khas. Timur Tengah merupakan pusat dunia Islam. Di Timur Tengah terdapat tempat-tempat paling suci Islam dan lembaga-lembaga keilmuan Islam tertinggi. Agama dan budaya Muslim telah meresap ke seluruh masyarakat Timur Tengah dan telah memenuhinya dengan sikap-sikap filosofis, sehingga hanya revolusi radikal yang mungkin mengubah perilakunya. Namun, di tanah suci Palestina, Timur Tengah memiliki fokus aspirasi-aspirasi Yahudi serta Kristen.

B. Implementasi Daerah Inti (*Core Area*) di Berbagai Negara

Daerah inti adalah daerah asal mula tumbuh dan berkembangnya suatu negara. daerah inti biasanya merupakan daerah yang subur dan produktif, sebab hampir setiap negara tumbuh pertama-tama sebagai negara agraris. Konsep *core areas* meski merupakan konsep yang paling germinal dalam geografi politik, ternyata sulit juga untuk didefinisikan dengan tepat dan ringkas. Yang jelas padanya itu melekat hal-hal seperti wilayah dengan kesadaran nasional yang demikian, wilayah yang memimpin secara ekonomis. Jika pun ada definisinya biasanya semacam ini: suatu wilayah negara di mana negara mengkrustalkan diri, berupa pusat yang mendorong integrasi nasional dan biasanya berpenduduk paling padat dan maju ekonominya. Jadi Daerah inti merupakan daerah yang dapat menyerap jumlah penduduk yang banyak, yang kemudian berkembang menjadi daerah yang paling maju.

Dalam perkembangannya mungkin daerah inti akan menjadi pusat kegiatan politik dan administrasi pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, biasanya daerah inti akan menjadi tempat kedudukan ibu kota negara. Adapun peranan dan fungsi ibu kota negara adalah sebagai pusat pemerintahan dan pusat administrasi, pusat jaringan transportasi dan komunikasi, dan pintu gerbang negara yang mencerminkan integritas nasional. Namun dalam pelaksanaannya, ibu kota tiap-tiap negara biasanya memiliki perbedaan peran dan fungsi. Beberapa ibu kota negara hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat administrasi, seperti Washington DC, Canberra, Islamabad, dan Riyadh. Sementara beberapa ibu kota negara lain memiliki multifungsi, selain sebagai pusat pemerintahan, juga sebagai ibu

kota pelabuhan, perdagangan, industri, dan pariwisata, seperti Jakarta, London, Paris, Moskow, dan Tokyo.

Agar dapat menjalankan peran dan fungsi sebagai ibu kota negara, maka kota yang dipilih harus mempunyai nilai strategis, di antaranya harus mudah dicapai dari seluruh bagian wilayah negara, mudah dilindungi dari segala ancaman dari luar dan mudah pula mengadakan pengawasan terhadap seluruh wilayahnya; dan dalam peran internasional, maka harus mudah dicapai dari negara-negara lain di sekitarnya.

Daerah inti tidak hanya identik dengan yang digunakan dalam geografi untuk merujuk kepada pusat wilayah negara. Persepsi daerah inti di setiap negara bisa berbeda-beda. Hal ini terjadi di banyak negara dan daerah, seperti Amerika Serikat, Kanada, India dan lain sebagainya.

1. Istilah daerah inti sering digunakan untuk menjelaskan Midwestern wilayah Amerika Serikat. Ia juga digunakan untuk wilayah Amerika Serikat yang mirip dengan budaya daerah pedalaman, misalnya, Stater Bros supermarket rantai, yang dipusatkan di Inland Empire negara sebelah selatan dan pusat Kalifornia. TV *commercials* didirikan selama bertahun-tahun menggunakan slogan “di daerah pedalaman” untuk merujuk ke pedalaman negara seperti San Bernardino County, Kern County dan Riverside County budaya yang lebih mirip dengan pusat Amerika daripada ke pantai California. Di negara bagian Florida adalah wilayah yang disebut daerah pedalaman Florida, sebuah wilayah enam daerah pedesaan dan yang berada di bagian selatan pusat negara.
2. Istilah “Wilayah inti Hindi” digunakan untuk merujuk kepada Hindi berbahasa negara India Utara, yakni Uttar Pradesh, Bihar dan Assam.

3. Di Singapura, “Heartlanders” (dibandingkan dengan “Cosmopolitans”) adalah istilah populer pada tahun 1999, oleh Perdana Menteri Goh Chok Tong, untuk mengategorikan sebagian besar penduduk Indonesia yang umumnya miskin, kurang pendidikan, yang bekerja di kelas rendah pada perspektif politik, ekonomi dan masalah budaya.
4. Di Polandia wilayah inti utama yang berarti Mazovia.
5. Di Kanada Wilayah inti biasanya merujuk kepada provinsi Ontario dan Quebec.

C. Daerah Ekonomi

Jika Daerah inti berkembang dan meluas menjadi bagian negara yang paling padat penduduknya dengan sistem komunikasi dan transportasi yang padat, juga menjadi daerah industri karena didukung oleh berlimpahnya sumber daya alam yang tersedia, maka Daerah inti ini berkembang menjadi daerah ekonomi (daerah yang digunakan pusat bisnis). Pada daerah *ekonomi* inilah sebagian besar aktivitas politik dan ekonomi sebuah negara dijalankan. Beberapa contoh dapat dikemukakan seperti daerah Paris Basin di Prancis, Thames Basin-Liverpool-Manchester District di Inggris, daerah Northeastern di Amerika Serikat, dan Lembah Po di Italia. Terkadang untuk kepentingan ekonomi dan politik pula maka wilayah inti (ibu kota) suatu negara dapat berpindah

Beberapa ibu kota negara pindah lokasi ke daerah lain karena beberapa alasan dan pertimbangan, yaitu:

1. Kota itu telah menjadi terlalu padat atau terlalu sibuk. Contoh: Arab Saudi (dari Makkah ke Riyadh), Brazil (dari Rio de Janeiro ke Brazil), Turki (dari Istanbul ke Ankara).
2. Dilihat dari segi keamanan-pertahanan dan pengawasan kurang menguntungkan. Contoh: Amerika Serikat (dari New York ke Washington DC), Pakistan (dari Karachi ke Islamabad).

3. Untuk mengatasi atau menghindari konflik golongan atau untuk memberi kesan kenetralan antardaerah. Contoh: Australia (dari Sydney ke Canberra), Kanada (Ottawa adalah daerah antara kelompok penduduk keturunan Inggris dan Prancis).
4. Perubahan-perubahan wilayah sebagai akibat perpecahan atau penggabungan. Contoh: Berlin menjadi ibu kota Jerman bersatu (sebelumnya Jerman Barat beribu kota di Bonn, Jerman Timur beribu kota di Berlin Timur), Vietnam Bersatu beribu kota di Ho Chi Minh City (sebelumnya Vietnam Utara di Pyong yang dan Vietnam Selatan di Hanoy).

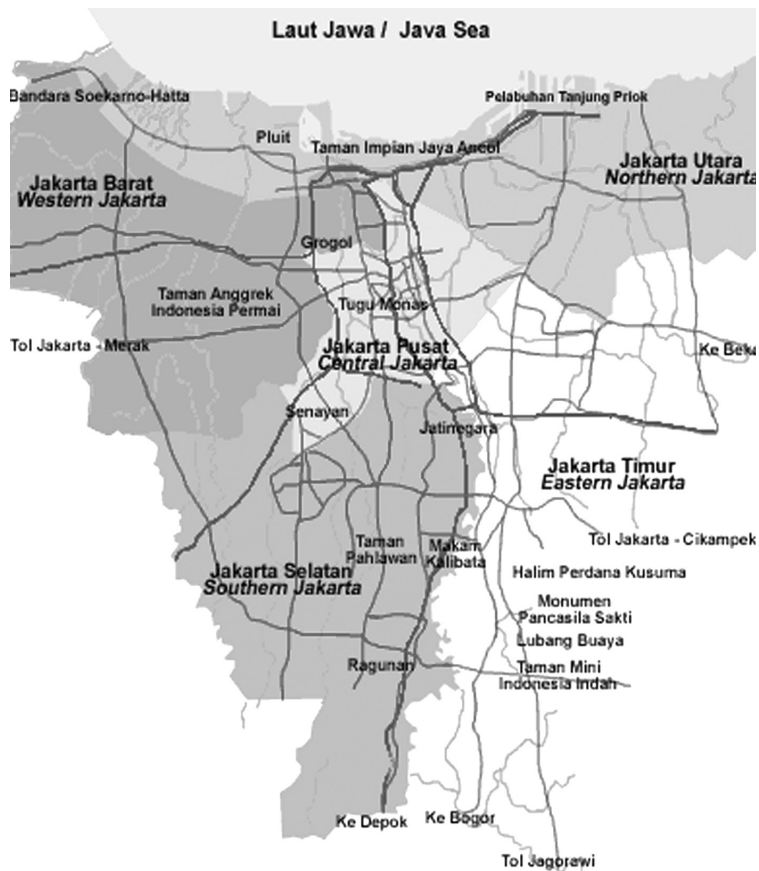
D. Beberapa Contoh Negara Kategori Daerah Inti dan Daerah Ekonomi

1. Jakarta (Indonesia)

Daerah Khusus ibu kota Jakarta (DKI Jakarta) adalah sebuah provinsi sekaligus ibu kota negara Indonesia. Jakarta terletak di bagian barat laut Pulau Jawa. Koordinatnya adalah 6°11' LS 106°50' BT. Jakarta memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis. Terletak di bagian barat Indonesia, Jakarta mengalami puncak musim penghujan pada bulan Januari dengan rata-rata curah hujan 350 milimeter (14 inchi), dan puncak musim kemarau pada bulan Agustus dengan rata-rata curah hujan 60 milimeter (2,4 inchi). Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 25°-38°C (77°-100°F).

Jakarta yang dewasa ini berpenduduk hampir dua belas juta jiwa merupakan salah satu kota di Asia yang paling sering dibicarakan dengan berbagai alasan yang wajar. Jakarta telah berkembang secara luar biasa dan akan berada pada kedudukan terdepan dan bertanggung jawab di Asia pada dasawarsa-

dasawarsa mendatang. Jakarta mempunyai kedudukan khas, baik sebagai ibu kota negara maupun ibu kota daerah swatantra. Jakarta juga merupakan pusat kegiatan sosial dan budaya dengan berbagai sarana terbaik di Indonesia dalam bidang pendidikan, budaya, olah raga, dan kesehatan. Jakarta merupakan gerbang utama Indonesia. Letaknya yang strategis di kepulauan Indonesia, menyediakan layanan angkutan darat, udara, dan laut terbaik di Indonesia.



Gambar 7.2. Peta Adminsitrasi DKI Jakarta
Sumber: Marcatalar.com

Jakarta memperoleh status sebagai Daerah Khusus Ibu kota (DKI). Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menetapkan kebijakan yang merupakan petunjuk bagi badan-badan pemerintah daerah serta membantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dalam menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai perencanaan strategis, pembangunan, dan keuangan untuk wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta terdiri dari lima kotamadya dan satu kabupaten administratif, yang berkedudukan sebagai daerah swatantra tingkat dua, di bawah pengawasan kantor Gubernur. Kelima kotamadya tersebut adalah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Tiap kotamadya dikepalai oleh seorang walikota yang membantu mempersiapkan perencanaan wilayahnya, sedangkan Kepulauan Seribu dikepalai oleh seorang bupati bertanggung jawab dalam bidang keuangan. Masing-masing wilayah kota membawahi sejumlah kecamatan dan kelurahan. Di seluruh DKI Jakarta terdapat 43 kecamatan dan 265 kelurahan. Selain itu terdapat juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yakni Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), yang berada di bawah yurisdiksi kecamatan.

DKI Jakarta sebagai wilayah inti dan wilayah ekonomi (pusat hunian). Salah satu sebabnya adalah masalah urbanisasi. Dengan pertumbuhan setiap tahun, sekitar 200-250 ribu jiwa dan kemampuan yang minim, itu tak mungkin bisa ditanggulangi dengan baik tanpa ada kerja sama dengan daerah di luar Jakarta. Khususnya dari aspek perumahan. Selain urbanisasi, perkembangan pembangunan kawasan di Jakarta dan sekitarnya yang tidak terkendali dan menimbulkan masalah serius antara lain mengenai resapan air yang kerap menimbulkan banjir dan persoalan sosial lainnya. Di kota Jakarta permasalahan kemacetan lalu lintas sudah menjadi hal yang biasa terjadi, timbulnya perumahan kumuh pada

bantaran-bantaran sungai dan di bawah-bawah kolong jembatan sudah menjadi pandangan yang kita anggap menjadi suatu kewajaran, kawasan rawan banjir sudah mulai meluas areanya.

Jakarta sebagai ibu kota negara yang memiliki multifungsi antara lain:

- a. Sebagai pusat kegiatan kehidupan berpolitik. Pusat Pemerintahan: terdapat Istana Negara dan Gedung DPR RI.
- b. Sebagai pusat perdagangan dan jasa, terdapat kantor pusat Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia.
- c. Kota Pelabuhan: adanya bandara intrnasional Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok.
- d. Pusat perdagangan: terdapat beberapa pusat perbelanjaan besar antara lain: Mall of Indonesia, Mall Artha Gading, Mal Puri Indah, Mal Taman Anggrek, Mal Kelapa Gading, Mal Pondok Indah, Sports Mall Kelapa Gading, Plaza Semanggi, Plaza Senayan, One Pacific Place, Mangga Dua, dan Plaza Indonesia.
- e. Pusat industri dan kegiatan perekonomian: terdapat banyak pabrik-pabrik yang dibangun di ibu kota ini, sehingga banyak menyerap tenaga kerja dari berbagai daerah.
- f. Pariwisata: terdapat banyak tempat-tempat pariwisata misalnya: Kebun Binatang Ragunan, Monumen Nasional, Museum Gajah, Taman Mini Indonesia Indah, Taman Impian Jaya Ancol, Puncak, Museum Fatahillah, Pulau Seribu, Taman Wisata Mekarsari.

2. London (Inggris)

Secara geografis wilayah negara ini terletak di sebelah barat daratan Eropa. Meninjau dari lingkup yang lebih luas lagi, letaknya sangat strategis karena berada di jalur transportasi dan perdagangan antara Eropa dan Benua Amerika. Posisi yang sangat menguntungkan ini membuat Inggris bisa menjalin hubungan dengan negara lain dengan baik karena negara-negara baik dari

benua Amerika ataupun Eropa yang akan menyeberang ke benua lainnya akan melewati Inggris.

Inggris meliputi dua per tiga pulau Britania Raya dan menerima batas darat di utara dengan Skotlandia dan barat dengan Wales. Sedangkan di selatan Inggris dipisahkan dengan Prancis oleh Selat Inggris. Letak astronomis $50^{\circ}\text{LU} - 61^{\circ}\text{LU}$ dan $11^{\circ}\text{BB} - 15^{\circ}\text{BB}$. Inggris adalah negara bagian terbesar dan terpadat penduduknya dari negara-negara bagian yang membentuk Persatuan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara (*United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*). Negara-negara lainnya adalah Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Sering kali nama Inggris dipakai untuk menyebut keseluruhan negara ini. Inggris yang wilayahnya meliputi dua per tiga pulau Britania, berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan dengan Wales di sebelah barat. Berbeda dengan Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara, Inggris tidak memiliki pemerintahan dan parlemen lokal (setingkat dengan DPRD) sendiri.



Gambar 7.3. Letak Kota London di Jantung Negara Inggris
Sumber: Wikipedia.com

Pada mulanya ibu kota Inggris di Verulamius letaknya 30 kilometer ke arah hulu (London). London sejak dulu memang kota yang paling besar, pernah diserbu dan dirusak oleh bangsa Anglo-Saxon serta Norman di zaman penjajahan Romawi. Lembah hilir Thames terbagi dua, yakni Wessex dan Danelew. Setelah akhirnya dikuasai para raja Anglo-Saxon, seluruh England dipersatukan kembali dan London tetap dipilih menjadi ibu kota baru.

Sejak Inggris dijadikan pendudukan tentara Romawi, pusatnya adalah di hilir *sungai Themes*. Sungai Thames adalah sebuah sungai yang mengalir di selatan Inggris dan menghubungkan kota London dengan laut. Sungai sepanjang 356 kilometer dengan luas perairan mencapai 12,935 km² ini bermuara di laut Utara.

London adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya pada saat ini. Kota yang dibangun oleh orang Romawi di masa lampau dan dulu disebut *Londinium* ini pada 1 Januari 2005 berpenduduk sekitar 7,4 juta jiwa di daerah London Raya dan berjuta-juta jiwa lagi di daerah metropolitannya.

Penduduk London terdiri dari berbagai macam etnik, budaya, dan agama, serta berbicara dalam hampir 300 bahasa, yang menjadikannya kota paling kosmopolitan dan dinamis di dunia. London Raya meliputi daerah seluas 609 mil persegi atau 1.579 km². Awalnya, London didirikan di daerah utara Sungai Thames dengan sebuah jembatan, London Bridge. Pada abad ke-18 saat banyak jembatan dibangun, London mulai berkembang ke segala arah. London juga merupakan basis berbagai organisasi, institusi dan perusahaan yang berpengaruh di dunia. London juga merupakan percampuran antara tradisi dan teknologi, serta salah satu tujuan wisata utama.

London termasuk salah satu kota besar di dunia bersama New York, Paris, dan Tokyo. London juga sangat berkembang dalam

berbagai bidang seperti finansial, komunikasi, dan seni. London juga memiliki berbagai kastil, museum, gedung teater, gedung konser, galeri, bandara, stadion olah raga, dan istana.



Gambar 7.4 Sungai Thames di London dan Peta aliran Sungai Thames

Sumber: Wikipedia.org

Mengingat Inggris merupakan pulau atau kepulauan di lepas pantai barat daratan Eropa dan juga karena letak lintangnya, atmosfer Inggris memiliki kondisi iklim yang dipengaruhi laut serta arus laut panas (*Gulf Stream*) yang berasal dari arus ekuator utara di Samudra Atlantik. Dampak arus laut panas tersebut sangat kondusif bagi kehidupan di kawasan ini terutama bagi kegiatan perikanan. Oleh karena itu, Inggris memiliki armada perikanan yang besar dan maju. Untuk bidang pertanian, di Inggris ini saat ini mengalami masalah peningkatan produktivitas karena menyempitnya lahan pertanian yang disebabkan oleh semakin berkembangnya industri yang ada di negara ini. Dengan melihat sektor utama yang dikerjakan (sektor industri), Inggris termasuk negara maju.

3. Canberra (Australia)

Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Lebih dari 63% orang Australia tinggal di salah satu ibu kota negara bagian, atau di ibu kota negara. Kira-kira 71% penduduk Australia tinggal di kota yang jumlah penduduknya

lebih dari 100.000 orang. Kota-kota ini terdiri atas Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Newcastle, Canberra, Gold Coast City, Wollongong, Geelong, dan Hobart. Australia adalah salah satu negara di dunia yang kebanyakan penduduknya tinggal di kota.

Kebanyakan kota-kota di Australia terletak di sepanjang garis pantai. Kebanyakan orang Australia tinggal di daerah pantai sebelah timur dan selatan. Meskipun ada beberapa kota di daerah pedalaman, di sana penduduknya tidak banyak jumlahnya dan mereka terutama bekerja dalam bidang pertanian dan pertambangan. Perkecualian terhadap keadaan ini adalah kota Canberra, ibu kota negara Australia, yakni sebuah kota pedalaman yang penduduknya lebih dari 3,39 juta orang.

Tempat hunian ada di daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup, yaitu daerah sutropis selatan Australia (Tenggara dan Barat daya) yang terlatak pada sekitar 35⁰ LS. Iklim wilayah ini sesuai dengan pola hidup keseharian, sebab berdasarkan sejarah, sebagian besar penduduknya berasal dari migrasi penduduk Inggris yang mempunyai iklim sama yaitu subtropis. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang untuk digunakan sebagai daerah pertanian dan daerah hunian.

Salah satu wilayah pusat hunian (wilayah ekonomi) adalah daerah ACT, terletak di sebelah tenggara New South Wales. New South Wales adalah salah satu negara bagian Australia, negara bagian yang paling tua yang didirikan pada tahun 1788. Canberra mencakup area seluas 2.366 km² dan berciri bukit-bukit berwarna biru keabu-abuan di sebelah selatan dan barat, dengan Canberra yang berlokasi di sudut timur laut. Pegunungan yang memesona, hutan dan sungai yang bening serta perairan di Namadgi National

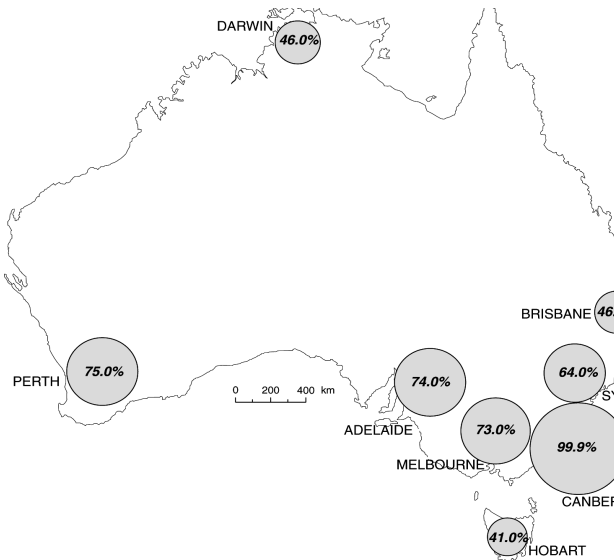
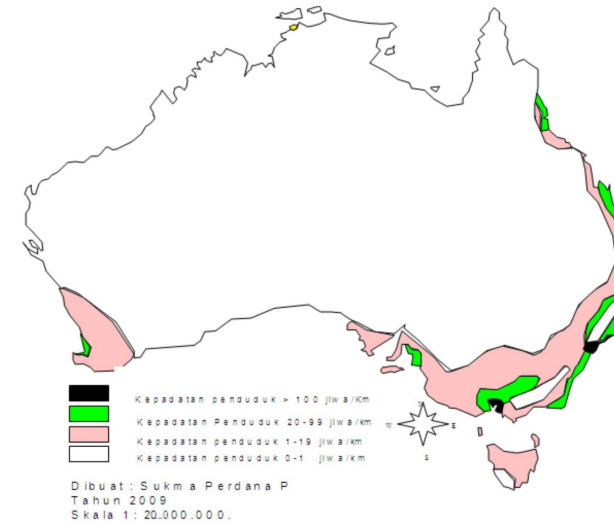
Park mencakup 40% wilayah teritorial ini. Canberra adalah ibu kota Australia yang terletak di Australian Capital Territory (ACT), 300 km sebelah barat daya Sydney dan 650 km timur laut Melbourne. Letaknya di antara dua kota terbesar di Australia dipilih pada 1908 sebagai kompromi atas persaingan Melbourne dan Sydney untuk menjadi ibu kota. Kota ini dirancang oleh arsitek Chicago, Walter Burley Griffin, dan pembangunan dimulai tahun 1913.

Dengan jumlah penduduk sekitar 3,339 juta, Canberra adalah kota terbesar ketujuh di Australia dan kota di daerah pedalaman yang paling besar. Sebagai pusat pemerintahan, di Canberra terdapat gedung parlemen dan berbagai kantor departemen. Walau begitu, peran sebagai pusat ekonomi dipegang oleh Sydney dan Melbourne.

Hari-hari musim panas di Canberra berkisar dari hangat sampai panas, meskipun suhu jarang mencapai 40° C. Hari-hari musim dingin terasa sejuk, dan terkadang sangat cerah dengan sedikit berangin, sering kali diawali dengan kabut dan embun beku kala pagi. Malam di musim dingin berkisar sekitar 0°C dalam bulan Juli. Canberra banyak menikmati sinar matahari dan mendapat curah hujan rata-rata tahunan sebesar 630 mm, dengan sebagian besar daripadanya jatuh di sebelah barat teritorial. Salju di kota agak jarang, paling banyak terjadi dua kali setahun, tapi lebih sering terjadi di area Namadgi National Park.

Dengan kondisi iklim yang demikian, membuat wilayah Canberra ini terasa berbeda dengan wilayah lain di Australia. Hal ini juga yang membuat Canberra menjadi wilayah yang cepat berkembang dibanding dengan wilayah lain di Australia. Ini karena daerah lain di Australia kebanyakan berupa gurun-gurun pasir kering yang merupakan daratan yang tidak subur dan jarang mendapatkan hujan.

Peta Kepadatan Penduduk Australia



Gambar 7.5 Konsentrasi penduduk Australia yang sebagian besar terletak di selatan (barat daya dan tenggara). Canberra menjadi Kota padat hunian di Australia. Sumber: Ensiklopedia, 2000.

Penduduk Canberra berjumlah 323.004 jiwa dengan kepadatan 401 jiwa/km², tergolong padat dibanding kota-kota lain di Australia. Sensus tahun 2001 menunjukkan bahwa 1,2% penduduk Canberra adalah orang-orang Aborigin sedangkan 21,6% adalah imigran yang lahir di luar Australia. Kelompok pendatang terbesar adalah dari negara-negara berbahasa Inggris, yang terbanyak Britania Raya dan Selandia Baru. Imigran-imigran lain juga datang dari Jerman, Skotlandia, Italia, dan Vietnam. Penduduk Canberra kebanyakan adalah yang berusia muda dan berpendidikan. Usia rata-rata penduduknya adalah 32 tahun dan penduduk yang berusia di atas 65 tahun berjumlah 8,3%. Bahasa ibu yang paling umum adalah bahasa Inggris namun penggunaan bahasa lainnya seperti bahasa Tionghoa, Italia, dan Kroasia juga lazim digunakan.

BAB VIII

BATAS NEGARA

A. Makna Penting Batas Bagi Negara

Batas digunakan untuk menentukan kepemilikan publik atau swasta dengan menentukan lokasi yang tepat di permukaan Bumi yang terbedakan dari yang lain. Batas juga digunakan untuk menandai fungsional dan berhubungan dengan hukum batasan politik suatu negara. Pengaturan batas merupakan karakteristik dari era sejarah modern yang terpusat pada negara-negara yang muncul baik diperlukan perlindungan terhadap serangan dan eksistensi kedaulatan negara. Garis batas yang ditetapkan oleh negara atau daerah, untuk menetapkan tata ruang yang luas. Hal ini dapat berkontribusi untuk identitas nasional dan rasa memiliki 'mengetahui satu dari tempat'. Secara historis, benda alam seperti sungai dan gunung melayani keperluan ini.

Dalam kaitan dengan konsep ruang, batas wilayah kedaulatan negara (*boundary*) amatlah penting di dalam dinamika hubungan antara negara/antarbangsa, karena batas antarnegara atau delimitasi sering menjadi penyebab konflik terbuka. Sungguhpun demikian, penentuan delimitasi telah diatur dalam berbagai konvensi internasional, akan tetapi latar belakang sejarah setiap bangsa/negara dapat memberikan nuansa politik tertentu yang mengakibatkan penyimpangan dalam menarik garis *boundary* tadi, dan akhirnya bertabrakan dengan negara lain. Kasus konflik

teritorial di antara negara-negara berkembang adalah contoh yang amat sangat nyata, sebab *boundary* yang ditetapkan oleh penguasa kolonial tidaklah sejalan dengan sejarah bangsa dan dengan aspirasi politik dari bangsa yang telah menjadi merdeka.

Perbatasan menggambarkan batasan-batasan sebagai satu kesatuan politis atau yurisdiksi sah tentang undang-undang atau aturan dari pemerintah suatu negara atau subnasional negara yang mengatur masalah administratif wilayah. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Wilayah dapat diartikan sebagai ruang di mana manusia yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya. Di dalam kondisi dunia yang sekarang ini, maka sebuah wilayah negara tentunya akan berbatasan dengan wilayah negara lainnya, dan di dalamnya akan banyak terkait aspek yang saling memengaruhi situasi dan kondisi perbatasan yang bersangkutan. Perbatasan negara sering kali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan Bumi yang memisahkan wilayah satu negara dengan wilayah negara lainnya. Sejauh perbatasan itu diakui secara tegas dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan tegas, maka

perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayah. Atas dasar itu pula, maka setiap negara berwenang untuk menetapkan batas terluar wilayahnya.



Gambar 8.1. Tembok Berlin sebagai batas pemisah Jerman Barat dan Jerman Timur
Sumber: Wikipedia.org

Dalam bahasa Inggris, perbatasan diistilahkan dengan kata *Boundary* dan *frontier*, dalam bahasa sehari-hari dua istilah itu merupakan sinonim tetapi dalam geografi politik tidak demikian halnya. *Boundaries* adalah garis-garis yang mendemarkasikan batas-batas terluar dari wilayah suatu negara. *Frontier* mewujudkan zona-zona (jalur) dengan lebar yang beraneka yang memisahkan dua wilayah yang berlainan negara. Baik dalam masa damai maupun masa peperangan perbatasan antara dua negara harus dijaga dengan macam-macam maksud, ini ada sangkut pautnya dengan pemerintahan, pajak, pertahanan serta perdagangan. Pengetahuan di perbatasan harus ada sebab tanpa itu akan timbul

berbagai kekuatan.

Perbatasan dinamakan *frontier* karena wilayah sebuah negara yang letaknya di *fronts* negara lain. Karena itu maka *frontier* dapat juga dibahasakan dengan istilah seperti *foreland* atau *borderland*. Adapun kata *boundary* dipakai karena fungsinya mengikat atau membatasi suatu unit politik, semua yang terdapat di dalamnya telah terikat menjadi satu. *Boundary* paling tepat dipakai jika negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat, karena suatu teritorial itu memiliki kedaulatan dan perintah oleh negara tertentu.

Dalam kaitan dengan konsep ruang, batas wilayah kedaulatan negara (*boundary*) amatlah penting di dalam dinamika hubungan antara negara/antarbangsa, karena batas antarnegara atau delimitasi sering menjadi penyebab konflik terbuka. Sungguhpun demikian, penentuan delimitasi telah diatur dalam berbagai konvensi internasional, akan tetapi latar belakang sejarah setiap bangsa/negara dapat memberikan nuansa politik tertentu yang mengakibatkan penyimpangan dalam menarik garis *boundary* tadi, dan akhirnya bertabrakan dengan negara lain. Kasus konflik teritorial di antara negara-negara berkembang adalah contoh yang sangat nyata, sebab *boundary* yang ditetapkan oleh penguasa kolonial tidak sejalan dengan sejarah bangsa dan dengan aspirasi politik dari bangsa yang telah menjadi merdeka.

Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa *boundary* tidak selamanya ditaati oleh penduduk perbatasan (terutama di daerah terpencil) yang dengan seenaknya mengadakan lintas batas untuk mengunjungi keluarga di seberang *boundary*, atau saling berdagang secara bebas seolah-olah tidak ada *boundary*. Interaksi dinamis antarpenduduk dua negara, atau interaksi dinamis antara dua budaya dapat membentuk satu batas semu atau *frontier* yang berbeda letaknya secara geografisnya dengan *boundary* aslinya.

Terbentuknya *frontier* di dalam ruang negara yang disebabkan oleh penetrasi pengaruh seberang *boundary*. Apa yang terjadi adalah daerah asimilasi di mana penduduknya lebih melirik ke seberang *boundary* dibandingkan kepada pemerintah daerah atau pusatnya sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Berbagai kasus yang ada di dunia ini, *frontier* terbentuk karena dua hal, yaitu, pertama, tidak cukup perhatian pemerintah pada daerah yang menjadi daerah asimilasi; kedua, tidak ada sarana sirkulasi yang cukup. Untuk sebab yang kedua, kelengkapan sarana sirkulasi (transportasi dan komunikasi) biasanya terjadi di daerah yang sukar dicapai atau daerah terpencil seperti daerah pengunungan, daerah hutan rimba, pulau terpencil, yang semuanya berada di daerah sepanjang perbatasan dengan negara lain sehingga mudah terkena penetrasi budaya, politik, ekonomi dan sebagainya. Semakin lama daerah asimilasi tidak ditangani atau diperhatikan oleh pemerintah maka ia bisa menjadi makin meluas; oleh karena itu *frontier* sifatnya sangat dinamis.

Frontier merupakan batas imajiner dari pengaruh asing dari seberang *boundary* (batas negara secara hukum) terhadap rakyat suatu negara. Ia sangat dinamis, dalam arti bisa bergeser-geser, dan berada di antara masyarakat bangsa. Atau dengan perkataan lain, secara politis dapat dikatakan bahwa pengaruh efektif dari pemerintah pusat tidak lagi mencakup seluruh wilayah kedaulatan melainkan dikurangi dengan luas wilayah sampai dengan batas *frontier* yang sudah dipengaruhi oleh kekuatan asing dari seberang *boundary*. Pengaruh asing itu bisa berawal dari pengaruh budaya atau dari pengaruh ekonomi, akan tetapi yang pasti adalah bahwa hal itu tidak ditangani dengan segera oleh pemerintah pusat maka akan berubah menjadi pengaruh politik yang akan berujung pada pemisahan diri dari wilayah sebatas *frontier*.

Pengalaman membuktikan bahwa selama ini, sejak 1976, perbatasan antara Timor Leste dengan NTT adalah *frontier* bagi Indonesia, sebab secara budaya Indonesia gagal menyerap masyarakat Timor Leste masih kedalam budaya NTT. Padahal mereka merupakan satu suku bangsa. Contoh lainnya adalah suku Kurdi yang telah membuat *frontier* di dalam negeri Turki dan Irak. Pemerintah secara militer membasmi suku Kurdi yang berada dalam *frontier* dengan maksud untuk menghilangkan sama sekali adanya *frontier* di dalam negara Turki.

Adanya *frontier* memang mengurangi ruang efektif yang berada dalam pengaruh pemerintah pusat, sehingga dampaknya hampir mirip dengan kehilangan sejengkal tanah yang berada di bawah kedaulatan. Atas dasar itu dapatlah dipahami reaksi keras dari pemerintah Turki atas suku Kurdi karena kehormatan dan kewibawaan negara dan bangsa Turki menjadi taruhannya. Dengan demikian jelaslah bahwa masalah adanya *frontier* merupakan masalah geopolitik yang menyangkut ruang.

Zaman sekarang, *frontier* dapat juga terletak di luar batas negara dikaitkan dengan kepentingan geopolitik yang memang harus menjangkau keluar wilayah kedaulatan. Globalisasi telah membawa serta munculnya transparansi masyarakat bangsa dari pengaruh luar, demikian rupa sehingga ketahanan nasional saja tidak cukup untuk menjamin keamanan dan rasa aman bangsa dan negara apabila tidak ditopang oleh keamanan regional. Begitu juga kerja sama bilateral saja tidak cukup kuat apabila tidak disertai dengan kerja sama regional dan internasional. Adanya kaitan secara sinergis berjenjang demikian itu membawa implikasi bahwa geopolitik harus memiliki dimensi internasional. Karena itu *frontier* dalam zaman sekarang ini harus pula diberi makna batas imajiner sejauh mana kepentingan nasional terjamin

pewujudannya atau pemenuhannya.

Perbatasan telah dimainkan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia sejak dahulu, hanya saja melalui wajah kekuatan militer. Pada era perang dingin ia berwajah hegemoni atau pun *containment strategy*. Akan tetapi esensinya sama yaitu *sphere of influence*, yang batas luarnya merupakan *frontier* dari negara besar yang menggelar *sphere of influence* tadi. Apabila dahulu *sphere of influence* selalu diciptakan dan ditegakkan melalui mekanisme politik dan militer, dalam perkembangannya sekarang ini ia dapat diciptakan melalui mekanisme ekonomi dan perdagangan. Lihat saja *sphere of influence* dari yen Jepang yang kini hampir meliputi kawasan Asia Pasifik bagian Timur, setidaknya seluruh Asia Tenggara berada di dalamnya. Singkatnya, *frontier* akan menjadi *sphere of influence* apabila ia terletak di luar batas negara. Kenyataan sekarang telah memaksa negara-negara dalam satu subkawasan bekerja sama untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat dengan cara meningkatkan *bargaining power*.

Dalam perdagangan global *bargaining power* tidak selalu berupa kelebihan dalam murahnya satu produk akan tetapi juga kelebihan dalam *conveniency* dan *security* dalam arti yang luas. Jelaslah hal ini akan lebih menguntungkan apabila ditawarkan oleh kerja sama regional, karena *conveniency* maupun *security* akan lebih terjamin. Oleh sebab itu, *frontier* yang terbentuk melalui kerja sama regional sesungguhnya merupakan satu *frontier* politik, dan apabila kerjasama regional terbentuk atas dasar kesamaan budaya atau agama maka dinamakan *frontier* budaya. Mengingat negara dapat dianggap sebagai satu organisme hidup, maka *frontier* semacam di atas dinamakan *frontier* organik yaitu bahwa adanya atau terbentuknya karena kebutuhan organisme yang bernama negara.

Perbatasan dalam arti *boundary* dan *frontier* mempunyai perbedaan khusus, yaitu:

- *Frontier* berorientasi keluar, *boundary* berorientasi ke dalam.
- *Frontier* pengejawantahan kekuatan sentrifugal, *Boundary* pengejawantahan kekuatan sentripetal.
- *Frontier* merupakan faktor integrasi antara negara-negara di satu pihak sedangkan *boundary* merupakan suatu faktor pemisah.
- *Frontier* bersifat transisional antara wilayah-wilayah geografi melebihi antarnegara dan negara. *Frontier* lebih bersifat geografis sedang *boundary* bersifat politis.
- *Frontier* bersifat masa lampau, sedangkan *boundary* lebih menyangkut masa kini.
- *Frontier* pada hakikatnya didasarkan pada alam, bahasa, agama atau etnik yang tidak dapat diubah. *Boundary* tak dapat diubah karena ada dua kekuatan sedang saling beradu.

Menurut Mitropoulos (2007), membedakan *border* sebagai suatu garis yang mengikat warga negara di mana seseorang berhenti di perbatasan, sedangkan *frontier* adalah suatu area tak terbatas untuk maju. *Border* relatif tetap dan stabil, *frontier* bergerak dan tidak pasti, yang satu adalah rintangan yang lain adalah kesempatan. Namun demikian *frontier* menghadirkan teritorial tanpa batas terhadap koloni. Sementara *frontier* begitu sering dipahami sebagai ruang ekspansi tanpa batas, ia juga mengatur batas-batas dalam bentuk *poliferasi border*. Maksudnya, tidak seperti *border* yang didefinisikan sebagai deliniasi ruang, *frontier* sebagai batas terluar pelepasan penduduk.

Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penganannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan semua bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di

daerah-daerah perbatasan apabila tidak dikelola akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan yang timbul sering dikarenakan adanya kesan jengjang sosial di dalam masyarakat, hal semacam inilah yang perlu untuk dihindari terutama bagi masyarakat apabila sudah menyangkut stabilitas dan keamanan nasional maka hal tersebut akan menjadi urusan pemerintah.

B. Klasifikasi Perbatasan Internasional

Perbatasan internasional dapat dibagi menjadi dua golongan (1) Sistem penggolongan fungsional dan (2) Sistem penggolongan morfologis

Sistem fungsional atau genetis didasarkan atas sifatnya relasi di antara garis-garis perbatasan dan perkembangan bentang lahan budaya (*cultural landscape*) dari negara-negara yang dibelah atau dipisah.

Di benua-benua baru seperti Amerika dan Australia, di sana garis-garis perbatasan digambarkan sejak awal, yakni jauh sebelum di situ tumbuh bentang budaya, karena belum dihuni oleh penduduk. Sebaliknya di benua lama, misalnya Eropa, garis perbatasan dibuat mengikuti gerak nafsu manusia (atau negara) yang ingin mendapatkan keuntungan dengan mengubah atau meluaskan wilayahnya.

1. Klasifikasi Fungsional

Terdapat empat jenis klasifikasi fungsional, yaitu:

a. Antecedent Boundaries (perbatasan duluan)

Klasifikasi ini dibuat di benua Amerika yang masuk di dunia baru, negara-negara baru saling bersaing mendahului

memasang batasnya yang terluar, lalu terjadilah perbatasan antara USA dan Kanada. Jadi terbentuknya sebelum terjadi bentang lahan budaya.

b. *Subsequent boundaries* (perbatasan susulan)

Klasifikasi ini terjadi setelah ada kultural *landscapes*, mengikuti perbatasan etnik kultural khususnya dalam hal bahasa dan agama. Terdapat di Eropa Timur dan antara India dan Pakistan atau Bangladesh.

c. *Superimposed boundaries* (perbatasan tumpukan)

Jika yang *subsequent* tadi konform dengan pembagian kultural antara masyarakat tertentu dan pembuatannya setelah ada perundingan bersama serta persetujuan antara beberapa negara yang bersangkutan, maka yang *superimposed* ini tidak konform dengan pembagian sosiokultural. Sebab di luar dua pihak yang semestinya berunding terdapat kekuasaan-kekuasaan (*power*) luar yang kuat berkepentingan. Ini terjadi pada negara-negara di Afrika yang sebenarnya muncul akibat dari zaman bertarungnya penjajah di masa lampau, misalnya perbatasan Ghana, Togho, Dahomay, Nigeria dan somalia.

d. *Relic Or Relic Boundaries* (perbatasan peninggalan)

Dengan istilah ini dimaksudkan perbatasan berupa garis yang telah kehilangan fungsi politisnya di bentang budaya. Hal ini terjadi apabila suatu negara kecil dilepas oleh negara besar lainnya. Misalnya batas yang dulu pernah ada antara Jerman Timur dan Rusia.

2. Klasifikasi Fisiologis

Dalam perbatasan fisiologis ada dua jenis perbatasan:

a. **Perbatasan alami (*natural boundaries*) adalah perbatasan yang mengikuti bentang alam kodrat:**

1) Perbatasan Maritim

Beberapa jenis batas maritim misalnya:

- Laut teritorial, merupakan sabuk dari pantai yang dikontrol oleh negara yang berdekatan dan hak-hak kapal orang asing harus tunduk kepada negara yang mengatur kawasan ini. Laut teritorial merupakan garis batas 12 mil diukur dari rendahnya air pasang di sepanjang pantai terluar di suatu negara. Negara berhak bertindak untuk mencegah atau menghukum pelanggaran terhadap peraturannya.
- Zona Landas Kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Sebagai contoh di Selat Malaka, batas landasan kontinen berimpit dengan batas laut teritorial, karena jarak antara kedua negara di tempat itu kurang dari 24 mil laut. Di Selat Malaka sebelah utara, batas landas kontinen antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia bertemu di dekat titik yang berkoordinasi 98° BT dan 6° LU. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969.
- Zona Ekonomi Eksklusif, diukur 200 mil dari rendahnya air pasang di sepanjang pantai terluar di suatu megara.

Pengelolaannya tunduk kepada hak-hak kaum eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kehidupan laut, yang diberi kuasa oleh Konferensi PBB mengenai Hukum Laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

Pengaturan mengenai penetapan batas wilayah laut suatu negara dan berbagai kegiatan di laut sebenarnya telah termuat dalam suatu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 atau Hukum Laut PBB 1982). Dalam UNCLOS 1982 dikenal delapan zona pengaturan (*regime*) yang berlaku di laut, yaitu (1) perairan pedalaman (*internal waters*), (2) perairan kepulauan (*archipelagic waters*), (3) laut teritorial (*territorial waters*), (4) zona tambahan (*contiguous zone*), (5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), (6) landas kontinen (*continental shelf*), (7) laut lepas (*high seas*), dan (8) kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*).

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No 17/1985 dan memberlakukan UU No 6/1966 tentang Perairan Indonesia menggantikan UU No 4/Perp/1960 yang disesuaikan dengan jiwa atau ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Lebih lanjut, untuk keperluan penetapan batas-batas wilayah perairan Indonesia telah diundangkan PP No 38 tentang Daftar Koordinat

Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Adapun batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga meliputi: (1) batas laut teritorial, (2) batas zona tambahan, (3) batas perairan ZEE, dan (4) batas landas kontinen. Yang dimaksud laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan laut serta tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. ZEE adalah suatu wilayah perairan laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal; yang mana suatu negara pantai (*coastal state*) memiliki hak atas kedaulatan untuk eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang menyambung dari laut teritorial negara pantai melalui kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai ujung terluar tepian kontinen. Sayangnya, hingga saat ini penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga masih banyak yang belum tuntas.

Dari 10 negara yang wilayah lautnya berbatasan dengan Indonesia, baru antara Indonesia dan Australia yang batas-batas wilayah lautnya telah diselesaikan secara lengkap. Sementara dengan negara-negara tetangga lainnya baru dilaksanakan penetapan batas-batas landas kontinen dan sebagian batas-batas laut teritorial serta ZEE.

Kondisi semacam inilah yang sering menimbulkan konflik wilayah laut antara Indonesia dan negara-negara tetangga, seperti kasus Sipadan, Ligitan, dan Ambalat. Konflik yang terjadi akan

menimbulkan ketidakstabilan dan mengganggu pembangunan perekonomian pada wilayah tersebut. Belum adanya kepastian batas-batas wilayah perairan, menyebabkan kegiatan perekonomian kelautan, seperti perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri bioteknologi, pariwisata bahari, transportasi laut, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam lainnya, serta konservasi akan terhambat.

Batas laut menyediakan potensi subur bagi konflik internasional. Bahkan batas-batas laut yang telah diterima secara luas selama bertahun-tahun tiba-tiba dapat diabaikan. Misalnya, pada bulan Maret 1995, Kanada mengeksploitasi ikan di perairan internasional di luar Kanada hanya dari dua ratus mil (di luar ZEE). Menteri Luar Negeri Kanada Andre Ouellet, menyatakan bahwa Kanada mengalami bencana penurunan stok perikanan dalam beberapa tahun terakhir. Kanada mengabaikan moral dan memberi kewenangan untuk memperpanjang yurisdiksi untuk mengeksploitasi ikan di luar laut internasional dikenal batas laut 200 mil.

Konflik batas laut juga sempat terjadi tahun 1977 antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai batas laut di wilayah laut Alaska. Semula masing-masing negara mengklaim memiliki batas laut 200 mil di kawasan yang memiliki luas 1021 mil² tersebut. Kawasan laut Alaska ini diperebutkan karena berharga mempunyai potensi ikan yang besar dan kemungkinan ladang minyak dan gas bumi. Untuk mengatasi sengketa ini, pada bulan Juni 1990, Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani kesepakatan batas laut masing-masing negara sejauh 116 laut, yang diukur dengan panjang sama.

2) Perbatasan berupa pegunungan

Perbatasan jenis inilah yang paling disukai karena menurut

pengalaman sejarah, berbagai negara membuktikan manfaat yang besar dalam hal pertahanan. Perbatasan berupa pegunungan otomatis sifatnya juga stabil. Akan tetapi dengan kemajuan zaman yang membawa perubahan besar dibidang teknologi transportasi serta komunikasi, misalnya : pesawat terbang , keamanan belum begitu saja dijamin oleh perbatasan berupa pegunungan. Sekarang negara India meski memiliki Tembok Himalaya merasa tak aman terhadap invasi yang kadang dilancarkan oleh Cina lewat Tibet, karena Tibet masuk wilayah RRC.

3) Sungai-sungai sebagai batas Internasional

Banyak pula perbatasan yang diambil dari kenyataan sungai. Keuntungan ada tiga, yaitu sungai dapat dilukiskan dengan jelas pada peta, cukup sempit, jika dibandingkan gunung atau pegunungan, dan dapat cukup lebar, sehingga pada masa damai dapat bermanfaat bagi dua negara yang saling bertetangga untuk berdagang di masa perang ada jarak cukup untuk berhadapan.

Tetapi masalah perbatasan timbul jika pola alur sungai mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Misanya terjadi pergeseran terus garis perbatasan antara Amerika Serikat Meksiko yang mengikuti sungai Rio Grade.

4) Perbatasan berupa hutan, rawa-rawa dan gurun.

Tiga jenis morfologi ini dapat dijadikan perbatasan antara dua negara yang saling bertetangga atau antara dua atau lebih wilayah budaya. Dalam sejarahnya yang lama, gurun Sahara di Afrika sebenarnya merupakan pemisah antarbudaya yang didominasi oleh dunia mediteran (laut tengah) dan budaya Afrika (bagian selatan sahara).

Perbatasan antara budaya Finlandia dan budaya Rusia berupa

rawa-rawa yang berupa musim panas air terbuka, tetapi pada musim dingin bersambungan tertutup es atau salju.

b. Perbatasan buatan (*artificial boundaries*)

Perbatasan buatan adalah perbatasan yang dicanangkan berupa garis alami menerobos bentang alam berupa garis geometri mengikuti lintang dan bujur permukaan Bumi atau garis yang dibuat mengikuti batas-batas agama dan budaya penduduk. Yang termasuk perbatasan buatan antara lain:

1) Bandara Udara dan Pelabuhan

Untuk kepentingan kendali perbatasan, bandara udara dan pelabuhan laut juga juga digolongkan ssebagai perbatasan. Kebanyakan negara-negara mempunyai format beberapa perbatasan untuk mengendalikan dan membatasi Bergeraknya manusia, binatang, tumbuhan dan barang-barang ke dalam atau ke luar dari negeri.

Di bawah hukum internasional, masing-masing negeri biasanya diizinkan untuk menggambarkan kondisi-kondisi itu yang harus dijumpai oleh seseorang menurut hukum menyeberang perbatasannya oleh hukum sendiri, dan untuk mencegah para orang dari persimpangan perbatasannya ketika ini terjadi pelanggaran hukum itu semua .

2) Perbatasan Politik

Perbatasan politik mempunyai variasi dampak yang ditimbulkan. Banyak perbatasan negara di dunia mempunyai pos pemeriksaan ketat di mana penjaga mengendalikan perbatasan sebelum melintasi suatu wilayah negara.

Amerika Serikat (AS) telah membuat dan menambah ukuran garis batas antara AS-Kanada dan AS-Meksiko (sejauh 2000 mil).

Batas ini digunakan untuk mengendalikan masuknya terorisme (kartel narkoba internasional) dan merupakan perbatasan terpanjang di dunia yang memisahkan antara negara dunia pertama dengan negara dunia ketiga.



Gambar 8.2. Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko yang dijaga ketat dengan 9 titik. Sumber: Wikipedia.org.

Perbatasan bersejarah seperti Tembok Besar Negeri Cina, Garis Maginot, dan Tembok Hadrian di Roma. Tembok besar Cina sudah banyak sekali berperan terutama dalam bidang militer untuk menghalau serangan musuh. Tembok Hardian di Roma berguna untuk mendukung aktivitas ekonomi khususnya pengawasan (kontrol) keluar-masuknya komoditi barang, baik yang legal maupun ilegal. Pada sisi lain, suatu perbatasan seperti Garis Maginot digunakan seluruhnya untuk kepentingan militer terutama untuk mencegah akses masuknya tentara Jerman ke Prancis pada Perang Dunia II.

3) Perbatasan geometris

Perbatasan jenis ini berupa garis-garis lurus mengikuti garis lintang dan bujur Bumi. Hal ini ada di benua-benua Amerika Utara, Afrika dan Australia. Kebiasaan memasang perbatasan seperti di atas bertalian dengan dibukanya kawasan-kawasan baru sebagai wilayah jajahan di masa lampau. Bagi wilayah yang masih kosong penduduk, cara demikian mudah diterapkan. Ada juga garis lurus yang tiba-tiba menyimpang dalam arti membelok jika tumbuh aliran sungai. Dasar tindakan menggunakan perbatasan geometris adalah belum adanya nasionalitas di benua-benua baru itu. Bersamaan dengan itu, perkembangan ekonomi dan budaya mulai berkembang.



Gambar. 8.3. Tanda batas batu di [Passo San Giacomo](#) terletak antara [Val Formazza](#) di Italia dan [Val Bedretto](#) di Swiss. Sumber: Wikipedia.org.

4) Perbatasan Antropogeografi

Wilayah-wilayah yang berlainan bahasa, adat, agama, dan sebagainya yang sekaligus juga merupakan batas wilayah kebangsaan (nasionalitas). Di Asia garis batas berdasarkan agama tertentu juga dijadikan batas politis (negara). Misalnya dalam menentukan masuknya wilayah Bangladesh ke dalam negara Islam baru yang bernama Pakistan, kemudian wilayah tersebut disebut Pakistan Timur. Perbatasan antara Pakistan Barat dan India sulit juga penentuannya waktu itu karena penduduknya beragama campuran, yaitu Hindu dan Islam.

C. Permasalahan Kawasan Perbatasan Indonesia

Permasalahan kawasan perbatasan darat dirasakan lebih berat dan lebih rumit. Penegasan garis batas (*border lines*) antara Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan yang telah dikerjakan sejak 1975, sepanjang \pm 2004 km hingga saat ini belum tuntas diundangkan, karena ada permasalahan (perbedaan pandangan) pada sejumlah segmen batas yang belum disepakati. Demikian pula dengan perbatasan darat Indonesia di Papua (+ 715 km) dan Indonesia-Timor Leste di Pulau Timor (+ 150 km). Keberadaan garis batas yang sudah sah secara hukum sangat penting karena *border lines* ini merupakan prasarana utama penegakan wilayah kedaulatan negara sekaligus merupakan sarana perekat kesatuan bangsa.

Batas negara adalah sesuatu yang wajib adanya, karena menjadi satu persyaratan berdirinya sebuah negara yang menyebutkan adanya suatu wilayah yang pasti; yang tentunya jelas batas-batasnya. Bilamana batas yang legal/tetap belum dapat diwujudkan, paling tidak harus ada kesepakatan batas sementara (*provisional arrangement*). Tanpa adanya *border lines*,

pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di zona perbatasan akan sangat susah dicegah dan diberantas.

Faktor-faktor penyebab lemahnya kondisi perbatasan negara.

1. Kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga yang semakin tajam dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk perbatasan yang sangat jarang menyebabkan rendahnya aktivitas penduduk, bahkan pada kawasan pedalaman perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut yang letaknya sangat jauh dari pulau-pulau berpenduduk sama sekali tidak ada aktivitas.
2. Pergeseran batas wilayah negara (termasuk patok-patok) yang cenderung merugikan kepentingan ekonomi dan membahayakan kedaulatan RI (misal kasus Sipadan–Ligitan yang telah lepas atau kasus Pulau Miangas di Kepulauan Satal–Sulawesi Utara yang rawan sengketa).
3. Medan yang berat dan jauhnya kawasan perbatasan dari pusat-pusat pemerintahan serta permukiman penduduk, memberikan peluang yang besar terjadinya *border crimes* seperti: maraknya *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal labour* dan berbagai penyelundupan lain dari kota-kota perbatasan (misal Nunukan–Malaysia, Tahuna–Davao, Batam–Singapura, Dumai Malaysia, dan sebagainya), yang mengakibatkan hilangnya potensi devisa RI yang cukup besar.
4. Keterbatasan kemampuan dan kekuatan aparaturnya keamanan perbatasan menyebabkan lemahnya pencegahan, penangkalan dan pemberantasan aktivitas pelanggaran batas dan kejahatan yang terjadi di daerah perbatasan. Pelayanan prasarana dan sarana wilayah pada pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan laut masih sangat terbatas sehingga kawasan tersebut menjadi relatif terisolasi.
5. Potensi ekonomi pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan belum dikembangkan secara optimal, misalnya potensi

pengembangan sektor-sektor unggulan, pusat-pusat pertumbuhan, berikut *outlet-outletnya*. Pada saat ini, sebagian besar kawasan perbatasan laut dapat dikelompokkan statusnya.

BAB IX

BENTUK KONFLIK DAN KLAIM DALAM KEPENTINGAN TERITORIAL

A. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari dari Bahasa latin ‘configure’ yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (kelompok/negara) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain. Dalam praktis politik demokrasi, konflik atau perbedaan kepentingan, persepsi, interpretasi terhadap mekanisme pemilu sebetulnya tidak saja mengandung nilai-nilai positif pembelajaran politik, melainkan juga merupakan strategi politik yang sering dipraktikkan banyak negara demokratis. Konflik dalam praktis politik sebetulnya tidak mungkin dihindari. Perlu diketahui bahwa bukanlah apakah konflik itu ada atau tidak ada, tapi bagaimana intensitas dan tingkat kekerasannya, dan dalam bentuk apa konflik itu. Apakah menyangkut masalah fundamental atau isu-isu sekunder, pertentangan tajam atau sekadar perbedaan pandangan.

Teori konflik telah diulas dan dikembangkan oleh banyak sosiolog. Mereka antara lain, Karl Marx, Ralf Dahrendorf, George Simmel, dan Lewis Coser. Teori Konflik yang digagas oleh Marx didasarkan pada kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis

yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Bagi Marx, dalam masyarakat terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan, yakni kaum borjuis yang menguasai sarana produksi ekonomi dan kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis. Antara kedua kelompok ini selalu terjadi konflik. Dalam *The Communist Manifesto*, Marx mengatakan, "Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas," yaitu kelas buruh melawan kelas borjuis, yang pada akhirnya akan dimenangkan kaum proletar, sehingga tercipta tatanan masyarakat tanpa hierarki, yakni komunisme. Karl Marx melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik.

Penerus gagasan Marx, di antaranya adalah Ralf Dahrendorf. Dia melakukan revisi atas pemikiran Marx. Baginya, pengelompokan kelas sosial tidak lagi hanya didasarkan atas pemilikan sarana-sarana produksi, tetapi juga atas hubungan-hubungan kekuasaan. Terdapat sejumlah orang yang memiliki dan turut serta dalam struktur kekuasaan, terdapat pula yang tidak masuk kekuasaan. Menurut Dahrendorf, sebagai koreksi atas pemikiran Marx, telah terjadi dekomposisi modal (menimbulkan kesulitan mengidentifikasi kaum borjuis yang monopolistis karena para pegawai pun kini ikut memiliki saham perusahaan); dekomposisi tenaga kerja (kaum proletar tidak lagi homogen; secara hierarkis di antara mereka tersebar menempati posisi tertentu), dan timbulnya kelas menengah baru (karena terjadinya peningkatan kesejahteraan di kalangan kaum buruh).

Terkandung tiga konsep penting dalam memandang suatu konflik, yaitu: kekuasaan, kepentingan, dan kelompok sosial. Dalam hubungan antarnegara, konflik terjadi berdasarkan kepentingan sebagai berikut.

1. Bersifat Ekonomi: hubungan dagang, perluasan daerah pasaran, kepentingan investasi, sumber bahan mentah dan lain-lain.
2. Bersifat Teritorial: konflik teritorial adalah jenis konflik yang paling umum dan sudah berlaku sepanjang sejarah. Perang antarnegara mempertahankan daerahnya (teritorialnya) adalah contoh jelas dari jenis konflik ini.
3. Bersifat Kultural: hubungan kebudayaan, teknologi, migrasi penduduk dan perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di wilayah lain.
4. Bersifat Politik: perlindungan terhadap agresi negara lain, perluasan pengaruh, ideologi dan lain-lain.

B. Penyebab Konflik

1. Perbedaan individu: perbedaan pendirian dan perasaan.
2. Perbedaan latar belakang kebudayaan.
3. Perbedaan kepentingan.
4. Tingkatan hierarki.
5. Perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.



Gambar 9.1 Konflik abadi Palestina-Israel dimulai tahun 1000 SM
Sumber: milis FUSI-FTUI

C. Jenis Konflik

1. Konflik peran sosial, misal peran dalam keluarga atau profesi.
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
3. Konflik antara kelompok terorganisasi dan non terorganisasi.
4. Konflik antarsatuan nasional.

D. Proses Suatu Konflik

1. *Antecedent Condition or Latent Conflict*: konflik berpotensi untuk muncul, tapi dalam kenyataannya tidak terjadi.
2. *Perceived Conflict*: masing-masing pihak menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam pada batas-batas tertentu.
3. *Felt Conflict*: diragukan kepercayaan terhadap pihak lain sehingga segala sesuatu dianggap ancaman.
4. *Manifest Conflict*: persepsi atau perasaan membuat orang bereaksi terhadap situasi tersebut.
5. *Conflict resolution or Suppression Conflict Resolution*: kedua belah pihak mungkin mencapai persetujuan, tetapi terkadang justru terjadi pengacuan (*suppression*) dari konflik di mana salah satu pihak mengalah pada yang lain.
6. *Conflict Alternative*: konflik yang terselesaikan terkadang dapat menimbulkan ketidakpuasan atau kepuasan.

E. Klaim Teritorial

Teritorial ditafsirkan sebagai hubungan mendasar antara kedaulatan negara dengan tanah air nasional yang terletak di jantung legitimasi dan praktik negara modern. Klaim teritorial terwujud karena setiap negara berkepentingan terhadap daerahnya yang menurut anggapannya menguntungkan dan beralasan untuk dipertahankan dan dikuasai.

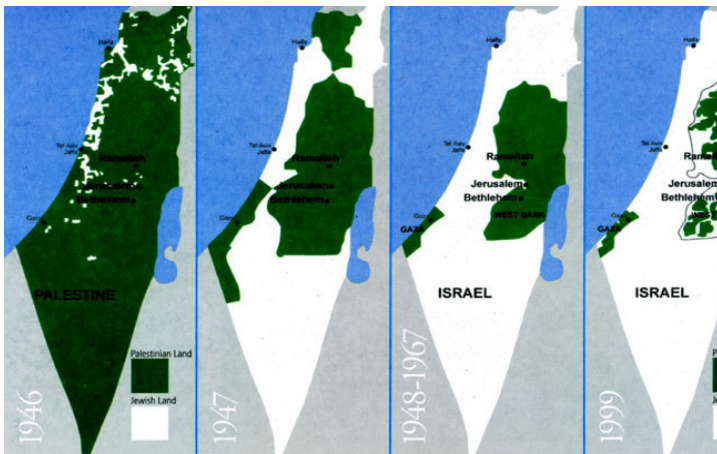
1. Sifat Klaim:

- a. Klaim strategis: penguasaan terhadap daerah yang mempunyai kelebihan letak strategis.

- b. Klaim bersifat ekonomi: tuntutan terhadap daerah-daerah kaya.
- c. Klaim perluasan teritorial: terjadi di daerah-daerah perbatasan, bisa melalui pendudukan (okupasi) atau pencaplokan (aneksasi).
- d. Klaim geografis: daerah yang diklaim secara geografis merupakan daerah yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan daerah yang menuntutnya.
- e. Klaim atas dasar etnis: daerah-daerah yang etnisnya sama.
- f. Klaim atas dasar agama.
- g. Klaim atas dasar faktor sejarah.

2. Cara-cara dalam Melakukan Klaim:

- a. Dengan taktik,
- b. Dengan jual-beli,
- c. Penemuan dan pendudukan daerah baru,
- d. Pembentukan negara-negara satelit,
- e. Pembentukan pemerintahan tandingan,
- f. Peperangan perebutan wilayah,
- g. Pelaksanaan konfrontasi.



Gambar 9.2 Klaim territorial Israel terhadap Palestina dengan cara peperangan dan konfrontasi (Zionisme). Sumber: mili FUSI-FTUI.

Konflik di Palestina merupakan contoh konflik kedaulatan, di mana hak teritorial Palestina telah dirampas dan diduduki oleh Israel secara sepihak, sedangkan warga Arab-Palestina harus terdesak dan menyingkir dari tanah kelahiran mereka. Penduduk Arab-Palestina merupakan mayoritas di negara itu, sampai dengan terbentuknya Israel sebagai sebuah negara Yahudi pada tahun 1948. Negara Israel yang dicita-citakan hanya akan dapat terwujud dengan cara menghapus hak-hak kaum mayoritas, atau membuat kaum Yahudi menjadi mayoritas melalui imigrasi, atau mengurangi jumlah penduduk Arab di Palestina melalui cara pembersihan etnik.

Zionis menempuh beberapa strategi untuk mencapai tujuannya, antara lain:

1. melalui imigrasi orang Yahudi; pada saat awal itu banyak kaum Zionis dan para pendukungnya yang benar-benar percaya bahwa imigrasi orang Yahudi dalam jumlah besar akan dapat dalam waktu singkat memecahkan “masalah Palestina” dengan membangun masyarakat Yahudi sebagai mayoritas.
2. keyakinan bilamana sejumlah petani dan buruh-buruh Arab-Palestina ditutup kesempatan kerjanya, maka hasilnya akan memaksa orang Arab-Palestina bermigrasi meninggalkan Palestina.
3. bangsa Yahudi berupaya keras mendapatkan dukungan dunia internasional terutama Amerika Serikat, sekaligus untuk mendapatkan legitimasi terhadap klaim kaum Yahudi sebagai pemilik wilayah terhadap hal-hak kaum mayoritas penduduk Arab-Palestina.

Contoh lain dari kegiatan klaim teritorial adalah pada wilayah Antartika. Beberapa negara, terutama yang letaknya tidak jauh dari Antartika pada awal abad ke-20 mengklaim beberapa wilayah

Antartika tidak mengakui klaim-klaim ini dan sebagian besar negara di dunia tidak mengakui wilayah-wilayah ini. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Rusia tidak atau belum mengklaim wilayah tetapi menyatakan bisa mengklaim wilayah pada masa depan.

- **Argentina:** 25° B sampai 74° B; sebagian meliputi wilayah Chili dan Britania. Antartika Argentina diklaim pada tahun 1943 sebagai bagian wilayah provinsi “Terra Fuega, Antartika dan kepulauan Atlantika Selatan.
- **Australia:** 160° T sampai 142° T dan 136° T sampai 45° T; diklaim pada 1933 sebagai Teritorium Antartika Australia.
- **Britania Raya:** 20° B sampai 80° B; meliputi wilayah Argentina dan Chili. Diklaim pada tahun 1908, lihat pula Teritorium Antartika Britania.
- **Chili:** 53° B sampai 90° B; juga meliputi wilayah Argentina dan Britania; mulai tahun 1940.
- **Prancis:** 142° T sampai 136° T; tanah Adelle diklaim pada 1924.
- **Selandia Baru:** 150° B sampai 160° T; Dependensi Ross diklaim pada 1923.
- **Norwegia:** 45° T sampai 20° T; diklaim pada 1938 sebagai Tanah Dronning Maudland, termasuk pulau Peter I.
- Wilayah antara 90° B dan 150° B belum diklaim siapa-siapa.

F. Konflik Kepentingan Teritorial

Perjuangan untuk mempertahankan hidup mendorong setiap negara untuk selalu berusaha memperluas wilayah teritorialnya.

Pada umumnya kepentingan teritorial didorong oleh motivasi ekonomi.

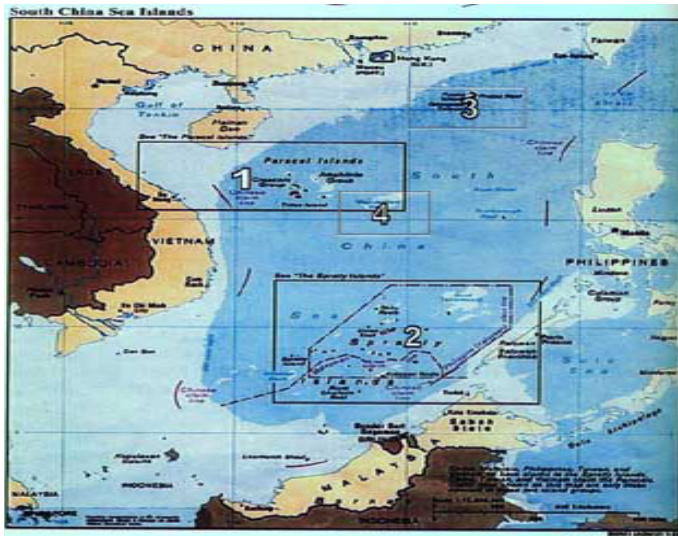
1. Eksploitasi sumber bahan mentah di daerah jajahan.
2. Perluasan daerah pasaran, pelemparan hasil-hasil industri.
3. Daerah atau tempat investasi modal.

Di abad XX konflik dalam kepentingan teritorial, selain masih bersifat pendudukan terhadap wilayah lain (seperti pendudukan Israel terhadap Palestina), juga marak terjadi sengketa konflik perbatasan dalam rangka mempertahankan dan memperluas teritorialnya.

Akibat sengketa teritorial perbatasan di Asia Pasifik, hingga saat ini masih banyak negara menghadapi persoalan perbatasan dengan tetangganya yang belum terselesaikan lewat perundingan. Bahkan kebiasaan menunda penyelesaian masalah justru menambah rumit persoalan. Beberapa persoalan perbatasan dan "*dispute territorial*" yang cukup mengusik harmonisasi antarnegara maupun keamanan kawasan, antara lain:

1. Sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai garis perbatasan di perairan laut Sulawesi menyusul perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, dan garis perbatasan di pulau Kalimantan (salah satunya mengenai blok Ambalat);
2. Perbedaan pendapat dan kepentingan antara Indonesia, Australia dan Timor Leste di perairan Celah Timor;
3. Konflik historis antara Malaysia dan Filipina mengenai klaim Filipina atas wilayah Kesultanan Sabah Malaysia Timur;
4. Konflik antara Malaysia dan Singapura tentang pemilikan Pulau Batu Putih (Pedra Branca) di Selat Johor;
5. Ketegangan sosial politik laten Malaysia dan Thailand di wilayah perbatasan;
6. Perbedaan pendapat antara Malaysia dan Brunei Darussalam mengenai batas wilayah tak bertanda di daratan Sarawak Malaysia Timur serta batas wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif;
7. Perbedaan pendapat antara Malaysia dan Vietnam mengenai batas wilayah di perairan lepas pantai dari masing-masing negara;
8. Konflik berlarut antara Myanmar dan Bangladesh di wilayah perbatasan; Ketegangan antara Myanmar dan Cina mengenai batas wilayah kedua negara;

9. Sengketa Myanmar dan Thailand, mengenai perbatasan kedua negara;
10. Sengketa berlarut antara Cina dengan India mengenai perbatasan kedua negara;
11. Konflik antara Vietnam dan Kamboja di wilayah perbatasan kedua negara;
12. Sengketa antara Cina dan Vietnam tentang pemilikan wilayah perairan di Kepulauan Paracel;
13. Konflik laten Kepulauan Spratly antara Cina di satu pihak dengan Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam di lain pihak sehubungan klaim Cina atas seluruh perairan Laut Cina Selatan. Kepulauan Spratly dianggap penting untuk diperebutkan karena dari segi perdagangan dan pertahanan dianggap strategis (merupakan jalur kapal perdagangan internasional) dan memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak, gas dan tambang lainnya;
14. Konflik intensitas rendah (*low intensity*) antara Cina dengan Filipina, Vietnam dan Taiwan mengenai status pemilikan wilayah perairan Kepulauan Spratly;
15. Konflik antara Cina dengan Jepang mengenai pemilikan Kepulauan Senaku (Diaoyutai);
16. Sengketa antara Cina dengan Korea Selatan mengenai pemilikan Liancourt Rocks (Take-shima atau Tak do) di bagian selatan laut Jepang;
17. Konflik antara Cina dengan Korea Selatan mengenai batas wilayah perairan teritorial;
18. Sengketa berlarut antara Rusia dengan Jepang mengenai status pemilikan Kepulauan Kuril Selatan;
19. Sengketa antara Cina dengan Taiwan sehubungan rencana reunifikasi seluruh wilayah Cina oleh RRC;
20. Sengketa India dan Pakistan mengenai status wilayah Kashmir.



Gambar 9.4. Kelompok Gugus. Sumber: International Herald Tribune.

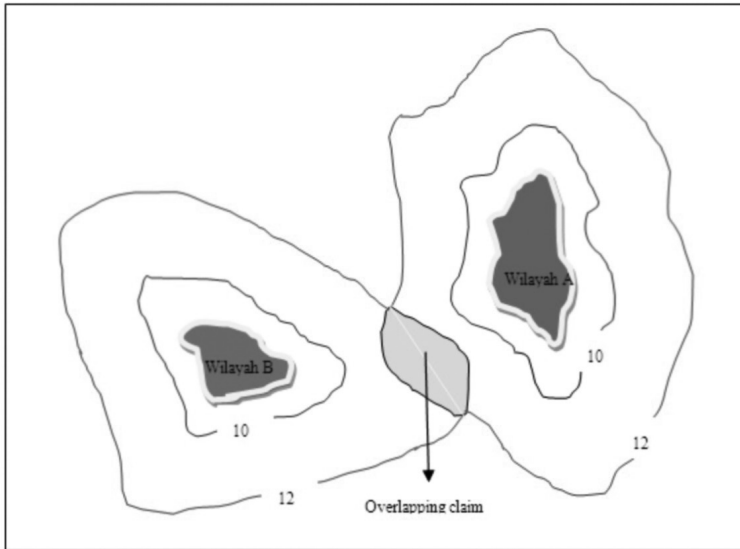
1. Kepulauan Parcel
2. Kepulauan Spratly (konflik 6 negara)
3. Kepulauan Pratas
4. Kepulauan Macclesfield



Gambar 9.5 Sengketa wilayah Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat
 Sumber: International Herald Tribune.

Masalah lain yang perlu diperhatikan oleh negara Indonesia adalah tumpang tindih/*Overlapping claim* wilayah maritim antara dua negara atau lebih terjadi karena jarak antara titik terluar antarnegara tersebut lebih pendek dari batas terluar klaim maritim yang dapat dilakukan. Di Selat Malaka misalnya, jangankan untuk mengklaim ZEE, untuk mengklaim Laut Teritorial dan Zona Tambahan saja, Indonesia sudah akan melampaui wilayah Singapura dan Malaysia. Sementara itu, Malaysia dan Singapura juga memiliki hak untuk mengklaim wilayah maritim di Selat Malaka. Terjadilah *overlapping claim* yang memerlukan adanya delimitasi batas maritim antarnegara. Situasi ini diilustrasikan dalam Gambar 9.6 (untuk kasus dua negara yang berseberangan,

opposite) dan Gambar 9.7 (untuk kasus dua negara yang bersebelahan, *adjacent*).



Gambar 9.6 Visualisasi *overlapping claim* antara dua negara yang berseberangan (*opposite*). Sumber: International Herald Tribune.



Gambar 9.7. Visualisasi *overlapping claim* antara dua negara yang bersebelahan (*adjacent*). Sumber: International Herald Tribune.

G. Geostrategi Indonesia dalam Kepentingan Teritorial

Pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama Ketahanan Nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya, maka ia menjadi amat berbeda wajahnya dengan yang digagaskan oleh Haushofer, Ratzel, Kjellen dan sebagainya.

Indonesia tentu patut mewaspadaikan perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik. Sebab

konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional, maka setiap pergolakan berapa pun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat, misalnya, sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia. Karenanya, sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan nusantara, seperti, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai Wetar, dan lain-lain.

Pasukan Bela Diri Jepang secara berkala dan teratur mengadakan latihan operasi jarak jauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai "*life line*" yakni, radius sejauh 1.000 mil laut hingga menjangkau perairan Asia Tenggara. Hal yang sama juga dilakukan Cina, Australia, India, termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di sekitarnya (termasuk Indonesia).

Keberadaan Indonesia dipersilangan jalur pelayaran strategis, memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara. Karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memerhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya, sangat khawatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan angkatan laut, yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan nusantara.

Penetapan sepihak selat Sunda dan selat Lombok sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Inggris dan Selandia Baru. Tentu apabila dua selat ini menjadi

perairan teritorial Indonesia, maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk kepada hukum nasional Indonesia, tanpa mengabaikan kepentingan internasional.

Hal yang patut dicermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini terbelit konflik sosial berkepanjangan (manifes maupun laten) umumnya adalah daerah yang berada di jalur pelayaran internasional, seperti, Bali, Lombok, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, Aceh, Papua dan lain-lain.

Kenyataan ini patut diwaspadai karena tidak menutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini. Jika Indonesia gagal mengatasinya, dan konflik yang terjadi berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional, maka berdasarkan ketentuan internasional, negara asing diperbolehkan menurunkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia.

Dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut, sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk satuan reaksi cepat yang disebut "*Stand By High Readness Brigade*" (SHIRBRIG) berkekuatan 4.000 orang yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai "*muscular peace keeping force.*"

Geostrategi yang dikembangkan negara Indonesia '*idea*' atau ide dasar adalah awal mula satu tatanan pemikiran yang pada ujungnya berupa tindakan nyata dalam masyarakat yang bernegara atas dasar komitmen para pendiri Republik ini. Ide yang dijadikan acuan bersama adalah terbentuknya masyarakat yang berasaskan kekeluargaan dengan atribut tata laku sebagaimana berlaku pada umumnya di antara masyarakat timur. Paternalistik, gotong royong, mendahulukan kepentingan bersama, adalah di antara

atribut lainnya yang menjadi ciri khas masyarakat Timur tadi. Apabila selanjutnya ide dasar harus dijadikan acuan masyarakat bangsa dalam bertata laku, maka dapat dikatakan bahwa ia telah berubah dari satu ide menjadi pandangan hidup yang operasional; dan apabila pandangan hidup tadi diberikan kerangka ilmiah dan dikodifikasikan secara jelas maka terbentuklah satu falsafah bangsa. Apabila falsafah bangsa dijadikan landasan negara, maka ia akan mewujudkan sebagai satu ideologi negara. Untuk Indonesia, pandangan hidup berbangsa, falsafah bangsa, maupun ideologi negara semua diberi nama yang sama, yaitu Pancasila.

Tidak semua negara memiliki ideologi negara karena ia memang bukan salah satu syarat utama berdirinya negara. Akan tetapi bagi negara yang memiliki ideologi, ia selalu menjadi acuan bagi seluruh sistem yang ada maupun tata laku masyarakatnya. Apabila disimak lebih dalam, ideologi negara Indonesia bukanlah berupa satu uraian ilmiah yang panjang, tetapi lebih merupakan patok-patok yang membatasi koridor dinamika masyarakat Indonesia. Apabila dilihat dari segi itu, maka dapat juga ditafsirkan bahwa kelima sila tersebut lebih berupa sebagai uraian cita-cita nasional daripada satu rangkuman pemikiran atau falsafah.

Sebagai satu kumpulan cita-cita, ia harus dikejar dan diupayakan agar secara bertahap dapat diwujudkan. Misalnya, Sila Persatuan Indonesia, keadaan Indonesia saat ini memang amat jauh dari cita-cita itu, akan tetapi tidak berarti bahwa hal tersebut tidak dapat diwujudkan dikemudian hari.

Dalam rangka pencapaian cita-cita tersebut, seluruh bangsa dihadapkan pada berbagai jenis kendala, seperti pluralisme masyarakat, konfigurasi geografis maupun keadaan dinamika lingkungan strategis yang dampaknya tidak mungkin diabaikan. Oleh karena itu, berbagai prasyarat harus dipenuhi agar perjalanan

pencapaian cita-cita itu terjamin. Prasyarat semacam itu disebut geopolitik, yang bagi Bangsa Indonesia dirumuskan secara singkat dalam bentuk Wawasan Nusantara.

Pada intinya Wawasan Nusantara mengisyaratkan perwujudan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam sebagai satu prasyarat seutuhnya. Makna sesungguhnya akan pentingnya inti sari geopolitik itu amat terasa saat menjelang maupun setelah berakhirnya Orde Baru di mana seakan-akan segala bentuk kesatuan (dan juga persatuan) ditenggelamkan di bawah emosi kesukuan, keagamaan maupun kepolitikan. Bahkan seolah-olah negara kesatuan pun akan ditelan habis oleh emosi tersebut. Adakah ramalan Huntington benar? Ataukah Bangsa Indonesia lalai melaksanakan *nation and character building* sehingga pemahaman tentang *kebangsaan* dan *negara bangsa* di kalangan generasi muda sama sekali tidak ada bekasnya. Ataukah sistem pendidikan Indonesia telah mencair, dan yang tinggal hanyalah sekadar sistem pengajaran saja. Apa pun penyebab atas kejadian-kejadian saat itu, nyatanya bangsa dan negara Indonesia telah terpuruk dalam pergaulan antarbangsa dan terkesan tentang adanya kemerosotan etik dan moral yang ditandai antara lain oleh pembunuhan sesama anak bangsa.

Keterpurukan ini menandakan bahwa apabila prasyarat geopolitik tidak terpenuhi, maka jangan diharapkan cita-cita proklamasi akan tercapai. Apabila ditelusuri lebih jauh, maka dapatlah dipahami bahwa setelah prasyarat dipenuhi maka diperlukan satu metode umum atau strategi guna mewujudkan cita-cita di atas. Metode tersebut dinamakan geostrategi, yaitu satu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik (cita-cita nasional). Sedangkan upaya itu akan terwujud sebagai program-program di dalam pembangunan

nasional. Bagan berikut menunjukkan tatanan dan sekaligus tataran pemikiran yang ada mulai dari ide tentang kekeluargaan dan kebersamaan hingga metode pelaksanaan pembangunan.

Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk Ketahanan Nasional yang unsur-unsur utamanya terdiri dari kualitas *keuletan* dan kualitas *kekuatan/ketangguhan*. Keuletan sesungguhnya merupakan satu kualitas integratif yang menunjukkan adanya kebersamaan di antara sesama komponen yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Keuletan diperlukan dalam menghadapi tantangan/tekanan dari luar yang harus dihadapi secara elastis, konsisten dan berlanjut. Tanpa adanya kualitas keuletan maka jaringan sosial masyarakat akan retak, atau bahkan putus, apabila dihadapkan pada tantangan/tekanan yang berkepanjangan. Keuletan masyarakat diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat karena masyarakat memiliki kelenturan yang mampu menyerap tekanan kesulitan ekonomi.

Keuletan masyarakat dapat diandaikan dalam bahasa mekanika seolah-olah sebagai koefisien, kelenturan pegas, yang tentu memiliki ambang batas, di mana tekanan dari luar tidak lagi dapat ditahan dan pegas pun akan kehilangan kelenturannya dan patah. Sebaliknya, unsur kekuatan/ketangguhan merupakan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dari masyarakat bangsa ke arah tata kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Semakin tinggi kualitas/ketangguhan maka semakin besar pula tekanan yang dapat ditahan dan dilawan. Tanpa adanya kualitas ini masyarakat akan stagnan, dan apabila hal ini terjadi maka lama kelamaan akan mundur dimakan waktu.

Kekuatan atau ketangguhan untuk berkembang merupakan kualitas kemampuan yang harus dimiliki setiap masyarakat bangsa, sebab kebutuhan dan kepentingan meningkat setiap saat

sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk maupun tingkat kesejahteraannya. Tiap generasi anak bangsa mengharapkan, dan ini sangat wajar, bahwa kehidupan di kemudian hari lebih baik dari generasi di atasnya. Ini adalah sikap positif terhadap kemampuan bangsa secara keseluruhan karena dengan demikian tiap generasi termotivasi secara positif untuk mengembangkan dirinya sejalan dengan tuntutannya sendiri. Pemenuhan kebutuhan itu merupakan bagian dari penciptaan rasa aman dan keamanan (sekuriti) bangsa.

Namun demikian, dalam pencapaian cita-cita itu satu masyarakat bangsa tidak berada dalam ruang hampa, melainkan berada di tengah masyarakat kawasan (atau subkawasan) di sekitarnya. Karena itu, pencapaian cita-cita harus didasarkan atas pertimbangan lingkungan, apalagi dalam zaman global yang tanpa batas ini. Selain itu, perlu juga disadari bahwa peningkatan keamanan (sekuriti), dari sisi militer, untuk pengamanan satu bangsa pada dasarnya dapat meningkatkan rasa tidak aman (*insecurity feeling*) dari bangsa sekitarnya, sehingga kesadaran ruang sangat diperlukan. Dalam upaya melindungi teritorial negara sebagai stabilitas pembangunan nasional, geopolitik dan geostrategi harus dijadikan pedoman yang tidak boleh sekali-kali dilupakan. Tidak hanya oleh para perencana, tetapi oleh Indonesia seluruh anak bangsa.

BAB X

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK NEGARA

A. Definisi Globalisasi

Globalisasi berasal dari kata “global” yang artinya menyeluruh/mendunia dengan “isasi” yang artinya proses. Jadi secara keseluruhan arti globalisasi adalah proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi hadir dalam rentangan waktu yang cukup panjang, bercirikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan kecerdasan, dan pendidikan rakyat berikut kesejahteraan kewargaan dan sosial ekonominya. Globalisasi sering diartikan sebagai interaksi antarmanusia di muka Bumi yang sudah semakin intensif karena kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi. Globalisasi merupakan suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas-batas wilayah negara yang mengikat secara nyata, sehingga sulit untuk disaring atau dikontrol.

Era globalisasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan lebih besar pada prakarsa dan kreativitas melalui berbagai infrastruktur ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan sosial. Globalisasi membuat batas-batas antarnegara

semakin kabur sehingga meningkatkan mobilitas dan dinamika masyarakat, termasuk timbulnya gagasan-gagasan baru di berbagai bidang dan aspek-aspek globalisasi dalam satu kepentingan global yang melebihi kepentingan masing-masing negara.

Globalisasi yang ditandai dengan fenomena pokok yang disebut *borderless countries* (batas geografis antarnegara yang semakin relatif) telah memunculkan isu-isu yang universal sifatnya yang menerpa ke seluruh penjuru dunia. Tanpa memandang corak ideologi atau sistem sosial yang dianut setiap negara dipertanyakan hal-hal seperti apakah demokrasi telah dibina dan dikembangkan di negara yang bersangkutan, apakah hak-hak asasi (HAM) dihormati, apakah keadilan dimiliki oleh warganya, apakah martabat wanitanya dijunjung tinggi, serta apakah lingkungan hidup dikelola secara bertanggung jawab.

Isu-isu tersebut pada gilirannya dijadikan tolok ukur dalam hubungan-hubungan bilateral, multilateral, maupun internasional. Kredibilitas tiap negara dan bangsa akan ditentukan sejauh mana aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nasionalnya. Kalau mampu, maka negara tersebut akan memperoleh dukungan internasional melalui lembaga-lembaga keuangan internasional yang bergengsi untuk membiayai proyek-proyek pembangunan nasionalnya. Sebaliknya kalau tidak mampu menampilkan *performance* yang baik berakibat dikucilkan dari pergaulan internasional dengan sanksi dalam berbagai bidang seperti halnya yang terjadi atas Libia dan Irak dewasa ini.

Dewasa ini, makna globalisasi dipersepsikan sebagai bentuk lanjutan dari perkembangan pengetahuan yang ada di dunia, yaitu ketika awal lahirnya masa pencerahan (*enlightment*) yang mengubah *mainstream* pemikiran yang bercirikan nilai keyakinan menuju pemaksimalan akal sebagai instrumen. Kemudian

berlanjut pada penggunaan istilah modernitas sebagai jilid kedua dengan menjadikan masyarakat industrial yang lepas dari batasan dogma-dogma yang ada sebelumnya.

Ketika melihat kasus Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Globalisasi seakan menemukan momentumnya. Akan tetapi, ketika melihat kasus kasus di negara-negara miskin dan negara-negara dunia ketiga lain di Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, justru globalisasi seakan menjadi proses pemiskinan dan menjadi mesin uang bagi negara-negara kapitalis.

Pada akhirnya, perdebatan tentang globalisasi mengerucut pada janjinya terhadap kesejahteraan manusia. Kemudian, para kritikus globalisasi berusaha terus memunculkan pertanyaan, apakah globalisasi itu menjanjikan kesejahteraan masyarakat dunia secara keseluruhan atau malah memperkuat kuasa kapitalisme liberal (dalam hal ini Amerika dan negara-negara kaya lainnya yang kini mengglobal) Kemudian bagaimanakah bangunan argumentasi keduanya, bagaimanakah kekuatan dan kelemahan baik yang pro terhadap globalisasi maupun yang anti terhadapnya.

B. Proses Perubahan Global

Tidak dapat dipungkiri masyarakat sekarang hidup dalam keadaan kekinian yang ditandai oleh jiwa zaman, gaya hidup, pandangan dunia yang sedang dominan (*trend*). Lewat berbagai proses pelebagaan semua itu dibudayakan pada individu maupun kelompok, maka alam pikiran serta pandangannya menjadi terpengaruh bahkan terbentuk sepenuhnya. Itulah yang saat ini terjadi pada negara-negara dan bangsa-bangsa di abad 21 (milenium ketiga). Implikasinya bahwa umat manusia diintegrasikan dalam satu dunia dengan budaya global yang bercirikan transparansi dan kebebasan.

“Politik global” adalah percaturan perebutan kekuasaan, hegemoni, dan pengaruh dunia global antara kekuatan-kekuatan besar di dunia yang terkadang berupa proses politik yang melibatkan banyak negara, lembaga internasional dan kepentingan kelompok tertentu dan diwarnai pertempuran antarkekuatan militer yang menyimpan banyak kepentingan di belakangnya.

Isu politik global bukan suatu hal yang baru dalam percaturan politik internasional karena pada dasarnya bibit politik global telah muncul sejak didirikannya *league of nation* dengan pionernya Woodrow Wilson, dengan konsep-konsep *open government*, *self-determination*, dan juga konsep *collective security* yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah paradigma baru yang dikenal dengan paradigma idealisme. Pada perkembangan selanjutnya, muncullah paradigma yang intinya pengembangan dari idealisme seperti halnya liberalisme dan internasionalisme yang mengangkat isu-isu global.

Sejak berakhirnya perang dingin, dunia dilanda oleh suatu arus perubahan yang bersifat global. Pada mulanya wujud dari perubahan tersebut terutama sekali terlihat dalam perkembangan sistem informasi, komunikasi, dan transportasi dengan fenomena yang mempersingkat jarak di dalam hubungan antarnegara atau antarwilayah, baik dalam arti ruang maupun waktu. Kemajuan-kemajuan iptek tersebut telah tercapai berkat adanya kemampuan industri dan ekonomi untuk mendukungnya. Adanya keterkaitan antara kedua faktor ini menimbulkan perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam masyarakat. Perkembangan yang demikian pesat dan perubahan-perubahan yang ditimbulkannya, bersifat global atau mendunia.

Perkembangan dalam bidang informasi dan transportasi mempunyai dampak terhadap masyarakat internasional dalam dua hal.

1. Kepadatan perkembangan informasi, komunikasi, dan transportasi telah berhasil menerobos batas-batas wilayah negara.
2. Dalam banyak hal penerobosan-penerobosan yang terjadi itu telah menyebabkan gagalnya masyarakat menegakkan identitas dan kedaulatan negaranya.

Adanya perubahan yang begitu cepat dalam bidang informasi, komunikasi, dan transportasi menyebabkan kedaulatan negara menjadi kurang atau bahkan tidak relevan lagi, sekurang-kurangnya dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini tidak lain karena negara menjadi tidak atau kurang berdaya untuk menepis penerobosan informasi, komunikasi, dan transportasi yang dilakukan oleh masyarakat di luar perbatasannya.

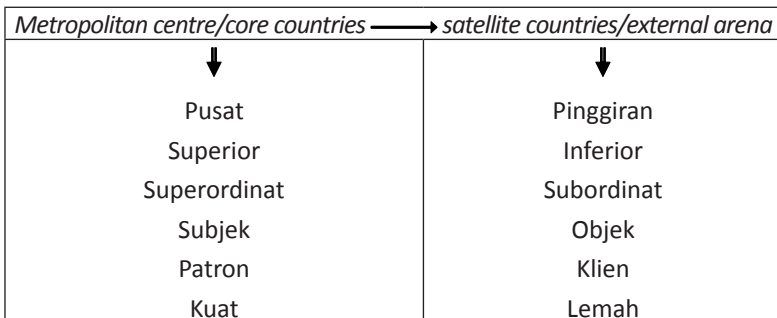
Alasan mengapa suatu negara tidak berdaya untuk menerapkan kedaulatannya dalam menghadapi perkembangan informasi, komunikasi, dan transportasi adalah sebagai berikut.

1. Arus pengaruh informasi, komunikasi dan transportasi begitu deras, sehingga negara tidak mampu untuk mengatasinya.
2. Ada kebutuhan dalam negara tersebut untuk menerima dan memanfaatkan seluruh atau sebagian arus informasi, komunikasi, dan transportasi. Hal ini berarti bahwa negara "terpaksa" mengalah terhadap "pemaksaan" dari luar demi terpenuhinya kepentingan warga negara atau masyarakatnya. Negara tidak lagi berdaulat untuk menentukan bentuk kepentingan warganya, sebab bentuk kepentingan tersebut telah dipengaruhi atau ikut ditentukan oleh negara lain.

Bila dikaji lebih jauh, masyarakat dunia sekarang sedang mengalami perubahan dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Itu berarti bahwa bagi sebagian besar masyarakat di

Indonesia dan negara-negara berkembang secara umum sedang terjadi loncatan yang cukup drastis dari masyarakat agraris dengan sistem pertanian subsistem, melangkahi pola hidup masyarakat industri dan harus masuk dalam masyarakat informasi. Pada era pertanian, manusia harus berjuang dan tergantung kepada alam. Pada era industri, manusia berusaha mengalahkan alam dan mendapatkan efisiensi sehingga lahirlah mesin-mesin dan kemajuan yang terfokus pada otomatisasi. Era informasi membawa angin yang baru: barang yang justru tidak terwujud, sehingga yang namanya informasi menjadi barang yang paling berharga. Kemajuan di bidang informasi melaju, mendukung adanya globalisasi. Informasi dengan cepat berkembang dan bermakna serta berharga disebarkan ke segala penjuru seolah "tanpa batas". Pada negara maju justru mengurangi kegiatan industrialnya dan dengan cepat berubah ke perusahaan jasa yang alat produksinya adalah pengetahuan dan hasil produksinya berupa keterampilan *entrepreneurship* yang baru.

Dunia dikendalikan atau diatur oleh sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini, dunia dibagi atas negara inti (*core countries/ metropolitan centre*) dan medan luar (*external arena/ satellite countries*). Pada praktiknya negara inti banyak menghegemoni atau memonopoli *external arena*.



Gambar 10.1. Pembagian Dunia *Core Countries* dan *External Countries*

Globalisasi merupakan proses berskala global yang melintasi batas kebangsaan yang mengintegrasikan dan menghubungkan masyarakat dan organisasi-organisasi sedemikian rupa dalam dimensi ruang dan waktu yang baru. Arus perubahan dalam era globalisasi juga bergerak dari pusat ke pinggiran, dari utara ke selatan. Superior Barat, negara industri maju atau negara-negara utara bergerak menuju negara berkembang, negara ekonomi subsistem atau negara-negara selatan. Pada era globalisasi terjadi pertukaran budaya, materi, dan informasi tanpa batas teritorial bangsa. Orang Belanda tidak susah payah harus datang ke Indonesia untuk menikmati gado-gado dan sate karena makanan tersebut sudah ada dalam daftar menu di negara mereka. Sebaliknya, *Kentucky Fried Chicken* (KFC) juga sudah menjamur di kota-kota besar di Indonesia. Masyarakat berkembang yang dikategorikan pinggiran cepat terbuka terhadap pengaruh yang datang dari *colonial centre* tersebut.

C. Dampak Globalisasi Secara Umum

Globalisasi telah menciptakan berbagai masalah dan kepentingan yang sifatnya global, bahkan ada begitu banyak kepentingan-kepentingan yang tidak lagi bisa dipenuhi kecuali melalui peran kekuatan global atau melibatkan unsur *suprastate*. Terkadang justru kepentingan sebuah negara sendiri tidak akan bisa terpenuhi kecuali dengan mengondisikan *external* sebagai *support* kepentingan domestik. Maka politik global tidak lain adalah pergulatan global dalam mewujudkan kepentingan para aktor yang menjalankannya.

Dalam percaturan politik global, pengaruh negara-negara maju sangat kuat. Ini kerana mereka mempunyai kepentingan dalam dunia global yang sangat besar, baik itu ideologis,

ekonomis, maupun kepentingan keamanan untuk menciptakan tatanan global yang melindungi keamanannya dengan melakukan pengawasan senjata juga merupakan salah satu kepentingan Barat yang amat vital. Infrastruktur yang mereka miliki seperti media komunikasi, transportasi dan modal yang besar semakin memungkinkan memperbesar peran mereka dalam percaturan politik global. Sementara itu, negara-negara berkembang dibuat tergantung dengan sistem hutang internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Masyarakat berkembang dijadikan kecanduan dengan produk teknologi maju melalui konsumerisme yang disiarkan oleh media-media massa.

Hegemoni demokrasi yang dianggap perpanjangan dari kapitalisme dalam lingkup global telah membuat pengap kekuatan ideologis lain yang selama ini kontra demokrasi, seperti komunisme dengan sosialismenya. Kekuatan lain seperti nasionalisme juga terancam akan terlindas oleh hegemoni demokrasi global ini. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran kuat di kalangan nasionalis bahwa ancaman baru neokolonialisme akan segera muncul menguasai, menindas dan menjajah mereka kembali. Kekhawatiran tersebut telah menyebabkan kanalisasi kekuatan baru yang juga bersifat global. Kekuatan ini ingin melakukan *counter balance* terhadap kekuatan global yang diciptakan oleh blok Barat. Kanalisasi kekuatan baru inilah yang kemudian mengkristal menjadi kekuatan destruktif, yang oleh media massa diistilahkan dengan terorisme, radikalisme, tradisionalisme dan fundamentalisme.

Namun sebenarnya ada juga pengaruh positif globalisasi dalam suatu kehidupan politik, terutama pada nilai-nilai nasionalisme. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari

suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.

Dalam dunia yang mempunyai kecenderungan kuat ke arah globalisasi, maka negara-negara besar dan maju akan lebih besar peranannya serta keuntungannya sehingga mudah timbul dominasi. Sebaliknya, negara-negara dengan aset kecil akan menjadi objek. Kalau negara nasional saja belum mampu mengambil keuntungan maksimal dari globalisasi, apalagi unit yang lebih kecil atau unit etnik. Jelaslah bahwa hal itu berlaku bagi unit politik yang belum memiliki aset yang berkualitas tinggi serta sumber daya manusianya masih terbelakang.

Konstelasi dunia seperti tersebut di atas membawa dampak antara lain terjadi dominasi dalam berbagai bidang misalnya teknologi, komunikasi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Di dunia ketiga (negara-negara selatan) timbul gejala-gejala seperti konsumerisme, materialisme, dan kendornya moralitas. Dengan adanya produksi massal maka masyarakat dibanjiri beragam komoditas dan membuat kemudahan dengan sendirinya menciptakan mentalitas yang konsumtif, kemewahan, santai, hiburan, cenderung bersuka ria. Gaya hidup yang hedonistik, materialistik, dan cenderung melahirkan sifat ketamakan atau keserakahan, serta mengarah pada sifat dan sikap individualistik.

Dengan demikian, besar bahayanya rakyat menjadi tidak kreatif lagi, semangat lembek dan berwatak hedonistik. Apabila hal itu menjadi umum dalam masyarakat, maka tidak dapat dihindari adanya dekadensi dan demokratisasi. Seperti yang terjadi di Barat, kesejahteraan memperkuat sekularisasi tidak lain karena materialisme dan dipihak lain religiusitas sangat

merosot. Selain itu, modernisasi yang timbul bersifat serba lahiriah, artinya menerima (meniru) hasil iptek itu tetapi tidak melembagakan 'jiwa' atau mentalitas yang menghasilkan iptek itu seperti asketisme intelektual, etos kerja, kebudayaan akademis, profesional, kepakaran (*expertise*), dan sebagainya.

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang begitu besar dalam dimensi kehidupan manusia, karena globalisasi merupakan proses internasionalisasi seluruh tatanan masyarakat modern, sehingga terjadi dampak yang beragam terutama pada aspek sosial dampak positifnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.

Dampak negatifnya, banyaknya nilai dan budaya masyarakat yang mengalami perubahan dengan cara meniru atau menerapkannya secara selektif. Salah satu contoh dengan hadirnya modernisasi di segala bidang kehidupan, terjadi perubahan ciri kehidupan masyarakat desa yang tadinya sarat dengan nilai-nilai gotong royong menjadi individual. Selain itu juga timbulnya sifat ingin serba mudah dan gampang (instan) pada diri seseorang. Pada sebagian masyarakat, juga sudah banyak yang mengikuti nilai-nilai budaya luar yang dapat terjadi dehumanisasi yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Di sini masyarakat Indonesia menghadapi suatu proses akulturasi yang besar potensinya untuk memasukkan nilai-nilai baru yang sering bertentangan atau merusak nilai lama. Prinsip-prinsip etis dan moral perlu dijadikan panduan serta rambu-rambu dalam mengadopsi dan mengadaptasikan teknologi tertentu.

Salah satu teknologi global yang sekarang pesat berkembang adalah internet. Internet merupakan teknologi yang memberikan

informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Apalagi bagi anak muda, internet sudah menjadi santapan mereka sehari-hari. Jika digunakan secara semestinya tentu Indonesia memperoleh manfaat yang berguna. Tetapi jika tidak, Indonesia akan mendapat kerugian. Saat ini banyak pelajar dan mahasiswa, bahkan anak di bawah umur yang menggunakan internet untuk hal yang tidak semestinya. Misalnya untuk membuka situs-situs porno. Bukan hanya internet, ada satu pegangan wajib mereka, yaitu *handphone*. Rasa sosial terhadap masyarakat menjadi tidak ada karena mereka lebih memilih sibuk dengan menggunakan *handphone*.

Sadar atau tidak sadar, pemuja gaya merupakan korban dari suatu kontrol globalisasi yang dipegang oleh kapitalis. Melalui media dan teknologi, mereka mempunyai kuasa untuk memperlakukan dan mengontrol bagaimana masyarakat menjalankan kehidupannya.

Di lain pihak, globalisasi secara positif akan mendukung nasionalisme dalam menggalakkan proses integrasi antara lain dengan mendobrak etnosentrik. Menyaksikan peristiwa di seluruh dunia lewat layar TV dapat memperluas wawasan orang, selain itu dapat tumbuh empati terhadap sesama manusia. Siaran TV CNN misalnya secara instan memperlihatkan *event* World Cup yang tengah berlangsung di berbagai kota utama di Prancis, skenario Perang Teluk, huru-hara di kota-kota besar dunia dan sebagainya.

Sebaliknya, lewat TV diperkenalkan peristiwa-peristiwa yang penuh kekejaman, kekerasan, contoh-contoh tindakan/kelakuan amoral, kehidupan materialistis dan sebagainya. Pengaruh globalisasi secara drastis dapat mengakibatkan erosi pada tradisi. Nasionalisme yang sedang tumbuh terancam oleh dampak globalisasi karena dapat memperlemah semangat, loyalitas dan

solidaritas nasional. Globalisasi mau tidak mau memperkuat saling ketergantungan antarnegara, di antaranya dalam membentuk orde sosial ekonomi baru. Hal ini mencakup antara lain masalah pasaran dan keseimbangan antara ekonomi negara-negara khususnya soal surplus perdagangannya. Di sini tampak dominasi utara terhadap selatan, sehingga terkesan neokolonialisme. Walaupun masalah kedaulatan negara tidak dilanggar, namun secara praktis banyak keputusan penting tergantung pada kemauan lembaga-lembaga keuangan internasional. Dampak lainnya adalah polarisasi antara kaya dan miskin, golongan kaya dan miskin dalam negara masing-masing, surplus produksi pangan di satu pihak dan kelaparan di pihak lain, timbulnya megapolis beserta munculnya proletariat kota, anak-anak jalanan, pasar ganja, daerah permukiman kumuh, polusi, masalah udara bersih, air bersih dan lain sebagainya.

D. Dampak Globalisasi Terhadap Ekonomi Negara

Kecenderungan akselerasi perekonomian global yang bebas menembus batas negara, melalui banjirnya produk, jasa, dana dan informasi ke berbagai pelosok dunia, menjadikan Indonesia hanya sebagai sasaran dan arena pemasaran. Sementara produk dalam negeri mengalami kelesuan sulit menembus pasar di luar negeri. Produk-produk luar negeri dengan kualitas yang baik dan harga yang relatif murah, terus masuk dengan dilandasi komitmen "*free trade*". Kondisi ekonomi yang melanda Indonesia saat ini juga disebabkan oleh iklim politik, penegakan hukum, dan keamanan yang tidak menunjang. Stabilitas nasional selalu terganggu, keamanan usaha tidak terlindungi, akibatnya produktivitas anjlok.

Dampak positif globalisasi ekonomi:

1. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara akan

memengaruhi warga negara dalam hal pengabdian kepada negara.

2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri.
3. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri.
4. Menambah devisa negara dengan banyaknya negara-negara asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.
5. Banyaknya tercipta lapangan kerja yang membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang.
6. Banyaknya jumlah permintaan terhadap suatu produk.
7. Meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa

Dampak negatif:

1. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri. Kebanggaan terhadap produk asing mengakibatkan minder yang justru menyurutkan rasa nasionalisme.
2. Terjadinya monopoli perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara maju yang dapat menyebabkan negara-negara berkembang semakin miskin.
3. Jika barang impor terlalu banyak, maka akan dapat membuat produk dalam negeri kalah saing.
4. Jika perekonomian negara kita tidak cukup kuat dalam bersaing, maka perekonomian kita akan hancur karena era globalisasi.

E. Dampak Globalisasi Terhadap Politik Indonesia

Globalisasi diidentikkan dengan proses integrasi negara yang ada di dunia sehingga menjadi tanpa batas. Setiap peristiwa yang terjadi di suatu wilayah dapat diketahui secara cepat dan dapat menimbulkan efek di bagian dunia yang lain. Di sini kita melihat bahwa nantinya dengan proses integrasi seperti ini dikhawatirkan rasa nasionalisme akan memudar, karena nantinya eksistensi negara-bangsa juga akan mengalami kemunduran. Sebab pada dasarnya negara sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa, sehingga semua dikembalikan kepada kekuatan dunia internasional. Pihak asing nantinya dapat mengintervensi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Semakin terbukanya arus informasi juga memengaruhi pola pikir suatu bangsa. Masuknya budaya dan nilai asing turut mengubah cara pandang anak bangsa. Semangat kebersamaan dan gotong royong telah digantikan dengan semangat individualisme. Ikatan negara bangsa sebagai hasil dari pergaulan antara kedaulatan negara mulai merenggang. Akibatnya, kita melihat banyak konflik yang terangkat ke permukaan. Konflik yang muncul tersebut ternyata diakibatkan oleh masalah sepele. Belakangan ini juga muncul gerakan separatisme yang mengarah pada ancaman disintegrasi. Hal ini diakibatkan memudarnya semangat persatuan dan nasionalisme. Tantangan seperti itu hanya bisa diatasi bila bangsa Indonesia di satu pihak tetap mempertahankan identitasnya dalam ikatan persatuan nasional.

Globalisasi juga menimbulkan perubahan sosial yang cenderung untuk menciptakan guncangan sosial (*culture shock*). Masuknya pemikiran seperti demokrasi, HAM, kesetaraan gender sedikit banyak mengguncang sendi masyarakat. Ketidaksiapan masyarakat ketika menemukan nilai baru malah menimbulkan

keguncangan dan friksi tersendiri. Perubahan sosial terus terjadi selama proses globalisasi karena masuknya nilai-nilai asing. Pada hakikatnya perubahan sosial yang terjadi akibat globalisasi dipandang sebagai upaya bangsa untuk mengembangkan kepribadiannya sendiri melalui penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern.

Dampak yang dialami Indonesia dari perubahan global tersebut boleh dikatakan mencakup berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang politik, salah satu dampaknya bersumber pada penyebaran nilai-nilai politik Barat melalui jaringan informasi dan transportasi yang berkembang secara pesat. Dengan demikian, proses pendidikan (atau sosialisasi) politik kita akan dipengaruhi oleh nilai-nilai politik Barat.

Artinya, nilai-nilai politik Barat akan merasuk ke dalam proses pendidikan politik kita yang selanjutnya akan menyerap nilai-nilai tersebut kepada masyarakat, baik secara langsung atau pun tidak langsung. Akibatnya jelas, yaitu nilai-nilai politik kita, seperti musyawarah/mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong, akan meluntur dan lama kelamaan akan menghilang untuk diganti dengan nilai-nilai politik Barat. Pada gilirannya akan terjadi pula perubahan-perubahan dalam sikap serta perilaku politik masyarakat, di samping perubahan ciri dan bentuk struktur politik.

Dengan kata lain, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Selain itu, akan muncul sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian perilaku antarwarga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa.

Globalisasi membawa paham liberalisme yang selalu diidentikkan dengan kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Liberalisasi yang terlalu liberal juga membuat peran negara sangat terbatas dalam mengontrol ekonomi dalam negeri, seperti terhadap arus modal jangka pendek yang masuk dan keluar dalam jumlah besar.

Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan liberalisasi pasar sejak awal 1980-an (bahkan mungkin jauh sebelumnya), antara lain dipicu dengan krisis minyak yang membuat Indonesia menyadari rawannya ketergantungan yang terlalu besar pada ekspor minyak mentah dan kepentingan meningkatkan efisiensi. Upaya membuka diri itu dimulai dari diluncurkannya Undang-Undang Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Disusul berbagai paket deregulasi yang sangat ekstensif pada awal dekade 1980-an hingga awal 1990-an, mulai dari deregulasi perbankan melalui Paket Oktober (Pakto) 1983, kemudian deregulasi moneter dan sektor keuangan, deregulasi fiskal, deregulasi perdagangan dan investasi. Kebijakan deregulasi ini bisa dikatakan sangat liberal. Dana Moneter Internasional (IMF) sendiri mengakui Indonesia adalah salah satu negara yang perekonomiannya sangat terbuka.

Dibandingkan dengan beberapa negara berkembang setingkat, Indonesia termasuk paling bernafsu membuka pasar. Terlalu cepat dan prematur, sampai-sampai menciptakan kerapuhan dalam perekonomian yang diyakini sebagai salah satu akar penyebab krisis 1997.

F. Antisipasi Strategis

Dilihat dari sudut ilmu politik, sistem pemerintahan Indonesia termasuk salah satu yang paling tidak efisien di dunia. Sistem pemerintahan yang demikian bukan saja merugikan masyarakat secara politik, tetapi juga secara ekonomi. Ada dugaan bahwa salah satu faktor yang membuat ekonomi Indonesia tidak efisien adalah sistem pemerintahan Indonesia yang juga tidak efisien, seperti proses birokrasi yang berbelit-belit. Sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat sentralistis juga tidak mendorong kekuatan-kekuatan ekonomi Indonesia menjadi efisien.

Dalam rangka mengefisiensikan pemerintahan, Indonesia perlu melakukan desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah-daerah. Sebab, dengan memberikan otonomi kepada daerah-daerah, akan dapat mengembangkan daerah-daerah sebagai kekuatan ekonomi dalam rangka menghadapi liberalisasi perekonomian dunia. Dengan memiliki otonomi, maka daerah-daerah akan dapat mengembangkan diri, sehingga akan lebih mampu mengatasi tantangan-tantangan dan menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan lokal yang dihadapinya, tanpa membebankan Pemerintah Pusat. Dengan demikian Pemerintah Pusat akan lebih dapat memberikan perhatian pada masalah-masalah yang bersifat nasional dan internasional, sehingga pemerintahan akan menjadi lebih efisien dan efektif.

Langkah strategis lainnya yaitu dengan memperjuangkan terus penegakan kedaulatan negara dengan mencoba membendung arus negatif globalisasi, sehingga lebih menguntungkan negara. Dalam hubungan ini ada sejumlah model yang dapat dipertimbangkan sebagai pola, baik dalam bidang sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Pelarangan pemasangan antena parabola di rumah-rumah tangga akan mampu mengurangi serbuan nilai-nilai Barat

yang negatif, sehingga nilai-nilai bangsa sendiri dapat terus dipelihara. Langkah pembendungan semacam ini juga akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dalam bidang politik, dalam arti terhambat masuknya nilai-nilai politik Barat yang tidak dikehendaki.

Model penegakan kedaulatan negara bertumpu pada anggapan bahwa barang dan jasa apa pun yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan negara secara tanpa izin merupakan milik negara. Sasaran model ini terutama adalah bidang ekonomi, namun ia akan memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan sosial budaya, dan juga politik. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan menganggap pemancaran informasi melalui satelit ke wilayah Indonesia tanpa izin sebagai tidak sah dan melanggar kedaulatan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan TV asing yang memancarkan informasi tersebut diharuskan meminta izin, dan selanjutnya dikenai pajak. Jikalau mereka menolak, maka perusahaan-perusahaan nasional yang menyalurkan siaran-siaran TV asing itu diwajibkan membayar kepada pemerintah dan bukan kepada perusahaan-perusahaan TV asing. Demikian pula dengan teknologi internet. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informasi dan bekerja sama dengan pakar telematika dapat berperan aktif dengan memblokir situs-situs porno agar tidak dikonsumsi masyarakat, terutama para pelajar sebagai generasi potensial bangsa.

Selain mengantisipasi antisipasi siaran TV dan internet, era globalisasi dewasa ini juga mengharuskan masyarakat untuk bersikap arif dan mampu merumuskan serta mengaktualisasikan kembali nilai-nilai kebangsaan yang tangguh dalam berinteraksi terhadap tatanan dunia luar dengan tetap berpijak pada jati diri, serta menyegarkan dan memperluas makna pemahaman

kebangsaan dengan mengurangi berbagai dampak negatif yang akan timbul dengan cara:

1. selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa,
2. pembangunan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan,
3. pemberian keterampilan hidup (*life skill*) agar mampu menciptakan kreativitas dan kemandirian,
4. menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya,
5. usaha menumbuhkan budaya dan sikap hidup global, seperti mandiri, kreatif, menghargai karya, optimis, dan terbuka,
6. usaha selalu menumbuhkan wawasan kebangsaan dan identitas nasional,
7. usaha menciptakan pemerintahan yang transparan dan demokratis.

Dengan adanya langkah-langkah antisipasi tersebut, diharapkan mampu menangkis pengaruh globalisasi yang dapat mengubah nilai nasionalisme terhadap bangsa, sehingga kita tidak akan kehilangan kepribadian bangsa.

Globalisasi sebagai fenomena kontemporer mustahil akan meniadakan pluralisme kebudayaan dan peradaban. Sebaliknya, dalam perwujudan yang ekstrem, globalisasi justru akan menjadi pembangkit nasionalisme yang timbul karena kesadaran sebagai salah satu elemen budaya yang khas. Dalam hubungan ini akan berlaku hukum “serangan balik”, yaitu bahwa tarikan ke arah globalisasi yang ekstrem akan menimbulkan gerak balik ke arah berlawanan, berupa reaksi penentangan yang cenderung menggejala sebagai akibat dominasi pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal.

GLOSARIUM

Boundaries: garis-garis yang mendemarkasikan batas-batas terluar dari wilayah suatu negara. Fungsinya mengikat atau membatasi suatu unit politik, semua yang terdapat di dalamnya telah terikat menjadi satu dan mempunyai kekuatan sentripetal.

Determinisme lingkungan: pandangan yang mengatakan bahwa manusia secara ketat ditentukan oleh *stimulus-respon* (lingkungan-perilaku).

Frontier: mewujudkan zona-zona (jalur) dengan lebar yang beraneka ragam yang memisahkan dua wilayah berlainan negara yang berorientasi keluar dan mempunyai kekuatan sentrifugal.

Geografi politik: bidang geografi manusia yang bersangkutan dengan ilmu spasial yang beragam dari hasil proses politik dan cara di mana proses politik itu sendiri yang dipengaruhi oleh struktur tata ruang.

Geopolitik: studi yang fokus pada tata ruang/wilayah untuk kebutuhan pembangunan negara.

Geostrategi: kajian geopolitik yang diarahkan demi kepentingan militer atau perang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara.

Global Warming: Meningkatnya suhu rata-rata di Bumi karena degradasi lingkungan yang salah satu penyebabnya pembakaran melebihi emisi gas dari fosil, sehingga mempunyai efek rumah kaca yang dikeluarkan oleh negara-negara industri dan kendaraan bermotor.

Globalisasi: proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah.

Heartland Theory: teori yang disampaikan Mackinder berisi tentang pentingnya penguasaan wilayah inti yang strategis (pulau dunia) untuk mengendalikan/menguasai dunia.

Ketahanan Nasional: kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi segala macam tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari dalam dan luar.

Lebensraum: (ruang hidup) yang secara eksplisit dikaitkan dengan perkembangan budaya teritorial bangsa dengan perluasan.

Politik: seni dan ilmu untuk memengaruhi atau mengatur negara. Dalam konteks kenegaraan, politik mencakup pendistribusian kekuasaan (*power*) serta kewenangan (*rights*) dan tanggung jawab (*responsibilities*) dalam kerangka mencapai tujuan politik (nasional)

Political Power: suatu kekuatan, kemampuan dan ketangguhan dalam membina, mengembangkan dan mempertahankan kehidupan politik dari suatu negara.

Possibilism: teori yang menyatakan bahwa lingkungan tidak lagi menentukan kendala atau batasan tertentu, namun budaya lain ditentukan oleh tindakan manusia.

Wilayah Inti: digunakan dalam geografi untuk merujuk kepada pusat wilayah negara.

Wilayah Ekumene: daerah yang bisa dihuni (wilayah yang menjadi pusat permukiman)

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, J. 2003. *Geopolitics, Re-visioning World Politic. Second Edition*. New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Blacsell, M. 2006. *Political Geography*. . London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Daldjoeni, N. 1991. *Dasar-Dasar Geografi politik*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Firor, J. 2005. *Perubahan Atmosfer: Sebuah Tantangan Global*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ghezelbash, A. 2005. *The Oil Weapon: Unveilling Iran*. Heartland. Eurasian Review Of Geopolitics. Gruppo Editoriale L'Espresso.
- Haris, A. 2005. *Gelombang Migrasi & Jaringan Perdagangan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartshorne, R. 1960. *Perspective on the Nature of Geography*. Chicago: Rend McNally & Company.
- Haryomataram, S. 1972. *Perkembangan Konsepsi Ketahanan Nasional. Bunga Rampai Ketahanan Nasional (Konsepsi dan Teori) I. Himpunan LEMHANNAS*. Jakarata: PT Ripres Utama.
- Haryono, I. D. 2009. *Konflik Perbatasan Negara Di Kawasan Asia Pasifik*. Diakses melalui <http://indronet.files.wordpress.com>. pada 28 Maret 2009.
- Harsawaskita, A. 2007. "Great Power Politics di Asia Tengah: Suatu Pandangan Geopolitik", dalam *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Graha Ilmu.
- Hayati, S dan A. Yani. 2007. *Geografi politik*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Kina. 2008. *Peranan Industri Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. Kina (Karya Indonesia). Media Ekuitas Produk Indonesia. Nomor 04 2008. Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Kuper, A & J. Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu sosial. Buku Satu: Accelerator- Lyotard*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kuper, A & J. Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu sosial. Buku Dua: Machiavelli-World System*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Makarim, N. A. 2009. Geopolitik. Diakses melalui <http://www.kompas.com> pada 28 Maret 2009.
- Mini, F. 2007. *Owning the Weather: The Global Environmental War is Already Begun. The Energy Game. Heartland. Eurasian Review Of Geopolitics*. Gruppo Editoriale L'Espresso.
- Mitropoulos, A. 2007. *Notes on the Frontiers and Borders of the Postcolony. Heartland. Eurasian Review Of Geopolitics*. Gruppo Editoriale L'Espresso.
- Murphey, R. 1966. *The Scope of Geography*, Chicago: Rand MacNally.
- Painter, J. 1995. *Politics, Geography & Political Geography: A Critical Geography*. Arnold, London: A Member of Hodder Headline Group.
- Prodi, R. 2006. *Building Bridges Between Asia and Europe: Silk Road*. Heartland. Eurasian Review Of Geopolitics. Gruppo Editoriale L'Espresso.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumaatmadja, Nursid. 1988. *Studi Geografi: Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni.
- Tirtosudarmo, R. 1995. *Demografi Politik: Pembangunan Indonesia Dari Riau Sampai Timor-Timur*. Jakarta: PT. Sh.
- Warwick, E. M. 2006. *Geographies Of Globalization*. New York: Routledge Taylor and Francis Group.

TENTANG PENULIS



Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd,MT .
Lahir di Bojonegoro, 06 Desember 1908.
Mengajar di Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2005 sampai sekarang. Mata Kuliah yang diampu antara lain: Media Pembelajaran Geografi, Kajian Kurikulum Geografi SMA, Geografi politik, dan Pengantar Kosmografi. Pernah mengajar di BKB Nurul Fikri Surabaya (2002-2010), SMA Muhammadiyah 3 Surabaya (2003–2009) dan SMA ‘Terpadu’ Nurul Huda Surabaya (2003–2008). Riwayat pendidikan antara lain: menempuh sarjana pendidikan Geografi di Universitas Negeri Surabaya (S1) lulus tahun 2003, menempuh pascasarjana Penginderaan Jauh di Institut Teknologi Sepuluh November (S2) lulus tahun 2008, menempuh pascasarjana Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang (S3) lulus tahun 2013. Pengalaman menulis buku antara lain: Pengantar Kosmografi tahun 2007, Kajian Kurikulum Geografi SMA tahun 2012 dan Media Pembelajaran Geografi. Aktif di beberapa organisasi sosial sebagai: Bendahara III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) pusat (2008-2013), Pengurus YPP Yatim ‘Ar-Rohmah’ Bojonegoro (2005 – sekarang).